



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for The Excellence



p-ISSN: 2623-0364
e-ISSN: 2623-0569
Vol. 1 No. 1, November 2018

JURNAL SURYA MASYARAKAT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus)

p-ISSN: 2623-0364
e-ISSN: 2623-0569
Vol. 1 No. 1, November 2018



JURNAL SURYA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus)



JURNAL SURYA MASYARAKAT



Jurnal Surya Masyarakat (p-ISSN: 2623-0364; e-ISSN: 2623-0569), disingkat JSM, adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus).

Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, yang bertujuan untuk menerbitkan pemikiran-pemikiran konseptual ataupun gagasan-gagasan dan hasil-hasil penelitian yang telah didapat di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Fokus jurnal ini adalah pada permasalahan-permasalahan utama dalam pengembangan ilmu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

- ✓ Layanan kepada Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
- ✓ Pelatihan, Pemasaran, Teknologi Tepat Guna, dan Desain;
- ✓ Penguatan Masyarakat dan Akses Sosial;
- ✓ Kuliah Kerja Nyata;
- ✓ Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
- ✓ Pendidikan untuk Pengembangan yang berkelanjutan.

TIM REDAKSI



Pemimpin Redaksi (<i>Editor in Chief</i>)	Dini Cahyandari
Redaktur Pelaksana (<i>Managing Editor</i>)	Heri Dwi Santoso
Redaktur (<i>Editors</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Achmad Solichan2. Ernawati3. Fitria Fatichatul Hidayah4. Yunan Kholifatuddin Sya'di
Mitra Bestari (<i>Peer-reviewers</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Rahayu Astuti2. N.G.A.G. Eka Martiningsih3. Suparni Setyowati Rahayu4. Rawana5. Eny Winaryati6. Siti Aminah

PENERBIT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M),
Universitas Muhammadiyah Semarang

ALAMAT REDAKSI



Gedung Rektorat Lantai 1, Kampus Terpadu Unimus
Jalan Kedungmundu Raya No. 18, Semarang
Telp.: (024) 74760296
Daring: <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm>
Surel: jsm@unimus.ac.id

HAK CIPTA

Hak cipta adalah milik Jurnal Surya Masyarakat (JSM). Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari redaksi jurnal.

DAFTAR ISI

Judul Penulis	Halaman
Pemberdayaan Kelompok Istri Tani Ternak melalui Pembuatan Produk Olahan Susu di Kelurahan Wates, Kota Semarang, Jawa Tengah ¹⁾ Lucia Hermawati Rahayu, ²⁾ Ronny Windu Sudrajat, ³⁾ Sri Sutanti	1-7
Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon ¹⁾ Sulistiorini Indriaty, ²⁾ Nur Rahmi Hidayati, ³⁾ Arsyad Bachtiar	7-11
Penerapan Teknologi <i>Epoxy Wood</i> dan Pallet dari Limbah Kayu Sebagai Produk Kerajinan Unik Bernilai Ekonomis Tinggi bagi Kelompok Pengrajin di Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ¹⁾ Bambang Sugiantoro, ²⁾ Sakuri, ³⁾ Hartono	12-20
Pengembangan Nilai Karakter Taat melalui Aktivitas Belajar Siswa SMAN 1 Ampel Boyolali ¹⁾ Lisa Virdinarti Putra, ²⁾ Anni Malihatul Hawa, ³⁾ Ika Silfiana Arifatul Khoiriyah...	21-25
Pendampingan Penanggulangan dan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga ¹⁾ Nanik Prasetyoningsih, ²⁾ Tanto Lailam	26-39
Peningkatan Produksi dan Kekuatan Mekanik Batu Bata Press Menggunakan Mesin Cetak Kapasitas 1000 Buah/Jam pada Usaha Keluarga di Desa Kalipucang Kulon ¹⁾ Solechan, ²⁾ Aris Kiswanto	40-46
Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Ikan Asin di Desa Korban Bencana Rob ¹⁾ YPurnomo, ²⁾ Nurhayati	47-53
Peningkatan Pengetahuan Tentang Jamu Pada Siswa-Siswi di Sekolah Dasar Negeri 1 Boyolali ¹⁾ Iwan Setiawan, ²⁾ Suharyanto, ³⁾ Ryan Dianto	54-58
Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Deteksi Dini Faktor Risiko Hipertensi ¹⁾ Ratna Indriawati, ²⁾ Sherly Usman	59-63
Efektifitas Program Partisipatif Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat ¹⁾ Yeni M, ²⁾ Sartika Yuliana, ³⁾ Rini Parmila Yanti	64-80

Pemberdayaan Kelompok Istri Tani Ternak melalui Pembuatan Produk Olahan Susu di Kelurahan Wates, Kota Semarang, Jawa Tengah

The Empowerment of Livestock Farmer's Wife Group through Making Dairy Products in Wates Village, Semarang City, Central Java Province

Lucia Hermawati Rahayu¹, Ronny Windu Sudrajat², Sri Sutanti³

Politeknik Katolik Mangunwijaya Semarang, Kota Semarang

¹lucia.hermawati97@gmail.com, ²ronnywindu@gmail.com, ³butanti10@gmail.com

Riwayat Artikel: Dikirim 1 Oktober 2018; Diterima 11 November 2018; Diterbitkan 30 November 2018

Abstrak

Susu merupakan bahan makanan dengan kandungan gizi yang lengkap, tetapi mudah mengalami kerusakan. Pengolahan susu menjadi produk olahan susu harus dilakukan guna menanggulangi kerusakan susu segar dan memberi nilai tambah susu. Namun, masih banyak petani ternak yang belum mengolah susu yang tidak habis terjual karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan susu termasuk Kelompok Tani Ternak (KTT) di Kelurahan Wates, Semarang. Padahal, keterampilan membuat produk olahan susu, seperti kerupuk dan stik susu, dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Mitra kegiatan PKM ini adalah kelompok istri peternak sapi KTT Air Bening I dan KTT Air Bening II di Kelurahan Wates, Semarang. Kegiatan PKM yang dilakukan meliputi penyuluhan dan pelatihan pembuatan kerupuk dan stik susu, praktek pengemasan, pendampingan dalam mengembangkan dan mengolah susu segar menjadi produk olahan susu, serta monitoring kegiatan. Hasil dari program PKM adalah peningkatan keterampilan mitra dalam memproduksi makanan olahan susu yang dapat dikembangkan sebagai usaha kecil untuk sumber penghasilan tambahan.

Kata kunci: susu, kerupuk susu, stik susu

Abstract

Milk is an ingredient with a complete nutritional content, but is easily damaged. Processing milk into dairy product must be carried out in order to overcome the damage to fresh milk and gives added value to milk. However, there are still many livestock farmers who have not processed milk that has not been sold out due to limited knowledge and skills about milk processing including Kelompok Tani Ternak (KTT) who is a group of Livestock Farmer in Wates Village, Semarang. In fact, the skills to make dairy products, such as crackers and milk stick which are common Indonesian snacks, can be developed to increase farmer's income. Partners of PKM activities are groups of wives of cattle farmers from the KTT Clear Water Summit I and the KTT Air Bening II in Wates Sub-district, Semarang. PKM activities include counseling and training in making crackers and milk sticks, packaging practices, mentoring about developing and processing fresh milk into dairy products, and monitoring other activities. The outcome of the PKM program is the improvement of partner skills in producing dairy product that can be developed by small businesses for additional sources of income.

Keywords: milk, milk crackers, milk sticks

PENDAHULUAN

Susu sapi murni merupakan bahan pangan bernilai tinggi karena hampir semua zat-zat makanan utama yang dibutuhkan manusia terdapat dalam susu dalam keadaan seimbang, mudah dicerna dan dapat diserap oleh tubuh. Susu banyak mengandung zat gizi, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan beberapa mineral. Namun, susu juga dikenal sebagai bahan pangan yang mudah rusak. Pada suhu ruang, susu sapi murni hanya mampu bertahan dalam waktu kurang dari 24 jam (Saleh, 2004).

Umumnya petani ternak sapi sudah mengetahui sifat susu yang tidak tahan lama. Meski demikian, masih banyak petani ternak yang tetap menjual produksi susunya dalam keadaan segar dan tidak mengolahnya apabila tidak habis terjual. Sisa susu biasanya dibuang begitu saja atau disimpan dalam refrigerator (bagi yang punya). Penyimpanan dalam refrigerator pun hanya mampu mempertahankan mutu susu tidak lebih dari 2 hari. Konsumen umumnya juga kurang suka membeli susu sapi segar yang sudah didinginkan dalam refrigerator.

Penjualan susu hasil ternak dalam bentuk susu segar dan tidak diolah ketika sisa, juga dilakukan oleh dua kelompok tani ternak (KTT) yang berada di Kelurahan Wates tepatnya di RT 03/RW 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedua kelompok peternak itu adalah KTT 'Air Bening I' yang diketuai oleh Marsudi dan KTT 'Air Bening II' yang diketuai oleh Kismanto. Produksi susu segar pada KTT 'Air Bening I' dengan 16 ekor sapi produktif (dari total 24 ekor) sekitar 80-90 lt/hari, sedangkan pada KTT 'Air Bening II' dengan 15 sapi produktif (total 22 ekor) antara 75-85 lt/hari. Susu sapi segar oleh kedua KTT biasanya dijual kepada para tengkulak atau pengecer segera setelah diperah dengan harga relatif murah, yakni Rp 6.000,- per liter untuk pembelian lebih dari 5 liter atau Rp 7.000,- per liter bila pembelian kurang dari 5 liter. Hal ini dikarenakan sifat susu segar yang tidak tahan lama (mudah pecah/rusak) dan ketiadaan tempat penyimpanan susu sapi segar (refrigerator). Penjualan susu segar dilakukan di depan rumah oleh istri peternak.

Susu sapi segar yang dihasilkan kedua KTT tidak selalu habis terjual. Ketidakmampuan melakukan diversifikasi produk pangan olahan susu menjadikan sisa susu segar biasanya hanya diberikan cuma-cuma kepada tetangga yang mau atau dicampurkan pada pakan sapi. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan susu dari para istri peternak dan keterbatasan modal usaha. Kondisi seperti ini menjadikan pendapatan harian para peternak menjadi berkurang.

Dari hasil wawancara dengan Marsudi dan Kismanto diketahui bahwa dari hasil penjualan susu segar setelah dikurangi biaya pembelian pakan (bekatul, ampas tahu, dedak kopi, ampas singkong, rumput), obat-obatan, dan biaya operasional, pendapatan rata-rata setiap peternak di kelompok ini hampir sama, yakni \pm Rp 80.000,- per hari atau sekitar Rp 2.400.000,- per bulan. Padahal sebagian besar istri peternak ini tidak bekerja atau berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan pendapatan dari suami, belum lagi keluarga para peternak rata-rata masih menanggung biaya hidup 2 orang anak yang masih sekolah/belum mandiri.

Selama ini para istri peternak kedua kelompok ini belum tahu dan menyadari jika susu sapi dapat diolah menjadi aneka produk pangan olahan susu yang lezat, bergizi, tahan cukup lama, dan bernilai jual lebih tinggi, seperti kerupuk susu, stik susu, dodol susu, dan permen susu.

Oleh karena itu, tim PKM Polteka Manguwiyaya tergerak untuk membina dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para istri peternak kedua KTT tentang diversifikasi dan teknologi pengolahan susu sapi segar menjadi aneka produk makanan yang bergizi, tahan lama, dan bernilai jual tinggi, yakni kerupuk susu dan stik susu.

Penerapan program PKM ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengolahan susu sapi segar (terutama yang tidak laku terjual) sebagai basis pengembangan usaha kecil masyarakat, khususnya usaha hasil ternak kedua KTT, guna menambah penghasilan mereka, yang pada gilirannya bisa menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga para peternak.

METODE

Metode yang digunakan dalam Program Kemitraan Masyarakat kepada kedua mitra (kelompok istri peternak sapi perah KTT 'Air Bening I' dan KTT 'Air Bening II') meliputi:

1. Penyuluhan

Metode penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan/penjelasan tentang kandungan gizi susu dan potensi pengolahan susu, teknik pembuatan adonan kerupuk dan stik susu hingga kalis, metode pengirisan adonan kerupuk setelah dikukus, tujuan pengeringan kerupuk basah dan cara kerja mesin pengering, cara kerja alat giling dan cetak stik. Penyuluhan dilakukan oleh Tim pelaksana (dosen) kepada anggota kedua kelompok.

2. Pelatihan dan praktek

Pelatihan diberikan dalam bentuk demonstrasi tentang pembuatan kerupuk dan stik susu dilanjutkan dengan praktek oleh para peserta. Pelatihan ini bertujuan agar ibu-ibu peserta mampu membuat olahan makanan dari susu sapi secara mandiri serta mampu menggunakan prasarana peralatan produksi kerupuk dan stik susu yang telah disiapkan Tim PKM. Pembuatan kerupuk susu mengacu pada metode Saputro (2012), sedangkan pembuatan stik susu mengacu pada metode Suwarna (2014). Kedua metode ini menggunakan *curd* (gumpalan/dadih) susu pada proses pembuatannya. Sebelumnya, Tim PKM telah melakukan uji coba pembuatan kerupuk dan stik susu baik dengan menggunakan susu segar maupun menggunakan *curd* di laboratorium Teknologi Pangan Politeknik Katolik Mangunwijaya untuk mendapatkan metode terbaik dan komposisi yang tepat tentang pembuatan kerupuk dan stik susu. Kedua produk olahan susu dengan menggunakan *curd* diperoleh lebih disukai dari segi tekstur, rasa, dan aroma pada uji panelis, dibandingkan yang menggunakan susu segar.

3. Pendampingan

Kegiatan berikutnya adalah pendampingan praktek lapangan (praktek produksi makanan olahan susu dan pemasaran produk). Praktek lapangan secara mandiri bertujuan agar mitra mampu menerapkan hasil penyuluhan dan pelatihan tentang pengolahan susu sapi segar menjadi aneka makanan komersial yang telah diikutinya, serta mampu mengemas produk makanan yang dihasilkan secara menarik dan memasarkannya.

4. Monitoring

Monitoring kepada mitra pasca penerapan program PKM bertujuan untuk memantau perkembangan kualitas produk, kapasitas produksi, dan penjualan. Dari pelaksanaan monitoring juga untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan program PKM bagi masing-masing mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan susu menjadi kerupuk dan stik susu

Susu mempunyai manfaat ekonomis yang sangat besar karena selain dapat diminum sebagai susu segar setelah dipasteurisasi, susu juga dapat digunakan sebagai bahan baku produk-produk olahan susu, seperti susu fermentasi (yoghurt, kefir), permen, dodol susu, stik dan kerupuk susu. Pengolahan susu selain untuk menganekaragamkan produk dan selera, juga untuk mengawetkan susu agar relatif lebih tahan lama bila disimpan. Beberapa produk olahan susu ini bahkan memberikan dampak positif dalam kesehatan dan secara ekonomis

dapat meningkatkan nilai jual susu. Beberapa alternatif produk olahan susu yang dapat dibuat dengan metode dan peralatan yang sederhana, terutama untuk skala rumah tangga, yakni pembuatan kerupuk dan stik susu.

Kerupuk dan stik susu merupakan bahan pangan bersumber protein yang terbuat dari susu, tepung tapioka, dan tepung terigu. Penggunaan bahan baku susu merupakan salah satu alternatif peningkatan nilai gizi. Meskipun kerupuk dan stik susu merupakan bahan pangan ringan, tetapi mengandung protein hewani, yakni digunakannya *curd* susu.

Curd adalah gumpalan halus berwarna putih pada susu segar yang mendapat perlakuan asam. *Curd* susu dapat diperoleh dari penambahan enzim bromelin buah nanas atau asam cuka ke dalam susu. Endapan massa yang lunak (*curd*) kemudian dipisahkan dari cairannya (*whey*) (Saputro, 2012). Pada proses pengolahan stik dan kerupuk susu terjadi proses gelatinasi pati membentuk gel, yakni perubahan bentuk sistem mobilitas menjadi sistem polimer menggunakan panas dan air. Selain *curd* dari susu sebagai bahan baku kerupuk dan stik susu, digunakan pula tepung tapioka yang berperan dalam menentukan daya kembang produk. Hal ini dikarenakan kandungan patinya berkisar antara 85-87% dengan sifat yang mudah membengkak (*swelling*) dalam panas. Garam dan gula juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa pada produk akhir. Bahan ini juga berfungsi sebagai pengawet.

Pada pembuatan stik susu dapat ditambahkan telur dalam adonan karena berfungsi sebagai *binding agent* yang mampu mengikat bahan-bahan lain. Telur juga berfungsi sebagai *emulsifier* yang dapat mempertahankan adonan dalam keadaan rata dan menghambat terjadinya pengumpulan untuk mencegah tekstur yang kasar (Setiawati, 2014).

Pada proses pembuatan kerupuk, setelah lontong adonan kerupuk diiris akan dilanjutkan dengan proses pengeringan yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan dan memudahkan penyimpanan kerupuk kering.

Agar proses pengeringan kerupuk susu tidak terpengaruh cuaca dan tetap bisa dilakukan pada saat musim hujan, melalui program PKM ini telah direalisasikan alat pengering/oven untuk mengeringkan irisan kerupuk basah. Alat pengering ini menggunakan pemanas LPG dan dilengkapi dengan exhaust fan agar uap air dari kerupuk basah dapat segera dihisap keluar dari dalam alat pengering.

Peserta, Tempat dan Kegiatan PKM

Peserta Program Kemitraan Masyarakat kali ini adalah kelompok istri peternak sapi perah KTT 'Air Bening I' dan KTT 'Air Bening II' di Kelurahan Wates, Kota Semarang, Jawa Tengah. Para peserta menyambut baik dan antusias terhadap kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim pengabmas Polteka Mangunwijaya. Hal ini ditunjukkan dengan selalu hadirnya mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Tempat kegiatan dilaksanakan di rumah ketua kelompok KTT 'Air Bening I' dan KTT 'Air Bening II' di RT 03/RW 01, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Kegiatan dimulai dengan memberikan penyuluhan, kemudian kegiatan pelatihan dan praktek, pendampingan pada implementasi hasil praktek dan monitoring pasca penerapan program PKM.

Gambar 1:
Penyuluhan dan pelatihan pembuatan curd susu dan olahannya menjadi kerupuk dan stik susu kepada istri peternak sapi perah KTT 'Air Bening I'



Gambar 2:
Penyuluhan dan pelatihan pembuatan curd susu dan olahannya menjadi kerupuk dan stik susu kepada istri peternak sapi perah KTT 'Air Bening II'



Gambar 3:
Pelatihan teknologi pengeringan kerupuk susu basah kepada kedua mitra



Gambar 4:
Praktek pengemasan produk dan labeling oleh kedua mitra



Gambar 5:
Monitoring dan evaluasi pasca penerapan program PKM kepada kedua mitra



Gambar 6:
Produk hasil kegiatan PKM, (a) kerupuk susu mentah, (b) stik susu, (c) kerupuk susu mentah dalam kemasan, (d) stik susu dalam kemasan



a



b



c



d

Kendala kegiatan PKM

Meskipun para anggota kedua mitra memberi respon yang baik selama kegiatan. PKM ini, dari hasil monitoring dan evaluasi masih dijumpai beberapa kendala yang dihadapi, yakni:

1. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak merata dari anggota mitra. Pada umumnya tingkat pendidikan dan keterampilan ketua mitra lebih baik dibandingkan anggota-anggotanya, sehingga penyerapan iptek tidak merata.
2. Kualitas produk makanan olahan susu yang dihasilkan oleh kedua mitra setelah penerapan PKM masih belum stabil. Pada pembuatan kerupuk dan stik susu, selain rasanya masih berubah-ubah (kadang gurih/enak, empuk, dan renyah, tapi kadang kurang enak dan keras), juga ketebalan serta ukurannya masih belum sama/seragam.
3. Pemasaran produk masih dilakukan di sekitar tempat tinggal dan belum berani ke luar lingkungan karena kualitas produk yang belum stabil terutama dari segi rasa, penampilan, dan tekstur produk.

Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya yang dilakukan oleh tim PKM adalah selalu memberi motivasi kepada para anggota kedua mitra, serta melakukan pendampingan produksi secara terus dan berkelanjutan kepada mitra untuk menciptakan hasil olahan yang baik dan bermutu.

KESIMPULAN

1. Pengolahan susu sapi segar untuk bahan baku olahan aneka makanan, selain untuk mengatasi problema susu segar yang tidak laku, juga dapat dijadikan basis membangun usaha untuk menambah pendapatan kedua mitra.
2. Alih Iptek melalui program PKM sangat dibutuhkan oleh kedua mitra untuk meningkatkan keterampilan

anggotanya yang dapat dikembangkan sebagai modal perintis usaha kecil untuk sumber penghasilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada DRPM DIKTI selaku Pemberi Dana program PKM, Kelompok istri peternak sapi perah KTT 'Air Bening I' dan KTT 'Air Bening II' selaku Mitra, Direktur serta LPPM Politeknik Katolik Mangunwijaya yang telah menyediakan fasilitas penunjang, dan mahasiswa: Maria Shinta Crisyanti dan Fionda Oseana Alocita yang telah membantu pelaksanaan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Salah, E. (2004). Teknologi pengolahan susu dan hasil ikutan ternak. Medan (ID): Program Studi Produksi Ternak Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Saputra, E. (2012). *Membuat Kerupuk Susu*. Bahan Ajar Diklat Teknis Pengolahan Hasil Ternak. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.
- Setiawati, N. R. (2014). *Stik Susu*. Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan, Jurusan Tek. Pangan. Bandung: Fakultas Teknik, Universitas Pasundan.
- Suwarna. (2014). *Membuat Stik Susu*. Sumber: <http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/9175/membuat-stik-susu>. Diakses 11 Juni 2017

Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon

The Danger of Using Whitening Cream which Contains Mercury and Hydroquinone and Training in Cosmetic Registration checks at Gunung Jati Hospital Cirebon

Sulistiorini Indriaty¹, Nur Rahmi Hidayati², Arsyad Bachtiar³
D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon, Cirebon
¹lovely_kalila@yahoo.co.id, ²salsabilla_83@yahoo.com

Riwayat Artikel: Dikirim 29 September 2018; Diterima 28 November 2018; Diterbitkan 30 November 2018

Abstrak

Produk pemutih kulit adalah salah satu produk kosmetik yang mengandung bahan aktif yang dapat menekan atau menghambat pembentukan melanin atau menghilangkan melanin yang sudah terbentuk sehingga memberikan warna kulit yang lebih putih. Keterbatasan pengetahuan tentang berbagai produk kosmetik pemutih membuat masyarakat tidak tahu dampak negatif yang timbul jika tidak berhati-hati. Merkuri dan hidroquinon adalah beberapa zat aktif yang sering disalahgunakan oleh produsen kosmetik yang illegal. Tetapi pada kenyataannya penyalahgunaan merkuri dan hidroquinon masih banyak dijumpai pada produk pemutih. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat terutama pasien ruang tunggu di poli rawat jalan Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon dalam hal pengecekan nomor registrasi kosmetika. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan tanya jawab tentang materi bahaya penggunaan kosmetika pemutih yang mengandung merkuri dan hidroquinon dilanjutkan dengan pelatihan pengecekan nomor registrasi kosmetika dengan menggunakan HP android. Dari kegiatan yang dilakukan ternyata masih banyak pasien yang belum mengetahui bahaya dari penggunaan merkuri dan hidroquinon pada krim pemutih serta belum mengetahui bagaimana cara untuk mengecek nomor registrasi kosmetika yang beredar di pasaran. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pasien lebih mengetahui tentang bahaya merkuri dan hidroquinon serta dapat mengecek langsung produk kosmetika yang biasa digunakan sehari-hari.

Kata kunci: krim pemutih, merkuri, hidroquinon, pengecekan registrasi kosmetika

Abstract

Skin whitening products are one of the cosmetic products that contain active ingredients that can suppress or inhibit the formation of melanin or eliminate melanin that has been formed so as to give a whiter skin tone. Limitations of knowledge about various whitening cosmetic products make people do not know the negative effects that arise if not careful. Mercury and hydroquinone are some active substances that are often misused by illegal cosmetics manufacturers. But in fact the abuse of mercury and hydroquinone is still common in whitening products. This activity was carried out with the aim of providing knowledge and skills to the community, especially waiting room patients in the outpatient clinic at Gunung Jati Cirebon Hospital in terms of checking the registration number for cosmetics. This activity was carried out with counseling methods and question and answer about the material hazards of using whitening cosmetics containing mercury and Hydroquinone is followed by training in checking the registration number for cosmetics using an Android cellphone. From this activity it can be concluded that patients are more aware of the dangers of mercury and hydroquinone and can directly check cosmetic products that are commonly used everyday.

Keywords: whitening cream, mercury, hydroquinone, cosmetics registration check

PENDAHULUAN

Bahaya Merkuri dan Hidroquinon

Memiliki kulit putih dan cerah merupakan

dambaan setiap orang, terutama kaum wanita. Oleh sebab itu banyak orang yang berusaha untuk menjaga atau memperbaiki

kesehatan kulitnya, sehingga terlihat lebih menarik. Hal tersebut didukung pula oleh perkembangan teknologi perawatan kulit serta tersebarnya klinik-klinik kecantikan di Indonesia yang menyediakan kosmetik (Tranggono, 2007).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Salah satu sediaan kosmetika yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama oleh kaum wanita adalah produk pemutih wajah. Terkadang produsen yang tidak bertanggung jawab memasukkan bahan yang berbahaya yang digunakan sebagai pemutih kulit yaitu logam merkuri (Hg), yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik (Wijaya, 2013).

Krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan yang terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen (Citra, 2007).

Merkuri anorganik berkisar 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena berpotensi sebagai bahan pemucat warna kulit. Daya pemutih pada kulit sangat kuat, karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf dan otak sangat kuat maka pemakaiannya dilarang dalam sediaan

kosmetik (WHO, 2011).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Dalam kadar yang sedikitpun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (BPOMRI, 2007).

Hidrokinon mampu mengelupas kulit bagian luar dan menghambat pembentukan melanin yang membuat kulit tampak hitam, penggunaan hidroquinon dalam kosmetik tidak boleh lebih dari 2%, hidroquinon tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan jika pemakaian lebih dari 2% harus dibawah kontrol dokter (FDA, 2006). Penggunaan hidroquinon yang berlebihan dapat menyebabkan ookronosis, yaitu kulit berbintil seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan, penderita ookronosis akan merasa kulit seperti terbakar dan gatal (Astuti, 2016).

Pelatihan pengecekan nomor registrasi kosmetika

Menurut Keputusan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan nomor hk.00.05.4.1745 tahun 2008 tentang kosmetik bab 2 persyaratan dan penggolongan, Pasal 2. Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
3. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada bab V tentang izin edar, bagian pertama persyaratan Pasal 10 menyatakan kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM.

Tahun 2006 dan 2007 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia telah melakukan pengujian laboratorium terhadap kosmetik yang beredar dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) merek kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik yaitu: Merkuri (Hg), hidroquinon > 2% dan zat warna Rhodamin B (Sunarko, 2007).

Berdasarkan hasil pengawasan rutin Badan POM di seluruh Indonesia terhadap kosmetika yang beredar dari Oktober 2014 sampai September 2015, ditemukan 30 jenis kosmetika mengandung bahan berbahaya yang terdiri dari 13 jenis kosmetika produksi luar negeri dan 17 jenis kosmetika produksi dalam negeri. Bahan berbahaya yang teridentifikasi terkandung dalam kosmetika tersebut, yaitu bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10 (Rhodamin B), Asam Retinoat, Merkuri dan Hidrokinon. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, bahan-bahan tersebut termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika.

Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat perlu bijak dalam penggunaan kosmetika terutama krim pemutih, dan mengecek nomor registrasi dari sediaan kosmetika tersebut sehingga masyarakat akan lebih aman dalam penggunaan kosmetik.

Dengan berkembangnya zaman pengecekan nomor registrasi dapat dilakukan dengan menggunakan HP android, dan pada umumnya masyarakat menggunakan HP setiap harinya sehingga

pengecekan tersebut dapat lebih mudah dan praktis. Pengecekan registrasi dapat dilakukan dengan menginstal di playstore.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Ceramah

Pemateri menyampaikan uraian materi tentang bahaya penggunaan merkuri dan hidroquinon pada krim pemutih melalui media infokus. Materi yang disampaikan disertai gambaran efek samping penggunaan merkuri dan hidroquinon.

2. Tanya jawab tentang pengetahuan pasien mengenai bahaya merkuri dan hidroquinon dilakukan sebelum materi dilakukan dan setelah materi disampaikan.

3. Pembagian brosur dan surat edaran dari BPOM yang berisi lampiran produk kosmetika yang mengandung zat berbahaya baik yang teregistrasi di BPOM atau pun yang tidak teregistrasi.

4. Pelatihan pengecekan registrasi kosmetika menggunakan HP android dengan cara:

- Menginstal cek BPOM di playstore
- Memasukkan nama produk atau nomor registrasinya
- Pencarian produk

5. Praktek cara penginstalan dan cek registrasi kosmetika dengan menggunakan HP pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Ceramah

Pemateri menyampaikan uraian materi tentang bahaya penggunaan merkuri dan hidroquinon pada krim pemutih melalui media infokus. Materi yang disampaikan disertai gambaran efek samping penggunaan merkuri dan hidroquinon.

2. Tanya jawab tentang pengetahuan pasien mengenai bahaya merkuri dan

- hidrokuinon dilakukan sebelum materi dilakukan dan setelah materi disampaikan.
3. Pembagian brosur dan surat edaran dari BPOM yang berisi lampiran produk kosmetika yang mengandung zat berbahaya baik yang teregistrasi di BPOM atau pun yang tidak teregistrasi.
 4. Pelatihan pengecekan registrasi kosmetika menggunakan HP android dengan cara:
 - d. Menginstal cek BPOM di playstore
 - e. Memasukkan nama produk atau nomor registrasinya
 - f. Pencarian produk
 5. Praktek cara penginstalan dan cek registrasi kosmetika dengan menggunakan HP pasien. Bagian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Spasi tunggal / satu. Jenis huruf Garamond. Ukuran huruf 12 poin. Marjin: normal.

KESIMPULAN

Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pasien lebih mengetahui tentang bahaya merkuri dan hidrokuinon serta dapat mengecek langsung produk kosmetika yang biasa digunakan sehari-hari agar masyarakat terhindar dari penggunaan kosmetika ilegal yang mengandung bahan yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. W., Prasetya, H. R., & Irsalina, D. (2016). Hydroquinone Identification in Whitening Creams Sold at Minimarkets in Minomartini, Yogyakarta. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 2(1), 13-20.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2007). Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna Yang Dilarang: Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.01.432.6081, 1 Agustus 2007. Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2008). Keputusan Badan Pengawasan Obat

- dan Makanan nomor hk.00.05.4.1745 Tahun 2008 tentang Tosmetik.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2015). Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya "Teliti Sebelum Memilih Kosmetika".
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Citra, M. D. (2007). Hati-hati pakai pemutih. Diambil dari <http://cybermed.cbn.net.id/cbprt/healthnews>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1998). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik.
- Sunarko, Th dan Riana M. (2007). Analisis Unsur-unsur Toksik dalam Sampel Krim Pemutih Wajah dengan Metode Analisis Aktivasi Neutron. *Jurnal penelitian Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (BTBIN)*. Tangerang.
- Tranggono, R dan Latifah F. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, F. (2013). Analisis Kadar Merkuri (hg) Dalam Sediaan Hand Body Lotion Whitening Pagi Merek X, Malam Merek X, Dan Bleaching Merek X Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM. *CALYPTRA*, 2(2), 1-12.
- World Health Organization. (2011). Mercury in skin lightening products. *Public Health and Environment. Switzerland: WHO*.

Penerapan Teknologi *Epoxy Wood* dan Pallet dari Limbah Kayu sebagai Produk Kerajinan Unik Bernilai Ekonomis Tinggi bagi Kelompok Pengrajin di Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

Technological Applications of Epoxy Wood and Pallet Made from Wood Wastes as Unique and High Value Craft Products for a Group of Craftsmen in Sangkanayu Village, Mrebet Sub-district, Purbalingga Regency

Bambang Sugiantoro¹⁾, Sakuri²⁾, Hartono³⁾

¹Program Studi Teknik Mesin, ²Program Studi Teknik Industri,

³Program Studi Teknik Elektro,

Sekolah Tinggi Teknik (ST²T) Wiworotomo, Purwokerto

biotech.machining@gmail.com, sakuri@yahoo.com, hartono.fahmi@gmail.com

Riwayat Artikel: Dikirim 29 September 2018; Diterima 28 November 2018; Diterbitkan 30 November 2018

Abstrak

Purbalingga mempunyai keunggulan ketersediaan kayu yang tinggi, kondisi tanah yang kebanyakan pegunungan sangat mendukung tumbuhnya kayu keras, hampir setiap desa memiliki jumlah tanaman keras yang melimpah. Beberapa perusahaan kayu lapis dan mebelair juga banyak menginvestasikan dibidang produksi kayu lapis dan *barecore* di beberapa kawasan di purbalingga. UKM mebelair, kayu lapis dan kusen membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, tidak membutuhkan pendidikan formal, sehingga terbuka pengentasan tenaga kerja secara umum. UKM pengrajin mebelair dan kusen kayu di Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, membuat model berdasarkan pesanan lokal, tidak mengikuti *trend furniture* terbaru, memiliki kesulitan pada pembentukan model radius dan lengkung, *finishing* kurang halus dan waktu yang lama. Kayu dengan lubang dan tidak simetris biasanya tidak digunakan sebagai produk kusen/furnitur, limbah kayu dalam bentuk potongan secara umum tidak dimanfaatkan, padahal volume kayu limbah pada pembentukan mencapai kurang lebih 30% dari bahan baku. UKM mebelair belum memiliki pengetahuan pembentukan kayu dari limbah untuk menjadi produk kerajinan. Disamping itu pengetahuan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan metode pemasaran produk juga masih rendah hanya menunggu pelanggan, mengakibatkan UKM sulit berkembang, persaingan harga antar UKM. Permasalahan pembentukan dengan menggunakan limbah kayu dan bahan baku dalam bentuk potongan digunakan untuk pembuatan kerajinan. Pembentukan ditingkatkan dengan kemampuan untuk membentuk lengkung menggunakan *cutting vertical/bendsam*, untuk percepatan pembelahan menggunakan mesin TTG *circle cutting*. Teknologi yang diterapkan untuk pemanfaatan limbah kayu akibat kerusakan lobang, tidak lurus, akan diubah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi, unik dengan *epoxy wood resin*. Metode pembentukan produk kusen dan mebelair dari kayu (limbah) akan memberikan alternatif untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan, keuntungan lainnya penggunaan epoxy juga meningkatkan daya tahan, anti rayap dan bernilai ekonomis tinggi, berpotensi memiliki brand merk yang khas. Untuk penguatan manajemen, UKM dikenalkan administrasi keuangan, dan strategi pemasaran produk secara online. Solusi diatas diharapkan akan meningkatkan daya saing dan produktifitas UKM, desain produk baru dengan memanfaatkan limbah kayu untuk menjadi produk dinding kayu, dan produk epoxy wood resin, akan meningkatkan pendapatan UKM.

Kata kunci: *epoxy wood resin, wooden wall, circle rotary.*

Abstract

Purbalingga has the advantage of high wood availability, the condition of the land that is mostly mountainous strongly supports the growth of hardwood, almost every village has an abundance of perennials. Several plywood and furniture companies also invested heavily in the production of plywood and barecore in several areas in Purbalingga. Furniture furniture, plywood and sills need a lot of workforce, do not need formal education, so there is a general elimination of labor. UKM of furniture and wood frame craftsmen in Sangkanayu Village, Mrebet Subdistrict, Purbalingga Regency, make a model based on local orders, do not

follow the latest furniture trends, have difficulty in forming radius and curved models, less smooth finishing and long time. Holey and asymmetrical wood is usually not used as a frame / furniture product, wood waste in the form of pieces is generally not utilized, even though the volume of waste wood at the formation reaches approximately 30% of the raw material. Mebelair UKM has no knowledge of wood formation from waste to become handicraft products. Besides that, business management knowledge, financial management, and product marketing methods are also still low, just waiting for customers, which makes it difficult for SMEs to develop, price competition among SMEs. The problem of formation by using wood waste and raw materials in the form of pieces is used for making crafts. Formation is enhanced by the ability to form curves using vertical cutting/bendsaw, for acceleration of cleavage using circle cutting machine. The technology applied to the utilization of wood waste due to damage to the hole, not straight, will be converted into high economic value products, unique with epoxy wood resin. The method of forming frame and furniture products from wood (waste) will provide an alternative to increase added value and income, other benefits of using epoxy also increase durability, anti termites and high economic value, potentially having a distinctive brand brand. To strengthen management, SMEs are introduced to financial administration, and online product marketing strategies. The above solution is expected to improve the competitiveness and productivity of SMEs, the design of new products by utilizing wood waste to become wood wall products, and epoxy wood resin products, will increase the income of SMEs.

Keywords: epoxy wood resin, wooden wall, circle rotary.

PENDAHULUAN

Purbalingga mempunyai keunggulan kesediaan kayu yang tinggi, kondisi tanah yang kebanyakan pegunungan sangat mendukung tumbuhnya kayu keras, hampir setiap desa memiliki jumlah tanaman keras yang melimpah, luas hutan kayu mencapai 30.535,58 HA, BPS Jateng, (2016) Kerajinan dan pengolahan kayu merupakan salah satu dari tujuh produk unggulan purbalingga, data Pemkab Purbalingga, (2017). Beberapa perusahaan kayu lapis dan mebelair juga banyak menginvestasikan dibidang produksi kayu lapis dan *barecore* di beberapa kawasan di purbalingga. UKM mebelair, kayu lapis dan kusen membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, tidak membutuhkan pendidikan formal, sehingga terbuka pengentasan tenaga kerja secara umum. Saat ini jumlah UKM kayu baik UKM dan perusahaan di seluruh kabupaten purbalingga mencapai seratus perusahaan menengah dan ribuan UKM, Data UKM Center, Dinsosnakertrans Purbalingga (2016).

Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, mempunyai luas total 221.525 Ha, dengan 193.125 Ha adalah tanah kering dan hampir 70% untuk perkebunan kayu, sedangkan 28.400 ha, Tanah basah BPS.Kecamatan Mrebet, (2016), Pekerjaan penduduk 97 % swasta, dari beberapa UKM di desa, terdapat 12 pengrajin mebelair dan kusen, data Desa

Sangkanayu (2017), delapan UKM dibidang kusen dan 4 UKM memproduksi furniture. UKM Mitra Sukses pimpinan Sukamto, wokshop di Rt 07 Rw 03, dengan 4 karyawan tetap, yang lebih banyak membuat kusen kayu untuk rumah, omset 7,5-8 juta per minggu, (wawancara Sukamto, 2017). Dari omset tersebut rata rata keuntungan adalah 25 %, keuntungan kotor 1,5-2,0 juta/minggu, gaji pegawai dibayarkan per-akhir pekan sesuai target produksi. Rata rata perhari adalah 35-50 ribu, Dengan Rata-rata penghasilan perpekan sebesar 350-400 ribu/pegawai, keuntungan sangat minim karena habis untuk operasional. Perlu ada produk yang mampu menembus pangsa pasar menengah, sehingga harga dapat lebih tinggi. UKM Maju Jaya dalam membuat model lebih didasarkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan lokal, memiliki permasalahan finishing kurang cepat dan halus, karena poles dan amplas masih manual. Proses *finishing* membutuhkan waktu yang lama, menghambat proses produksi, disamping itu limbah debu sangat mengganggu, ruang produksi penuh lapisan debu.

UKM secara umum belum memiliki pengetahuan manajemen usaha yang memadai, pengelolaan keuangan, dan metode pemasaran produk terbatas, yang mengakibatkan UKM tidak berkembang cepat. Untuk mendapatkan bahan baku

UKM membeli sekaligus per pohon, yang digunakan adalah pada kayu yang lurus dan banyak kayu dalam ukuran pendek dan memiliki cacat terbuang. UKM rata-rata belum memanfaatkan limbah kayu dengan ukuran kecil menjadi produk bernilai ekonomis. UKM Mitra Sukses, untuk menjaga mutu kusen, maka kayu yang digunakan harus berkualitas baik, sehingga banyak bahan baku yang rusak sebagian tidak dapat digunakan untuk produk kusen dan diklasifikasikan menjadi limbah.

Pada proses produksi UKM menghasilkan banyak limbah yang belum dimanfaatkan. Limbah kayu dengan kerusakan akibat lobang, tidak lurus, terkena rayap, akan diubah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi, unik dengan *epoxy wood resin* dan *wooden wall*. Metode ini paling tepat untuk merubah berbagai limbah untuk meningkatkan nilai tambah,

keuntungan lainnya penggunaan *epoxy* juga meningkatkan daya tahan, anti rayap dan bernilai ekonomis tinggi, sangat strategis untuk meningkatkan UKM agar mampu memperluas pangsa pasar.

Dari survey dan identifikasi, permasalahan UKM dikelompokkan menjadi 3; yaitu (1) Sistem produksi dan pemanfaatan limbah belum optimal, (2) Sistem manajemen organisasi yang masih sederhana, laporan keuangan, modal kecil, dan pembukuan yang tidak baik, (3) dan pemasaran yang lemah dan bersifat lokal.

METODE

Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan klasifikasi dan identifikasi permasalahan skala prioritas yang dihadapi mitra UKM mebelair dan kusen kayu agar dapat berkembang, pada tabel 1.

Tabel 1:
 Permasalahan skala prioritas mitra dan solusi yang ditawarkan melalui PKM

No	Permasalahan skala prioritas Mitra	Metode Pendekatan/solusi yang akan Ditawarkan
1	Alat yang digunakan untuk finishing, (poles dan grinding masih manual) kotor, banyak limbah debu, dan lama	Membuat alat poles untuk mempercepat finishing dengan mempercepat poles dan finishing dengan membuat poles portable dengan penghisap debu otomatis, sehingga poles dapat lebih cepat dengan luas permukaan yang lebih besar
2	Banyak kayu limbah, dan kayu dengan cacat ringan dan potongan tidak dimanfaatkan	Melatih membuat Memanfaatkan limbah kayu dengan kerusakan akibat lobang, tidak lurus, terkena rayap, akan diubah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi, unik dengan <i>epoxy wood resin</i> . berpotensi menjadi brand produk yang khas diberi merk dagang menggunakan sablon plastik.
3	Belum memiliki pemotong yang cepat untuk pembentukan model kayu	Membuat pemotong yang cepat untuk pembentukan model epoxy wood, dengan circle cutting berpengatur putaran, yang akan mempercepat pemotongan limbah kayu untuk model panel wood, yang efisien dengan rangka kayu
4	Pengetahuan UKM pada permasalahan manajemen usaha, keuangan, dan metode pemasaran produk rendah mengakibatkan UKM sulit berkembang dan produk masih belum dipasarkan secara luas	a. Memberikan pelatihan dan diklat singkat kewirausahaan b. Pelatihan pembukuan keuangan, akuntansi sederhana pada UKM untuk menghitung cash flow dan keuntungan per bulan c. Ceramah dan pelatihan strategi pemasaran secara online (penjualan produk online). d. Penyuluhan perkembangan usaha dengan pelatihan dan studi banding ke UKM yang sudah sukses.

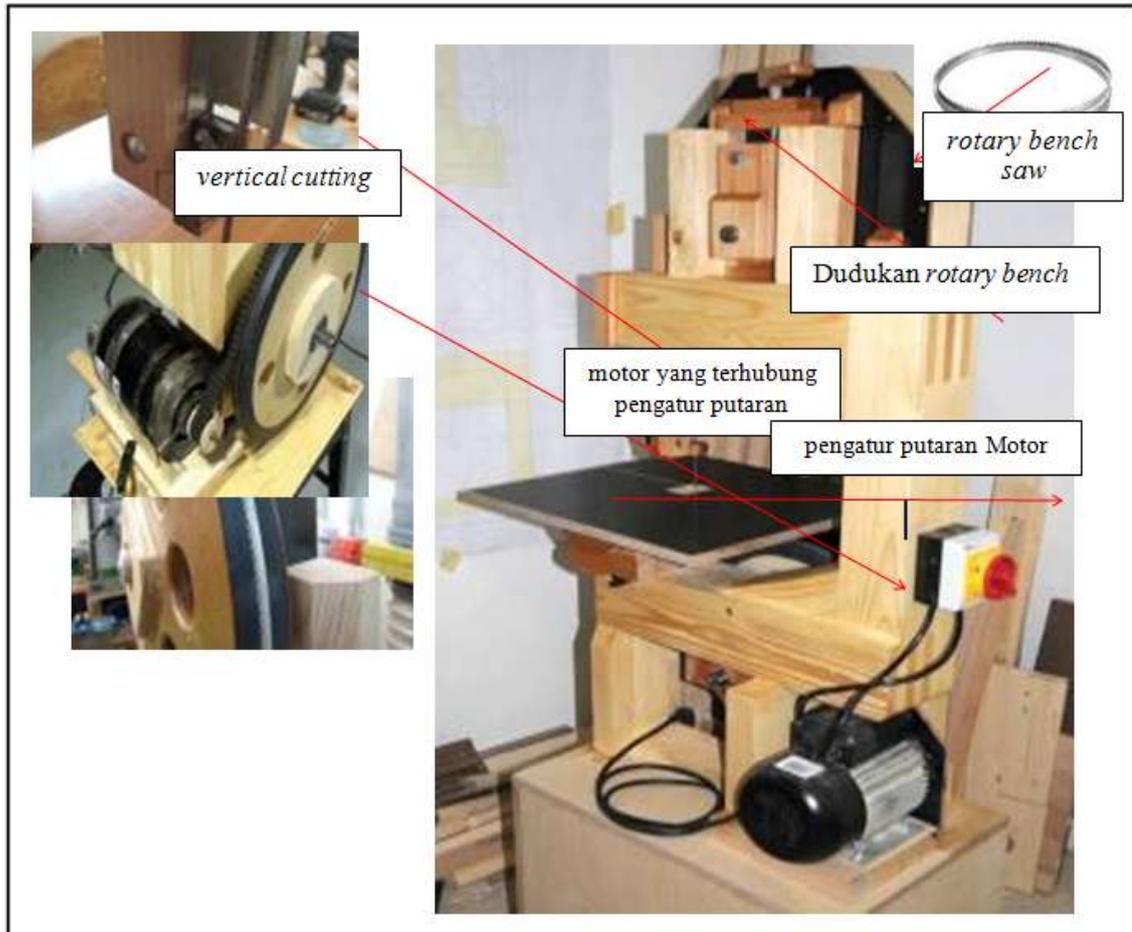
Sedangkan untuk produk hasil terdiri dari *wall wood panels*, *epoxy* dan *handy craft*. Jenis produk dan aplikasinya untuk kebutuhan rumah medium.

Teknologi tepat guna yang diaplikasikan

1. Mesin bensaw pembentuk profil

Gambar 1:

TTG *bensaw* berpengatur putaran dengan rangka kayu dan besi



Spesifikasi :

- Dimensi meja potong *rotary / vertical cutting* P x L x T : 85 x 75 x 145 cm.
- Meja dan rangka dibuat dari kayu mahoni dengan ketebalan variasi 5 cm, 10 cm dan 20 cm, pemotongan menggunakan gergaji tangan.
- Tinggi kaki meja 95 cm, agar ergonomis sesuai fungsi dan tidak menyebabkan kelelahan operator.
- Rotary bench saw menggunakan ukuran yang dapat diatur dari lebar 0,75, 1, dan 1,5 inch, sesuai beban potong dan berdasarkan ketelitian,
- Meja disambung menggunakan paku dan lem kayu sehingga sambungan lebih kuat dan kokoh.
- Pengaturan rotary disesuaikan dengan panjang pisau yang akan digunakan, diameterudukan menggunakan karet untuk mencegah terjadinya slip pada saat proses pembentukan dan pemotongan, diameter sisi pengatur 60 cm.
- Rangka dicat dan di lapis dengan cat semprot untuk ketahanan terhadap rayap

Gambar 2:
Pelatihan penggunaan TTG *bendsaw cutting*



a. **Teknologi Tepat Guna Mesin
*Circle Cutting***

Gambar 3:
TTG *circle cutting*



Spesifikasi :

- Dimensi *circle machined* dengan panjang bebas, lebar 100 cm lebar 70 cm, tinggi 70 cm
- Kerangka besi plat dan siku 80 x 60 x 60 ketebalan 1,5 mm. Kaki-kaki *hollow* 3x4 cm, penyambungan kerangka sebagian menggunakan las listrik SMAW dan diperkuat dengan baut.
- Motor penggerak rotary menggunakan motor daya 1 PK.

- Rangka di cat dan di lapis clear agar tahan lama, pelapisan dilakukan dengan metode *spray*.

Teknologi tepat guna yang diaplikasikan

1. Teknik *Epoxy Wood* dan *Wooden Wall*

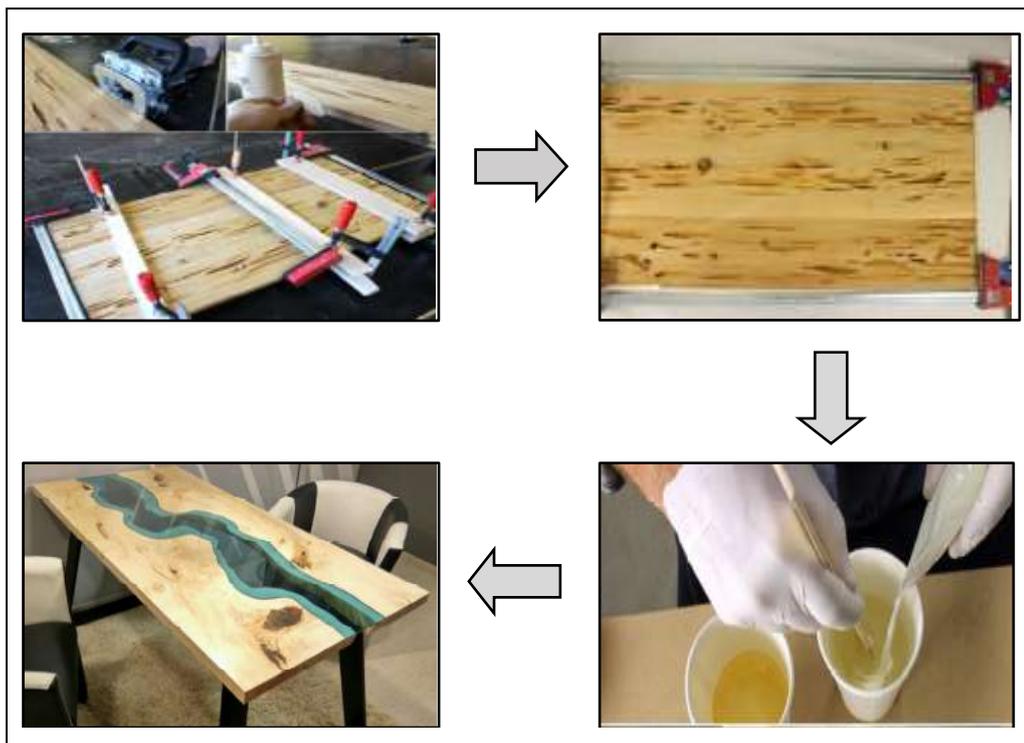
Bahan baku, berupa kayu dengan kondisi umum, dapat berupa kayu cacat, dan limbah, Kayu yang akan diepoxy dibersihkan, buang bagian yang kropos, dibentuk sesuai model mebelair yang

diinginkan. Untuk membuat sisi yang halus dan simetris, semua bahan baku di samakan modelnya, akan lebih maksimal di poles, sehingga tidak ada debu dan kotoran lain yang menempel. Bahan dibersihkan dengan udara compressor untuk meyakinkan bahwa tidak ada debu di permukaan kayu, bentuk secara simetris, Kayu yang sudah dibentuk disatukan dengan lem kayu sesuai dimensi yang akan dibuat, kemudian ditahan dengan planner jepit sampai ikatan lem kuat, kemudian dikedua sisi masing masing kayu diberi akrilik. Kayu yang sudah dibersihkan dan dimensi sudah diukur secara teliti disusun dan di asembling sesuai dengan

luas yang ingin dibuat, Membuat cetakan, dengan akrilik bening dengan tebal 1 mm, di bentuk sesuai bidang yang akan dibentuk, Perkuat cetakan dengan penahan untuk menjaga akurasi dan tidak terjadi pergeseran, Mencampur *epoxy resin* bening dengan hardener dengan perbandingan 1 kg *hardener* dapat digunakan untuk 1:20-1:40, Durcon Incorporated (2010), Pile, John F, (2006).

Lubang kayu dan permukaan yang mempunyai cacat lubang diisi dengan resin, dan atur kerataannya dengan menggunakan kuas, tahapan teknis dapat dilihat gambar 4.

Gambar 4:
Tahapan pembentukan *epoxy wood*



Langkah pembuatan *wall wood panels* dari limbah kayu

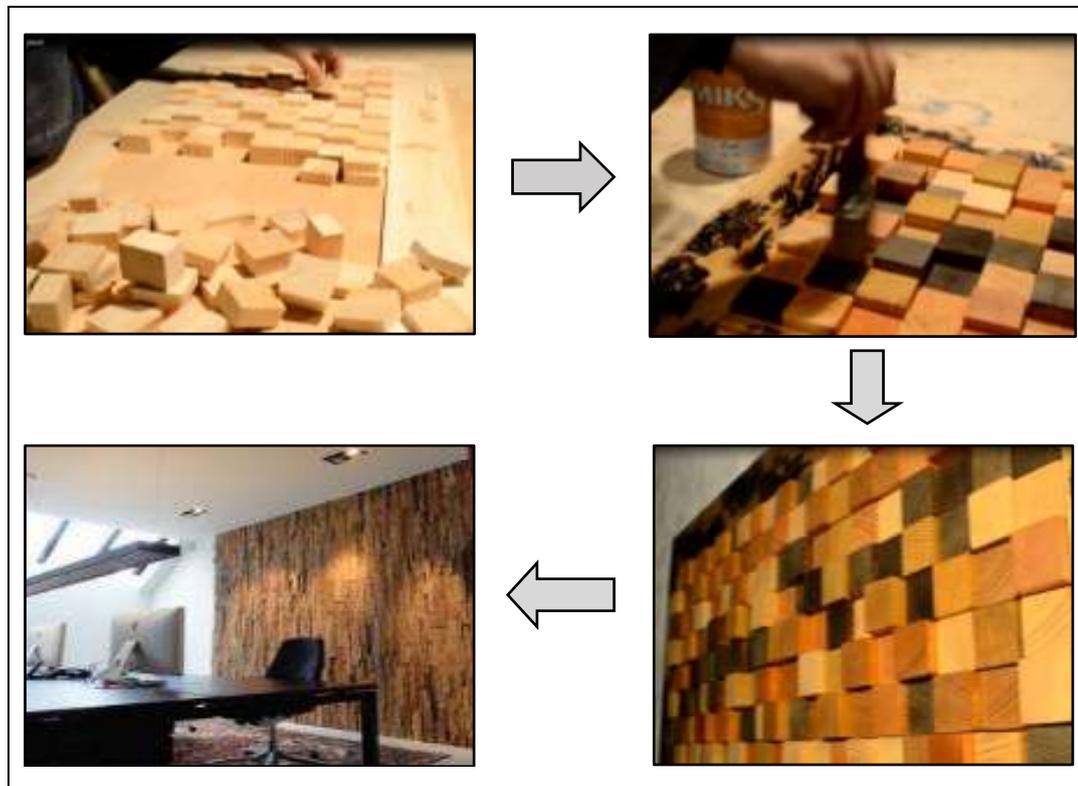
1. Kayu limbah dikumpulkan diutamakan yang berasal dari kayu yang keras, dikelompokkan sesuai ukuran dan tekstur warnan,
2. Kayu limbah di potong sesuai dengan model *wall panels wood* yang akan

dibuat, untuk desain 3 D, kontur kayu dibuat dengan ketebalan yang berbeda beda

3. Bentuk papan yang akan digunakan untuk model dinding kayu, cari kayu yang tahan rayap dan kuat, berilah dudukan untuk posisi penempatan di dinding,

4. Untuk kualitas yang baik, kayu di lapis dengan pernis, agar tekstur semakin jelas dan bersih, tahapan pembentukan seperti pada gambar 5

Gambar 5:
Tahapan pembuatan *wall panels wood* dari limbah kayu bernilai tinggi



Pemilihan bentuk dan pengelompokan berdasarkan model wooden wall disusun sesuai desain, kayu potongan di lem sesuai dengan posisi desain, posisi dan pemilihan warna yang tepat sangat dibutuhkan untuk hasil optimal, agar muncul gradasi dan efek 3 D. Berikutnya kayu dilapis dengan pernis untuk membuat tekstur warna lebih jelas. Pengetahuan dan metode *epoxy* perlu dijelaskan pada tukang secara detail untuk menghindari kesalahan dalam proses *epoxy*. Pelatihan teori *epoxy*, penggunaan TTG, ergonomi dijelaskan pada tukang, ditunjukkan gambar 6.

Gambar 6:
Pelatihan teori dan teknologi *epoxy* dan pallet

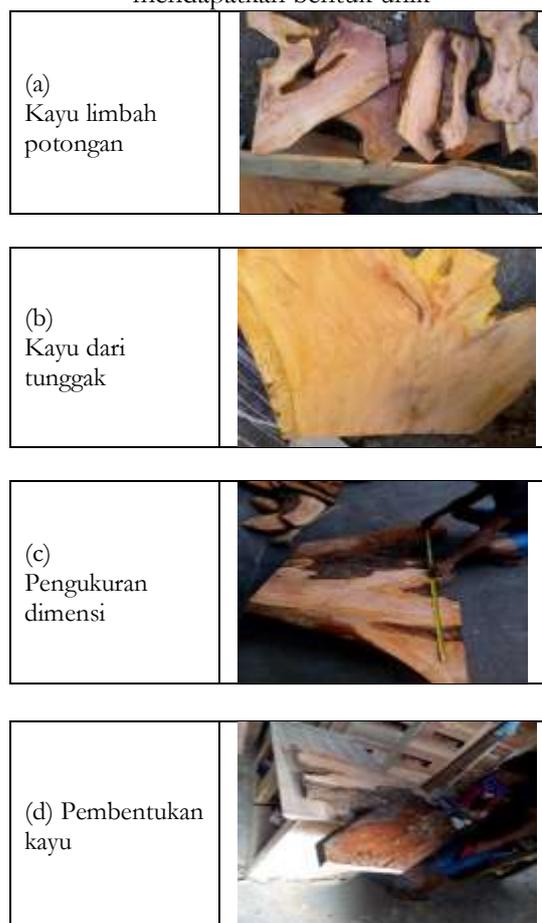


Pelatihan desain produk untuk pembuatan model unik dan untuk kebutuhan *handycraft*, bahan baku yang akan digunakan adalah kayu dengan kekerasan yang baik dan terutama adalah warna asli dengan serat kayu yang indah, pada pelatihan pertama digunakan kayu mahoni dari tunggak kayu yang dibelah untuk mendapatkan bahan dasar yang memadai untuk produk *epoxy*. Pada tahapan selanjutnya adalah proses pemodelan dan pembuatan cetakan *epoxy* dengan menggunakan kayu yang dibentuk sesuai dengan ukuran meja secara umum.

Mutu pelapisan kayu disesuaikan fungsinya untuk meningkatkan ketahanan dan usia kayu, Sutomo,(2001), seperti ditunjukkan gambar 7.

Gambar 7:

Penentuan dimensi dan model produk untuk mendapatkan bentuk unik



Produk *epoxy* yang akan dibuat dilakukan dengan memanfaatkan limbah kayu dengan kerusakan akibat lobang, tidak lurus, terkena rayap, akan diubah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi, unik dengan *epoxy wood resin*. Metode *epoxy* dan *wooden wall* merupakan metode baru untuk minimalisasi limbah, berpotensi menjadi brand produk yang khas. Untuk pembentukan kayu dibuat mesin TIG untuk membuat pemotong yang cepat untuk pembentukan model radius untuk profil kusen, dan bahan baku *epoxy wood*, dengan *circle cutting* berpengatur putaran, yang akan mempercepat pemotongan limbah kayu untuk model panel wood dan tahapan pembuatannya dengan menggunakan media video agar mudah dipahami oleh tukang kayu.

2. Solusi untuk mengatasi permasalahan di bidang mutu produk dan manajemen

Penguatan manajemen UKM dilakukan dengan pelatihan administrasi keuangan, dan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pengolahan kayu terutama pada proses pembelahan dan penghalusan (*poleshing*) menghasilkan debu halus yang berbahaya bagi kesehatan, untuk menghindari efek jangka panjang operator dan tukang kayu diarahkan untuk secara disiplin menggunakan masker. Pada tinjauan ergonomi, pada saat bekerja posisi badan berpengaruh terhadap terjadinya cedera, untuk menghindari hal tersebut tukang dibekali prinsip ergonomi dalam bekerja, Tarwaka,(2014). Mutu produk pada pengolahan sangat berpengaruh pada penetrasi pasar kerajinan kayu, Soetomo, (2001), berpotensi meningkatkan ekonomi lokal, Rahma, Hania (2012).

Khusus untuk modal usaha, dengan Memberi wawasan penggunaan modal melalui KUR sehingga mampu meningkatkan omset tanpa bergantung pada buyer langsung. Mengundang pihak terkait untuk menambah kepercayaan

perbankan kepada UKM, untuk dapat mengakses kredit bunga rendah sesuai kebijakan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penggunaan mesin *bend saw* mampu membentuk profil dan pembentukan kayu secara mudah sehingga produk dapat lebih cepat diselesaikan dibandingkan dengan dilakukan secara manual, reduksi waktu proses mencapai 50%.
2. Kekuatan ikatan dipengaruhi rasio pencampuran, untuk mendapatkan sifat ikatan yang baik dan ulet dibutuhkan Perbandingan resin dan hardener yang tepat yaitu 1: 30.
3. Pelatihan manajemen usaha, strategi pemasaran, dan pengetahuan mengakses modal usaha membuka wawasan baru dan memotivasi perkembangan usaha, meningkatkan produktifitas dan pendapatan kelompok.

Saran

1. UKM masih harus mau membuat produk alternatif berupa kerajinan kayu terutama dari kayu limbah sehingga akan meningkatkan nilai ekonomi.
2. Perlu dikembangkan model promosi produk dengan tampilan yang lebih menarik secara online agar mampu mendapat perhatian konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia yang telah memberikan dana untuk Pengabmas Program PKM Tahun Anggaran 2017-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Jateng. (2016). *Potensi Hutan Kayu di Purbalingga*. Provinsi Jawa Tengah dalam Angka.
- BPS Desa Sangkanayu. (2016).

- BPS Statistik Daerah Kecamatan Mrebet. (2016)
- Durcon Incorporated. (2010). *Epoxy Resin Handbook*. USA
- Pemerintah kabupaten Purbalingga. (2016). *Profil UKM Purbalingga*. Dinsosnakertrans Purbalingga.
- Pemerintah Kabupaten Purbalingga. (2017). *Tujuh Produk Unggulan Purbalingga*
- Pile, J. F. (2007). *Interior Design* (Third Edit). New York.
- Rahma, H. (2012), *Buku Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
- Soetomo. (2001). *Industri Pengolahan Kayu*. Jakarta: Majalah kehutanan Indonesia.
- Tarwaka. (2014). *Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di Tempat Kerja*. Jakarta: Harapan Press.

Pengembangan Nilai Karakter Taat melalui Aktivitas Belajar Siswa SMAN 1 Ampel Boyolali

Development of Obedient Character Value through Student Learning Activities at SMAN 1 Ampel Boyolali

Lisa Virdinarti Putra, Anni Malihatul Hawa, Ika Silfiana Arifatul Khoiriyah

Universitas Ngudi Waluyo (UNW), Kabupaten Semarang

lisavirdinartiputra@gmail.com, hawa.anni@gmail.com, ikasilfiana@gmail.com

Riwayat Artikel: Dikirim 10 September 2018; Diterima 28 November; Diterbitkan 30 November

Abstrak

Tujuan pengabdian ini yaitu melatih siswa untuk memiliki karakter dan etika yang baik, melatih siswa untuk dapat menaati setiap aturan yang diberikan kepadanya melalui aktivitas belajar. Lokasi pengabdian akan dilaksanakan di SMAN 1 Ampel Boyolali melalui Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah, presentasi *powerpoint*, *brainstorming*, dan dialog. Metode yang digunakan adalah dengan metode partisipatif artinya mitra binaan secara aktif dilibatkan dalam semua tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini menggunakan metode pelatihan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan materi pelatihan berupa ceramah, praktek, serta evaluasi yang disajikan secara bersamaan. Setelah kegiatan pelatihan, dilanjutkan kegiatan evaluasi sebagai bahan koreksi bagi penyelenggara kegiatan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan serupa terkait dengan kegiatan pendidikan pemakai. Hasil dari pelatihan ini diharapkan siswa memiliki karakter dan etika yang baik supaya siswa dapat menjadi manusia yang tidak hanya bertambah secara usia tetapi juga memiliki kepribadian yang baik seumur hidup.

Kata kunci: karakter taat, aktivitas belajar, siswa

Abstract

The purpose of this service is to train students to have good character and ethics, to train students to be able to obey every rule given to them through learning activities. The service location is implemented at SMAN 1 Ampel Boyolali through training conducted by lecture method, powerpoint presentation, brainstorming, and dialogue. The method used is a participatory method which means that foster partners are actively involved in all stages of this community service activity. This activity uses training methods that is carried out for 3 (three) days with training materials in the form of lectures, practices, and evaluations presented simultaneously. After the training activity, evaluation activities are continued as material for correction to the activity organizers. The results of this evaluation can later be used as consideration for the library to carry out similar activities related to user education activities. The results of this training are expected students to have good character and ethics so that students can become human beings who not only increase in age but also have a good personality for life.

Keywords: obedient character, learning activity, students

PENDAHULUAN

Karakter sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan belajar siswa. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap untuk mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang telah dibuat. Siswa Sekolah Menengah Atas adalah siswa siswi yang berusia sekitar 15 sampai dengan usia 17 tahun, merupakan

anak yang memasuki transisi perubahan masa anak anak menuju masa remaja yang mana biasanya mereka ingin menunjukkan jati dirinya dengan berperilaku meniru idola-idolanya. Cara pembentukan karakter yang baik bagi para siswa agar kelak bisa menjadi warga masyarakat yang berkepribadian baik, yang bersikap dan perilaku religious, toleran, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, tanggung jawab,

mandiri, demokratis, menghargai karya orang lain dan cinta damai adalah melalui penerapan disiplin tata tertib sekolah.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003). Lembaga pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter peserta didik dituntut untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaannya. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja di masyarakat mulai dari tawuran, pengeroyokan, pencurian, perampokan dan tindakan asusila. Fenomena tersebut telah pada taraf yang meresahkan. Oleh karena itu lembaga pendidikan sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik di samping keluarga dan masyarakat. Pentingnya pendidikan karakter pada usia dini yang diberikan oleh orang tua yang berbasis pada kearifan lokal dapat menumbuhkembangkan anak menjadi cerdas secara intelektual, spiritual, dan emosional yang lebih insani dan berkarakter. Golden age yaitu sebuah masa keemasan usia seorang anak dimana periode masa keemasan ini hanya datang satu kali saja seumur hidup yang tidak dapat diulang lagi. Karena pentingnya usia emas ini pemberian pengalaman dan pendidikan karakter pada seorang anak dari orang tua maupun guru di sekolah sangatlah penting karena dapat membekas yang sangat kuat dan tahan lama dalam pribadi anak. Dan pada tingkat perkembangan selanjutnya karakter anak berkembang kearah yang lebih baik dan

semakin kuat.

Menurut Vigotsky, aktivitas mental yang tinggi pada anak dapat terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Pembelajaran yang berkarakter akan menjadi pengalaman yang bermakna bagi anak jika ia dapat melakukan sesuatu (baik itu merubah atau mengikuti) atas lingkungannya. Anak merupakan aset yang menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu anak perlu dikondisikan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan dididik sebaik mungkin agar di masa depan dapat menjadi generasi penerus yang berkarakter serta berkepribadian baik. Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama dikenal oleh anak. Karenanya keluarga sering dikatakan sebagai primary group. Alasannya, institusi terkecil dalam masyarakat ini telah mempengaruhi perkembangan individu anggota-anggotanya, termasuk sang anak. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadiannya di masyarakat. Oleh karena itu tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas sebagai penerus keturunan saja. Mengingat banyak hal-hal mengenai kepribadian seseorang yang dapat dirunut dari keluarga. Tingkat pendidikan orang tua secara tidak langsung akan mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula, yang berarti pendidik atau orang tua mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak-anak dengan mengesampingkan keinginan dan kesenangan sendiri. diperlihatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni latar belakang keluarga yang berbeda-beda yang secara tidak langsung berdampak pada

sikap atau karakter mereka, baik itu latar belakang dari segi pekerjaan, pendidikan.

METODE

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah siswa kelas XII SMA NEGERI 1 Ampel. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode partisipatif artinya

mitra binaan secara aktif dilibatkan semua dalam semua tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Berangkat dari permasalahan yang muncul disusun berbagai alternatif untuk memecahkan masalah. Dari berbagai alternatif, dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan.

Tabel 1:
Tahapan-tahapan Kegiatan

No	Tahapan	Kegiatan
1	Tahap I	Persiapan : perizinan, persiapan bahan dan materi
2	Tahap II	Memberikan materi pelatihan
3	Tahap III	Praktek strategi pencarian informasi
4	Tahap IV	Evaluasi dan tindaklanjut
5	Tahap V	Pelaporan hasil dan publikasi

Tabel 2:
Luaran

No	Jenis Luaran	Tahun Capaian	Status Capaian
Luaran Wajib			
1	Peningkatan aktivitas belajar siswa melalui pengembangan karakter taat	2018	Ada peningkatan
2	Artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Nasional	2018	<i>Accepted</i>

Langkah-langkah

Pada tahap awal pengabdian ini dengan melakukan izin pada kepala sekolah SMAN 1 Boyolali, mempersiapkan materi mengenai pengembangan nilai karakter taat berupa pre-test, post-test, materi yang akan disampaikan kepada siswa mengenai karakter taat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan metode pelatihan, monitoring dan evaluasi tentang karakter taat di SMAN 1 Ampel. Kegiatan ini dilakukan dengan cara tatap muka selama empat kali pertemuan dengan durasi 2 jam/pertemuan. Siswa mendengarkan pelatihan mengenai karakter taat dan memberikan pertanyaan kepada siswa terkait ketaatan yang dilakukan. Evaluasi dari kegiatan ini menekankan pada proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan

pada saat siswa mendengarkan ceramah. Melalui pertanyaan dan keseriusan siswa akan diperoleh bagaimana antusiasme dan kebermanfaatan kegiatan ini. Akan dievaluasi juga tentang pengetahuan siswa tentang pengalaman yang dilakukan siswa saat aktivitas belajar.

Kegiatan ini menggunakan metode pelatihan yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan materi pelatihan berupa pre-test, pelatihan materi (ceramah), post-test, serta evaluasi yang disajikan secara bersamaan. Setelah kegiatan pelatihan, akan dilanjutkan kegiatan evaluasi sebagai bahan koreksi bagi penyelenggara kegiatan. Hasil evaluasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan serupa terkait

dengan kegiatan pendidikan pemakai. Adapun penjabaran langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Analisis situasi dengan menyebar survey karakter taat kepada siswa.
- b. Persiapan pengabdian masyarakat meliputi perizinan, persiapan bahan dan materi.
- c. Pelatihan ini dilakukan dengan cara presentasi materi terkait dengan pengembangan nilai karakter taat.
- d. Praktek strategi karakter taat melalui aktivitas belajar siswa.
- e. Monitoring dan evaluasi.
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan publikasi pengabdian masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi empat kegiatan yaitu :

- a. Memberikan pree-test kepada siswa mengenai karakter taat melalui angket.
- b. Pelatihan melalui presentasi menggunakan powepoint untuk memberikan materi berupa karakter taat pada siswa untuk meningkatkan aktivitas belajar.
- c. Memberikan post-test kepada siswa setelah diberikan pelatihan berupa karakter taat untuk meningkatkan aktivitas belajar melalui angket.
- d. Monitoring dan evaluasi yaitu kegiatan yang mem-follow up dari kegiatan yang pernah dilakukan sehingga pelaksana menemukan temuan-temuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/perbaikan ketika melaksanakan kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama yaitu membagikan angket kondisi awal siswa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 09.00-11.00. dan pelatihan pada hari Kamis 29 Maret 2018. Peserta kegiatan berjumlah 31 orang. Kegiatan ini dilakukan oleh 3 orang tim pelaksana dengan pokok bahasan yang disampaikan adalah mengenai pengembangan karakter taat untuk

meningkatkan aktivitas belajar (tingkah laku, kedisiplinan, cara belajar, cara menghadapi permasalahan dalam hal belajar yang dirasa kurang kondusif)

Kegiatan ini diawali dengan presentasi berupa ceramah tentang apa itu karakter taat. Narasumber memberikan masukan mengenai cara belajar siswa SMA dilihat dari cara berperilakunya. Contoh halnya adalah kejujuran dalam setiap kegiatan belajar di lingkungan sekolah. Dengan membiasakan diri berlaku jujur, maka siswa akan terhindar dari tindakan kurang terpuji. Selain itu juga diberikan paparan mengenai apa itu yang dimaksud dengan karakter taat. Siswa dituntut untuk belajar melakukan apa saja sesuai dengan hati nurani yang baik, belajar untuk disiplin dalam hal apa saja. Selain itu, pembicara kedua juga mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik. Pada sesi tanya jawab, sebagian besar siswa antusias menjawab pertanyaan yang diberikan.

Kegiatan kedua yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 10.30-12.30. Peserta kegiatan berjumlah 31 orang artinya bahwa semua peserta yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian hadir 100%. Kegiatan kedua ini adalah pelatihan untuk berperilaku taat. Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dan latihan. Dengan cara ini, siswa dapat langsung melakukan contoh tindakan yang dijelaskan oleh pelatih. Dalam pelatihan, siswa akan didampingi oleh pelatih beserta tim sekaligus dapat mengemukakan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang berlangsung.

Kegiatan pelatihan ini berakhir siswa mengerti tindakan apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan hati nurani yaitu tindakan yang baik.

Kegiatan ketiga adalah monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan pada hari Selasa 5 Mei 2018. Kegiatan ini mem-follow up dari kedua kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pelatihan yang dilakukan secara umum telah berlangsung baik dan lancar. Tingkat penyerapan siswa

terhadap pemaparan yang diberikan oleh kedua pelaksana cukup baik dilihat dari antusiasme peserta dalam bertanya terkait materi yang diberikan oleh pelaksana. Kasus-kasus yang dikemukakan oleh pelaksana ditanggapi dengan menanyakan kembali hal-hal yang terkait. Melalui sesi tanya jawab, panitia dapat melakukan pengukuran (assessment) terhadap kegiatan ini.

Mengingat pelatihan ini disambut dengan antusias oleh siswa, pelatihan seperti ini dapat dijadikan kegiatan rutin di sekolah sehingga siswa termotivasi untuk hidup taat.

Dengan demikian diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Skim Ipteks bagi Masyarakat (IbM) tahun anggaran 2018 ini bermanfaat dalam menjadikan perilaku siswa untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan lebih baik selain itu juga dapat meningkatkan tingkah laku yang positif, kedisiplinan yang baik, cara belajar positif, cara menghadapi permasalahan dalam hal belajar yang dirasa kurang kondusif. Pemberian pengabdian diharapkan menjadi proses penyaluran Ilmu Pengetahuan kepada masyarakat yang lebih bermanfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan pengembangan karakter taat di SMAN 1 Ampel meningkatkan pemahaman dalam menanamkan sikap yang baik saat di lingkungan sekolah maupun bermasyarakat.
2. Melatih siswa untuk memiliki karakter dan etika yang baik, melatih siswa untuk dapat menaati setiap aturan yang diberikan kepadanya melalui aktivitas belajar.
3. Faktor penghambat yang diperlihatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni latar belakang keluarga yang berbeda-beda yang secara tidak langsung

berdampak pada sikap atau karakter mereka, baik itu latar belakang dari segi pekerjaan, pendidikan.

4. Faktor pendukung guru dalam menerapkan kegiatan pengembangan karakter taat ini sangat menolong peserta didik pada umumnya. Walaupun tidak banyak menolong tetapi sangat memberi dampak perubahan pada siswa khususnya pada aktivitas belajar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuliati, L. (2014). *Pembentukan Karakter Anak*. Jakarta: Agate
- Poerwandari. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Al-Fabeta.
- Rasyid, H. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: Kopma STAIN.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Slamento. (2005). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Renika Cipta.

Pendampingan Penanggulangan dan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

The Assistance of Countermeasures and Settlements of Children Adoption Case and the Domestic Violence

Nanik Prasetyoningsih, Tanto Lailam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
nprasyoningsih@gmail.com, tanto.tatanegara@gmail.com

Riwayat Artikel: Dikirim 20 September 2018; Diterima 28 November; Diterbitkan 30 November

Abstrak

Masyarakat Dusun Kemiri masih sangat perlu disosialisasi mengenai tatacara adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Dusun Kemiri mengenai adopsi anak dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut: (1) proses adopsi anak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, (2) kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pentingnya bukti formal adopsi anak; (3) ketidakjelasan status anak adopsi menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum teratasi dan terselesaikan. Metode pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi tata cara adopsi anak sesuai hukum Indonesia; (2) melakukan sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; (3) melakukan Pelatihan dan Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga; dan melakukan pendampingan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Simpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah semua program kegiatan yang direncanakan telah terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal dan rancangan yang telah ditentukan. Permasalahan adopsi anak sudah terpecahkan melalui beberapa tahap pengabdian. Demikian halnya dengan penanganan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara adopsi anak dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman hukum dan kesadaran hukum mulai meningkat dan terjaga, karena senantiasa ada Kader Perlindungan Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga yang aktif melakukan sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran sosial bagi masyarakat.

Kata kunci: adopsi anak; kekerasan dalam rumah tangga; perlindungan hukum

Abstract

The Kemiri Village community still needs to socialize children's adoption procedures by the laws and the settlement of a domestic violence. The community service is carried out with the intention to provide accurate information to improve public understanding of the villagers regarding the adoption of children and handling the domestic violence. The problems found are as follows: the process of adoption of children based on the prevailing habits in the community, public awareness did not aware the importance of legalization of the children adoption; the unclear status of adopted children causes domestic violence, and the domestic violence cases are still not resolved. The implementation methods of service are as follows: disseminating procedures for adoption of children according to Indonesian law; socializing the prevention of domestic violence; training and Establishment of Child Protective Cadres and Task Force on Domestic Violence; and assisting in the completion of cases of child adoption and cases of domestic violence. The conclusion of the implementation of the community service is that all planned activities have been realized following the predetermined schedule and design. The problem of adoption of children has been solved through several stages of activities, either the handling of domestic violence. This service has provided a comprehensive understanding of the procedures for adoption of children and protection of domestic violence. Legal understanding and legal awareness begin to increase and be maintained because there is always a Child Protection Cadre and Anti-violence Task Force in the household that actively conducts socialization and social awareness efforts.

Keywords: the children adoption, domestic violence, the protection of law

PENDAHULUAN

Dusun Kemiri terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya 8 km dari puncak Gunung Merapi dari sisi Selatan. Dusun Kemiri merupakan bagian dari Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Kemiri terletak di zona utara topografi Sleman, yang merupakan wilayah kaki Gunung Merapi. Daerah ini memiliki ketinggian kurang lebih 950 m di atas permukaan laut. Lokasi Kantor Kelurahan adalah di balai Desa Purwobinangun. Dari data yang diperoleh berdasarkan observasi, Dusun Kemiri terdiri dari 6 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 dan RT 06. Jumlah warga di Dusun Kemiri ada 200 kk.

Potensi Dusun Kemiri dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek fisik, kondisi sosial budaya, bidang keagamaan, Pendidikan, kondisi kelembagaan, dan kesehatan.

Dusun Kemiri dilihat dari aspek fisik sudah memiliki jalan yang sudah beraspal halus, walaupun berada di kaki Gunung Merapi. Dusun Kemiri memiliki fasilitas umum berupa dua masjid dan sebuah sekolah PAUD. Di dusun ini juga sudah ada air bersih yang cukup tersedia untuk kebutuhan sehari-hari, jaringan telepon selular serta warung makan. Kondisi fasilitas umum di Dusun Kemiri tergolong baik dan masih sangat layak tetapi masih kurang adanya penanda tempat. Jalan dusun di tiap RT sudah seluruhnya di aspal. Penerangan di jalan-jalan dusun juga dalam kondisi baik.

Kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Kemiri sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani salak, peternak sapi perah dan juga penambang pasir. Organisasi kemasyarakatan di Dusun Kemiri cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari organisasi yang terbentuk seperti PKK, Senam Lansia, Posyandu, Karang taruna, dll. Di Dusun ini juga ada kelompok usaha yang mengolah susu sapi dan juga buah salak.

Kegiatan keagamaan di Dusun Kemiri berjalan dengan baik. Mayoritas masyarakat di Dusun Kemiri beragama Islam dan kegiatan keagamaan seperti TPA yang diadakan rutin seminggu 2 kali dan pengajian ibu-ibu secara rutin diadakan tiap minggunya.

Tingkat pendidikan warga Dusun Kemiri sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah warga yang lulus pendidikan menengah dan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pendidikan untuk anak usia dini juga diadakan di Dusun Kemiri. Terdapat sebuah PAUD yang berada di Dusun Kemiri dan merupakan tempat belajar anak usia dini di wilayah tersebut.

Kondisi Kelembagaan Dusun Kemiri dikepalai oleh seorang dukuh. Dusun Kemiri terdiri 6 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 dan RT 06. Adapun lembaga lain yang ada di Dusun Kemiri yaitu Karang Taruna, Kelompok Tani dan Posyandu.

Kesehatan masyarakat Dusun Kemiri masih menggunakan fasilitas dari desa. Kegiatan posyandu yang berlangsung setiap setiap bulan di dusun tersebut.

Terkait dengan tema pengabdian masyarakat, ternyata di masyarakat Dusun Kemiri masih sangat perlu disosialisasi mengenai tatacara adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Dusun Kemiri mengenai adopsi anak dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam tabel di bawah ini ditemukan beberapa permasalahan dan usulan penyelesaian permasalahan. Dalam setiap penyelesaian permasalahan, masyarakat akan selalu dilibatkan agar supaya lebih mengetahui permasalahan yang ada dan cara penanganannya. Pelibatan partisipatoris warga masyarakat

merupakan cara pemberdayaan masyarakat agar penanganan perkara adopsi anak dan kekerasan dalam rumah tangga dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel 1:
 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan	Solusi yang ditawarkan
1. Proses adopsi anak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat	Pendampingan Pemerintah Dusun untuk melakukan sosialisasi prosedur adopsi anak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2. Kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pentingnya bukti formal adopsi anak	Motivasi dan sosialisasi mengenai pentingnya administrasi adopsi anak bagi kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat
3. Ketidakjelasan status anak adopsi menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa hak perlindungan bagi anak adalah tanggungjawab semua orang, bukan hanya keluarga anak
4. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum sesuai dengan prosedur yang berlaku	Pendampingan pemerintah dusun dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

Metode yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai tata acara adopsi anak dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan tema yang dimaksud. Disamping juga pendampingan dalam penanganan perkara, maka untuk kesinambungan dan keberlangsungan program, maka pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti KDRT.

Lembaga yang menjadi mitra Program KKN-PPM, adalah Pemerintah Dusun Kemiri. Dalam pelaksanaan Program KKN-PPM, Kepala Dusun Kemiri bersedia untuk mengeluarkan dana

pendamping sebesar Rp. 1.000.00,00 (satu juta rupiah), dalam bentuk in cash dan in kind. Kondisi Dusun Kemiri dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1:
 Denah Wilayah Padukuhan Kemiri



Sumber: Dokumen Dusun Kemiri.

METODE

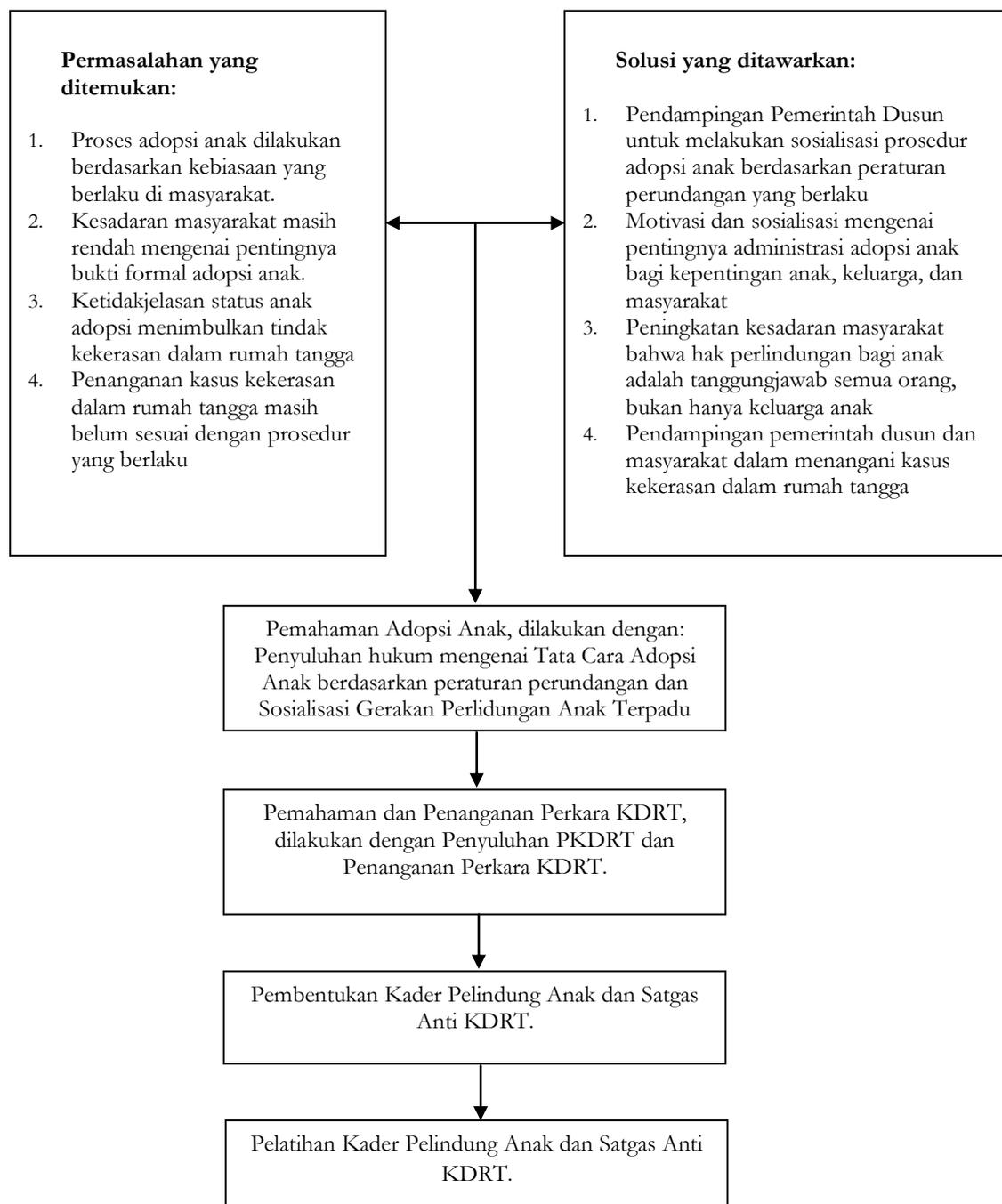
Bagian ini ditulis dalam bahasa Metode yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai tata acara adopsi anak dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan tema yang dimaksud. Disamping juga pendampingan dalam penanganan perkara, maka untuk kesinambungan dan keberlangsungan program, maka pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti KDRT. Metode pelaksanaan program dapat dilihat pada Gambar 2.

Uraian metode pelaksanaannya sbb:

1. Sosialisasi tata cara adopsi anak sesuai hukum Indonesia
 - a. Pembuatan materi sosialisasi (brosur) tentang tata cara adopsi anak
 - b. Penyebaran brosur tata cara adopsi anak
 - c. Sosialisasi tata cara adopsi anak dilaksanakan

- d. Sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 2. Pembuatan materi sosialisasi
 3. Sosialisasi penanggulangan KDRT dilaksanakan
 4. Pelatihan dan Pembentukan Kader
5. Pendampingan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus KDRT.

Diagram 1:
Konsep Kegiatan KKN-PPM



HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Tata Cara Adopsi Sesuai Hukum Indonesia

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Kemiri bahwasanya ada beberapa warga yang mengadopsi anak tanpa prosedur yang tepat sehingga dikhawatirkan dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tim perlu dilakukan kegiatan sosialisasi tatacara adopsi anak yang sesuai dengan hukum-hukum yang ada dan berlaku. Permasalahan hukum yang akan terjadi pada anak adopsi yang tidak melalui prosedur resmi negara, antara lain: (1) anak adopsi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, (2) anak adopsi akan mengalami kesulitan ketika akan menikah, terutama terjadi pada anak adopsi perempuan, mengingat ada ketentuan perwalian yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan menurut Hukum Islam; dan (3) masalah waris dan hak waris anak adopsi akan terjadi apabila dalam keluarga tidak secara tegas menetapkan pembagian waris mengacu pada hukum apa.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Indonesia, adopsi anak harus dilakukan secara legal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Undang-undang ini bertujuan menjamin perlindungan hak-hak anak yang diadopsi. Persyaratan pengangkatan anak menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 meliputi persyaratan anak yang akan diangkat dan persyaratan calon orang tua angkat.

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: (i) belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, (ii) berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuh anak, dan

(iii) memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah dalam situasi darurat, berasal dari kelompok minoritas/terisolasi, tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, diperdagangkan, korban perlakuan salah dan penelantaran.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (i) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; (ii) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan (iii) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Anak dapat diadopsi dari panti sosial atau panti asuhan yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Sosial dalam bidang pengangkatan anak.

Syarat calon orang tua angkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, calon orangtua angkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Sehat jasmani dan rohani, (2) berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun; (3) memiliki agama yang sama dengan agama calon anak angkat. Jika asal usul anak tidak diketahui, maka agama disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat; (4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; (5) berstatus menikah paling singkat 5 tahun; (6) tidak merupakan pasangan sejenis; (7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; (8) mampu secara ekonomi dan sosial, (9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak; (10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; (11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; (12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan (13) memperoleh izin menteri dan/atau kepala

instansi sosial.

Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 kali dengan jarak waktu paling singkat 2 tahun. Pengangkatan anak kembar dapat dilakukan sekaligus. Katerogori orang tua angkat yang dapat melakukan pengangkatan anaka ada dua, ayitu orang tua lengkap suami dan istri warga negara Indonesia; atau suami warga negara Indonesia dan istri warga negara asing.

Jenis Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) ada empat yaitu: (1) pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (Domestic Adoption); (2) pengangkatan Anak secara langsung (Private Adoption); (3) pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent); dan (4) pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Pengangkatan anak harus disampaikan kepada Dinas Sosial di Pemerintah Daerah, dan harus mendapatkan ijin Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial baik di pemda Propinsi atua Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, pengangkatan anak harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Selain Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan akan memberikan penetapan apabila calon orang tua angkat dapat meyakinkan bahwa calon orang tua secara sosial dan ekonomis, moril maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

Terdapat ketentuan yang lain dalam hal pengangkatan anak, sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 No. 129 yang mengatur bahwa pengangkatan anak yang

hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris. Staatblaad 1917 No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang, selain memungkinkan pengangkatan anak oleh seseorang yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatblaad 1917 No. 129 hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

Di Indonesia perihal pewarisan untuk anak adopsi ada tiga hukum yang berlaku, yakni (1) hukum adat; (2) hukum barat; dan (3) hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki ketentuan yang berbeda dalam hal pewarisan anak. Menurut Hukum Adat, penentuan waris bagi anak angkat menurut hukum adat Jawa (menganut sistem parental) menentukan bahwa pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Anak adopsi selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. (M. Buddiarto, 1991).

Sedangkan pewarisan anak adopsi menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak adopsi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, 1991).

Menurut Hukum Barat sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917

No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Sosialisasi ini sangat penting bagi warga Dusun Kemiri, sehingga di kemudian hari dapat memahami tatacara adopsi anak, dan diharapkan ke depan warga Dusun Kemiri melakukan proses adopsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Indonesia, adopsi anak harus dilakukan secara legal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas ditetapkan dengan tujuan menjamin perlindungan hak – hak anak yang diadopsi.

Faktor pendukung dari program ini adalah informasi yang didapat dari kepala dukuh serta beberapa informasi yang didapat dari warga mengenai adopsi anak yang pernah terjadi di Dusun Kemiri. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan program ini adalah warga yang mungkin sensitif dengan materi yang akan disampaikan sehingga tidak banyak warga yang datang dalam sosialisasi tersebut dan tidak meratanya informasi kepada semua warga tentang tata cara adopsi anak yang baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Materi sosialisasi diberikan dalam bentuk leaflet seperti terlihat pada Gambar 3. Dokumen kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 3:
Brosur Tata Cara Adopsi Anak



Gambar 4:
Sosialisasi Tatacara Adopsi Anak



Sumber: Dokumen pribadi

Sosialisasi penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kegiatan dilakukan dilandasi fakta bahwasanya ada beberapa warga Dusun Kemiri yang menjadi korban dan pelaku KDRT. Kecenderungan untuk menjadi korban dan pelaku KDRT menjadi hal sangat mengkhawatirkan, dan perlu segera diantisipasi dan ditangani, mengingat sehingga dikhawatirkan dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga perlu dilakukan kegiatan sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut pemaparan Kepala Dusun Kemiri, pemahaman warga masyarakat Dusun Kemiri akan KDRT sangat minim, mengingat tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah dan warga masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah dan walaupun terjadi kekerasan fisik yang berat makan warga masyarakat selain keluarga tidak berhak untuk terlibat menyelesaikannya, dengan pemahaman yang seperti ini, maka seringkali kasus KDRT yang terjadi dibiarkan begitu saja, tanpa ada upaya penyelesaian baik dari pihak keluarga maupun masyarakat.

Sebenarnya apabila dikaji dari definisi kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT tidak hanya perbuatan yang telah dilakukan melainkan juga perbuatan permulaan seperti ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kebebasan seseorang sudah dapat dikatakan KDRT. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan pasal tersebut maka KDRT yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dapat dilakukan dengan cara: (i) kekerasan fisik; (ii) kekerasan psikis; (iii) kekerasan seksual; atau (iv) penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini merupakan gambaran kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga dan menjadi fenomena umum di tengah masyarakat.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 menetapkan bahwa korban berhak mendapatkan: (i) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (ii) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (iii) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (iv) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (v) pelayanan bimbingan rohani.

Ketentuan tersebut diatas menegaskan kembali bahawa KDRT bukan hanya merupakan domain privat, dalam arti hanya menjadi tanggung jawan keluarga,

melainkan juga domain publik yakni menjadi tanggung jawab masyarakat untuk mencegah dan melindungi serta mendampingi korban. Korban KDRT memerlukan upaya pemulihan yang harus dilakukan oleh pihak di luar keluarga. Kewajiban Masyarakat dalam hal penanganan kasus KDRT adalah bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: (i) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (ii) memberikan perlindungan kepada korban; (iii) memberikan pertolongan darurat; dan (iv) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus dapat melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Sementara pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban. Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan

pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Selain terkandung kewajiban masyarakat untuk mencegah terjadinya KDRT, dan melindungi setiap korban KDRT, UU No. 23 Tahun 2004 juga menentukan adanya kewajiban pemerintah, misalnya untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (i) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; (ii) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; (iii) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan (iv) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Jenis-jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, antara lain dapat dilakukan dengan cara: (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikis; (3) kekerasan seksual; atau (4) penelantaran rumah tangga. UU No. 23 tahun 2004 menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sementara yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang

dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut.

Kekerasan Seksual menurut Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Kekerasan meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual (pelecehan seksual), maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan. Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran Rumah Tangga menurut Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 antara lain: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomidengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami (Robby Yahya Rumlatur, 2016).

Kekerasan dalam Rumah Tangga

(KDRT), jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah: (i) Kekerasan Terbuka (overt) berupa kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh. (ii) Kekerasan Tertutup (covert) berupa kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri. (iii) Kekerasan Seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban. (iv) Kekerasan Finansial dapat dilakukan dalam bentuk eksploitasi, manipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuannya (“4 Jenis Kekerasan yang Termasuk KDRT – Kompas.com”, 2014).

KDRT dikategorikan dalam 2 delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum (“Pengertian Delik Biasa dan Delik Aduan, 2013). Delik biasa atau kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi. Misalnya penipuan. Meskipun korban sudah

memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang hanya dapat diproses secara hukum apabila orang yang dirugikan melakukan pengaduan kepada yang berwajib, tanpa pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan karena delik/perbuatan tersebut tidak dapat diproses. Dalam delik aduan suatu aduan dapat ditarik atau dicabut apabila ada perdamaian ataupun kesepakatan antara sipembuat delik dan korban yang dirugikan (Hukum online, 2013).

Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini warga Dusun Kemiri dapat lebih menjaga keluarganya dan terhindar dari KDRT. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwasannya kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Setiap anggota keluarga memiliki potensi untuk menjadi pelaku ataupun korban, misalnya suami, isteri, dan anak. Akan tetapi UU No. 23 Tahun 2004 memperluas makna anggota keluarga dengan menyatakan bahwa anggota keluarga inti yakni suami, isteri, dan anak, akantetapi juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah

tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kesadaran hukum masyarakat bahwa KDRT adalah bukan masalah domestik keluarga, melainkan juga masalah sosial atau masyarakat. Anggota masyarakat dapat melaporkan dan mencegah terjadinya KDRT dalam sebuah keluarga. Korban, dalam arti orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, secara hukum berhak mendapatkan: (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani.

Faktor pendukung dari program ini adalah informasi yang didapat dari kepala dukuh serta beberapa informasi yang didapat dari warga mengenai KDRT yang pernah terjadi di Dusun Kemiri. Faktor yang menghambat pelaksanaan program ini adalah warga yang mungkin sensitif dengan materi yang akan disampaikan sehingga tidak banyak warga yang datang dalam sosialisasi tersebut dan tidak meratanya informasi kepada semua warga. Dokumen penyuluhan hukum KDRT dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5:
Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah
Tangga



Sumber: dokumen pribadi

Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti KDRT

Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti KDRT dilakukan sebagai upaya memenuhi amanat UU No. 23 Tahun 2004 dalam hal melaksanakan kewajiban masyarakat untuk mencegah terjadinya KDRT, dan melindungi setiap korban KDRT. Sebagaimana diketahui bahwa korban KDRT memerlukan upaya pemulihan, maka sudah menjadi tugas bagi masyarakat pada umumnya, dan Satgas Anti KDRT khususnya untuk melakukan penanganan terhadap korban KDRT sesegera mungkin apabila mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT. Penanganan yang dilakukan oleh Satgas Anti KDRT antara mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; dan memberikan pertolongan darurat. Selanjutnya Satgas Anti KDRT dapat membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pembentukan Kader ini dibentuk selain untuk melakukan penanganan korban KDRT dan mencegah terjadinya kasus KDRT, juga dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan perkembangan yang terjadi di masalah KDRT di Dusun Kemiri. Kader telah terbentuk dengan beranggotakan 10 wanita kader dusun dibawah pimpinan Ibu Dusun Kemiri. Tugas kader antara lain; (1) melakukan sosialisasi tentang perlindungan

anak dan KDRT; (2) memantau perkembangan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak dan KDRT; (3) melakukan pendampingan bagi korban KDRT; (4) melakukan penanganan awal korban KDRT; dan (5) menjaga kerahasiaan korban KDRT. Dokumen pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti KDRT dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6:
Pembentukan Kader Pelindung Anak dan
Satgas KDRT



Sumber: Dokumen pribadi

Pendampingan Tim Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus KDRT

Pendampingan terhadap Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti KDRT dilakukan untuk memantapkan peran mereka di masyarakat, serta memberikan contoh penanganan awal kasus KDRT beserta tindak lanjutnya. Pendampingan dilakukan selama dua minggu pertama, dengan melihat perkembangan penanganan kasus KDRT dan Adopsi Anak.

Kasus Adopsi Anak di Dusun Kemiri terjadi di 5 keluarga dengan berbagai sebab dan alasan yang berbeda untuk melakukan adopsi. Perbedaan alasan inilah yang sebenarnya memicu terjadinya kasus kekerasan terhadap anak adopsi, baik pelakunya dari internal keluarga orang tua angkat maupun dari masyarakat. Anak adopsi yang tidak diketahui dengan jelas siapa ayah kandungnya, sangat rentan terhadap kekerasan psikis yang dilakukan oleh masyarakat. Kader melakukan pendampingan dan perlindungan yang

cukup inten terhadap anak tersebut.

Kasus KDRT ditemukan 60 kasus. Kader telah berhasil melakukan pendekatan dan penanganan terhadap 10 kasus yang terjadi pada 10 keluarga. Permasalahan yang dihadapi oleh Kader dalam melakukan penanganan kasus KDRT adalah masyarakat menganggap bahwa KDRT adalah masalah internal keluarga, sehingga tidak diperlukan orang di luar anggota keluarga untuk mengetahui atau bahkan turut menyelesaikannya. Hal ini menyebabkan masih banyak kasus KDRT yang berlum tertangani secara baik, karena pihak keluarga sangat tertutup dan tidak mengizinkan pihak luar untuk melakukan intervensi. Akantetapi Kader tetap melaksanakan tugasnya dan terus melakukan pendekatan terhadap keluarga-keluarga tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Kemiri, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman adalah semua program kegiatan yang direncanakan telah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal dan rancangan yang telah ditentukan. Permasalahan adopsi anak sudah terpecahkan melalui beberapa tahap pengabdian. Demikian halnya dengan penanganan Kasus KDRT. Pengabdian ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara adopsi anak dan perlindungan KDRT. Pemahaman hukum dan kesadaran hukum mulai meningkat dan terjaga, karena senantiasa ada Kader Perlindungan Anak dan Satgas Anti KDRT yang aktif melakukan sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran sosial bagi masyarakat.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan pelaksanaan pengabdian ini antara lain:

1. Bagi Warga masyarakat Dusun Kemiri sebaiknya lebih peduli terhadap dokumen-dokumen keluarga yang

belum benar sesuai hukum yang berlaku di Indonesia agar lebih memudahkan anak dalam pengurusan Kartu Identitas Anak dan lebih memberikan perlindungan hukum bagi anak.

2. Pemerintah Dusun Kemiri dan warga masyarakat sebaiknya selalu melakukan sosialisasi agar kasus adopsi anak dan KDRT dapat dikurangi di Dusun Kemiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi hingga pengabdian ini dapat dilaksanakan, antara lain kepada:

1. Pemerintah Desa Puwobinangun, Pakem, Sleman
2. Pemerintah Dusun Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman
3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Budiarto, M. (1991). Pengangkatan Anak ditinjau dari segi Hukum. Akademika Pressindo.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1983). Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

Pengertian Delik Biasa dan Delik Aduan - hukumonline.com. (n.d.). Retrieved December 23, 2013, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f9bb33933005/pengertian-delik-biasa-dan-delik-aduan>

Presiden Republik Indonesia. (2002). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Presiden Republik Indonesia. (2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Presiden Republik Indonesia. (2007) Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Presiden Republik Indonesia. (2009) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Rumalutur, R. Y. (2016). Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU KDRT - LBH PEKA - Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Masyarakat Untuk Keadilan. Diambil pada 10 September 2016, dari <http://www.lbhpeka.or.id/2016/09/bentuk-bentuk-kekerasan-dalam->

[rumah_4.html](#).

4 Jenis Kekerasan yang Termasuk KDRT - Kompas.com. (n.d.). Diambil pada 12 Oktober 2016, dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2014/10/12/230000220/4.Jenis.Kekerasan.yang.Termasuk.KDRT>.

Peningkatan Produksi dan Kekuatan Mekanik Batu Bata Press Menggunakan Mesin Cetak Kapasitas 1000 Buah/Jam pada Usaha Keluarga di Desa Kalipucang Kulon

Improving the Production and Mechanical Power of Pressed Bricks using a Printing Machine with the Capacity of 1000 pieces / hour at a Family Business in Kalipucang Kulon Village

Solechan, Aris Kiswanto

Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Semarang
solechan1981@gmail.com, ariskiswanto99@gmail.com

Riwayat Artikel: Dikirim 28 September 2018; Diterima 28 November 2018; Diterbitkan 30 November 2018

Abstrak

Kota Jepara salah satu kota dimana terdapat peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan batubata. Sentra batu bata salah satunya berada di desa Kalipucang Kulon kecamatan Welahan. Dari kekuatan mekanik batu bata masih di bawah standar, densitas rendah, porositas tinggi dan warna merah. Batu bata mengandung pasir besi dan jenis tanah lempung merah. Usaha pembuatan batu bata di desa Kalipucang Kulon sebanyak 54 buah yang terdaftar di kantor Kelurahan tahun 2015. Banyak terjadi permasalahan di mitra UK batu bata Kalipucang Kulon, antara lain, pembuatan batu bata konvensional dan ukuran batu bata tidak standar SNI. Aspek pemasaran masih menunggu pembeli, manajemen usaha bersifat kekeluargaan dan minimnya strategi pemasaran, modal terbatas, dan kurangnya informasi mengakses pinjaman modal. Tujuan pengabdian pada masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yaitu pembuatan mesin batu bata untuk meningkatkan produksi, pembuatan dan pemeliharaan website e-commerce untuk jual produk batu bata, manajemen usaha, strategi pemasaran, member informasi dan pendampingan mendapatkan modal usaha. Metode yang dipakai adalah Workshop pembuatan dan pengoperasian mesin batu bata press sesuai standar SNI, pelatihan pembuatan dan pemeliharaan website e-commerce, memberikan pelatihan kewirausahaan, strategi pemasaran produk, member informasi dan pendampingan untuk mendapatkan modal usaha, dan cara mengakses bantuan dana. Hasilnya dengan penerapan mesin batu bata press mampu meningkatkan 880% dibandingkan dengan manual tenaga manusia. Kekuatan mekanik batu bata merah paling optimal dimiliki oleh komposisi campuran dengan kode B3 dengan kekuatan tekan 41.712 Kg/cm² dan densitas 25,87 kg/m³. Peningkatan produksi dengan sifat mekanik batu bata press mampu meningkatkan pendapatan usaha keluarga dan kualitas batu bata.

Kata kunci: Kalipucang, batu bata, mesin, ekstruder, densitas

Abstract

Jepara is one of town where there is a business opportunity to meet the need of bricks. The brick industry center is located in Kalipucang Kulon Village, Welahan Subdistrict. Seen from the mechanical power, the bricks are still below the standard, with low density, high porosity, and red in color. Bricks contain iron sand and are made of red clay soil. There are 54 registered business entities of bricks in Kalipucang Kulon Village in 2015. There have been a lot of problems faced by the partner of the community service program in Kalipucang Kulon Village, such as the brick making is still conventional and the dimensions are not based on the (Indonesian National Standard or SNI). The marketing aspect is that they still wait for buyers. Besides, the management is family-based, the marketing strategies are still minimal, the capital is limited, and there is a lack of information about how to access capital loan. The Community Partnership Program was aimed at creating a brick making machine that would increase the production rate, creating and maintaining e-commerce website to sell the bricks, teaching about business management and marketing strategies, and giving information and assistances to get venture capital. Method applies was by giving a workshop on creating and operating press brick machine based on the SNI, training on creating and maintaining e-commerce website, training on entrepreneurship, and product marketing strategies, and giving information and assistances to get venture capital and how to access capital loan. The result showed that by using the press brick machine, the production had been increasing up to 880% compared to when making manually. The most optimal mechanical power of red bricks was when the bricks were made of the composition of mixture coded B3 with compressive strength of 41.712 Kg/cm² and density of 25,87 kg/m³. The production increase using press brick machine has improve the family's revenue as well as the bricks' quality itself.

Keywords: Kalipucang, bricks, machine, extruder, density

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pesatnya pembangunan di sektor perumahan dan properti menjadikan kebutuhan batu bata semakin meningkat, ini membuka peluang usaha pengadaan material bangunan untuk mendukung pembangunan sektor tersebut (www.jambi-independent.co.id). Kota Jepara salah satu kota yang melihat peluang usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan batu bata, salah satunya desa Kalipucang Kulon kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Provinsi Jawa tengah. Dari kekuatan mekanik batu bata masih di bawah standar, densitas rendah, porositas tinggi dan warna merah bagaimana diperlihatkan pada Gambar 1. Kekuatan tekan batu bata hanya 21.33 Kg/cm² dan densitas 14,41 kg/m³, ini masih di bawah standar Industri Indonesia SII-0021-1978. UK Bata Jepara dan UK Batu Bata Merah merupakan pengusaha batu bata di desa Kalipucang Kulon dan menjadi mitra pengabdian masyarakat PKM.

Gambar 1:
Batu Bata Desa Kalipucang Kulon



Sumber: Dokumentasi lapangan, 2018

Gambar 2:
Proses pembuatan batu bata secara manual



Sumber: Dokumentasi lapangan, 2018

Kapasitas produksi batu bata 4.500 bata/hari. Setiap percetakan bata membutuhkan 2 orang tenaga kerja. 1 orang mencetak dan 1 orang untuk mengirim material tanah. Model percetakan batu bata masih konvensional dengan alat-alat sederhana yang diperlihatkan pada Gambar 2. UK Bata Jepara Merah memiliki 3 tim pembuat batubata. 1 tim menghasilkan kurang lebih 1.250 bata/hari dengan waktu kerja 6 jam tiap hari. Model pembayaran karyawan borongan, 1 batu bata mentah belum dibakar dihargai Rp. 150. Sehingga 1 tim mampu mendapatkan gaji Rp.187.500. Pembagian gaji untuk pencetak Rp. 110.000 untuk pengirim material Rp. 77.500. Gaji karyawan perbulan untuk pencetak mengantongi uang Rp. 2.640.000 dan pengirim material Rp 1.840.000. Kualitas produksi cetak batu bata konvensional banyak berlubang, kasar, tidak rapi, patah, dan proses lama. Ukuran batu bata yang dihasilkan kedua mitra yaitu 185 x 100 x 48 mm, ukuran ini tidak sesuai

dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Ukuran batu bata SNI 15-2094-2000 yaitu 210 x 110 x 50 mm. Dari permasalahan di atas, perlu dilakukan untuk perbaikan kualitas batu bata, menstandarkan produksi sesuai SNI dan meningkatkan produksi batu bata di UR batu bata di desa Kalipucang Kulon.

Tujuan Kegiatan

- Memperbaiki kualitas dari segi kekuatan mekanik batu bata sesuai standar Industri Indonesia SII-0021-1978.
- Menggantikan produksi batu bata secara manual dengan mesin semi otomatis untuk meningkatkan produksi batu bata dan menyesuaikan ukuran sesuai SNI.

METODE

Metode kegiatan pengabdian masyarakat dan tujuan yang dicapai pada program IbM ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1:
 Rencana kegiatan dan tujuan yang akan dicapai

No	Rencana Kegiatan	Tujuan Yang akan dicapai
1	Workshop pelatihan pengoperasian mesin batu bata press sesuai ukuran SNI	Peserta pelatihan mampu mengoperasikan mesin batu bata press sesuai SOP dan mampu menyelesaikan trouble shooting saat ada kerusakan.
2	Mencoba membuat komposisi campuran tanah liat untuk bata bata press dan menguji kekuatan mekanik dengan uji tekuk dan densitas.	Menentukan komposisi campuran tanah liat yang sesuai dalam penerapan mesin batu bata press dan mencari kekuatan mekanik yang paling optimal

Mesin Batu Bata Press Kapasitas 1000 pcs/jam

- Dimensi 365 x 50 x 65 cm, bentuk fisik ditampilkan pada Gambar 2.
- Kapasitas 1000 bata/jam.
- Power: Diesel 24 PK, 2200 RPM merk Kobai.
- Berat 580 kg
- Reducer: Gardan Hi-Ice
- Rangka: Profil U tipe UNP 8 SNI
- Pulley set: B238 MATL Baja Tuang
- Roll Silender: Ø 22" MATL STEEL.
- Gear: T30 MATL Baja Tuang
- Sprocket RS 80
- Spiral: MATL Baja Tuang ASME B16.
- Hasil potong 3 pcs

Gambar 3:
Mesin batu bata press kapasitas 1000 pcs/jam



Komposisi Campuran Tanah Liat untuk Batu Bata Press

Komposisi campuran antara ketiga bahan disesuaikan dengan putaran (rpm) mesin diesel supaya memiliki kekuatan mekanik maksimal. Proses pencampuran bahan-bahan menggunakan proses manual dengan tenaga manusia dan alat bantu cangkul, sekop, dan selang air. Komposisi untuk campuran tanah liat, sekam padi (brambut), dan air dengan perbandingan 85:10:5, 90:5:5, dan 92:3:5. Komposisi dapat menentukan kekuatan tekan, kekuatan bending, dan densitas batu bata. Proses pengadukan atau mixer dari material tersebut, membutuhkan waktu 1-2 jam. Hasilnya dibiarkan 1 hari untuk menghilangkan kandungan air dalam adonan.

Analisa Data

Metode deskriptif analisis untuk pengambilan data. Proses pengambilan data kekuatan mekanik dari hasil uji tekan dan densitas, sedangkan kapasitas produksi batu bata press per jam dengan mesin diambil dari ketiga komposisi campuran tanah liat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat program PKM pada Usaha Keluarga pembuatan batu bata di desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Hasil Uji Tekan dan Densitas Batu Bata

Pengujian uji tekuk menggunakan mesin Universal Testing Machine (UTM) tipe WDW 100E FLOOR dengan beban 3 KN. Pengujian sebanyak 5x (lima) setiap specimen uji. Kondisi batu bata dalam kondisi kering dan sudah dibakar yang diperlihatkan pada Gambar 4.

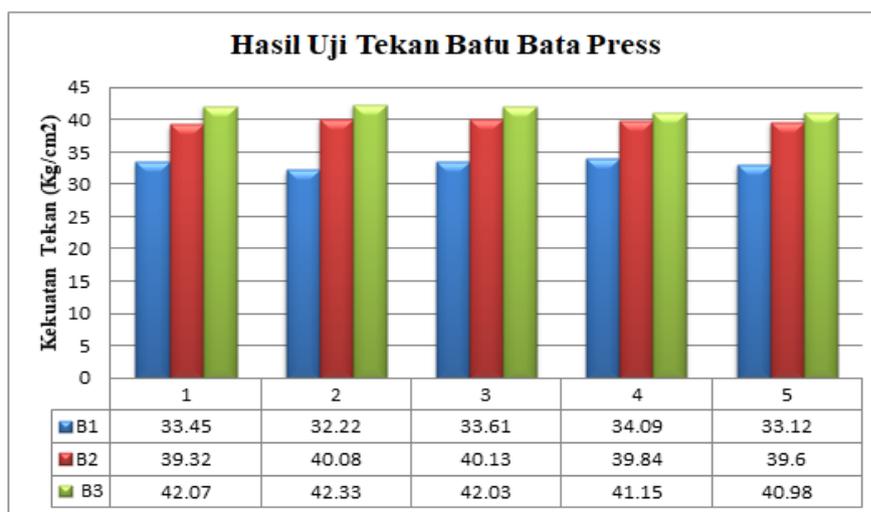
Gambar 4:
 Spesimen uji tekuk batu bata press



Hasil pengujian batu bata press pada ketiga komposisi campuran untuk uji tekuk. Dimensi spesimen 210 x 110 x 50 mm dengan kuat tekan batubata menurut standar Industri Indonesia SII-0021-1978. Tegangan tekan internal yang ditimbulkan oleh gaya tekan diasumsikan tersebar atau didistribusikan merata keseluruhan penampang batu bata menimbulkan intensitas atau tegangan yang sebenarnya (Sukobar, Kuntjoro,

Kusumastuti, & Sungkono, 2014) Hasil uji tekan untuk batu bata press yang paling baik dimiliki oleh komposisi campuran dengan kode B3 dengan perbandingan 92:3:5 dengan kekuatan tekan 41.712 Kg/cm². Menurunnya persentase kandungan tanah menurunkan kekuatan tekan batu bata press bagaimana diperlihatkan pada Gambar 5.

Gambar 5:
 Hasil uji tekan batu bata press



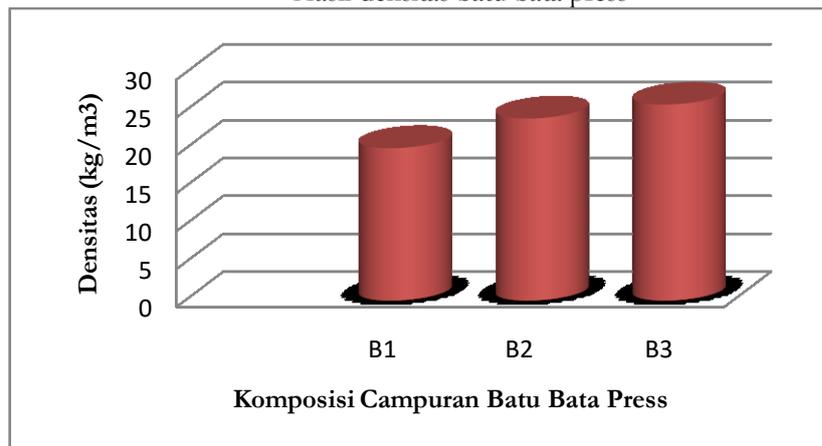
Ini terjadi pada komposisi campuran kode B2 yang mengalami penurunan 1.918 Kg/cm² atau 4.59%. Untuk Kode B1 mengalami penurunan 8.414 Kg/cm² atau

20.17%. Menurunnya kekuatan tekan ini diakibatkan berkurangnya berat volume dan densitas batu bata press karena bertambahnya komposisi campuran sekam padi (William D.

Callister, Jr., 1990). Sekam padi saat pembakaran batu bata press terbakar menjadi abu, sehingga terbentuk pori-pori dan menurunkan densitas. Hasil pengujian densitas atau massa jenis dari masing-masing spesimen batu bata press dengan variasi komposisi campuran diperlihatkan pada Gambar 5. Komposisi campuran kode B3 memiliki densitas paling tinggi yaitu 25,87 kg/m³,

sedangkan komposisi campuran kode B2 yaitu 24,02 kg/m³ mengalami penurunan densitas sebesar 1,87 kg/m³ atau 7,15%. Bertambahnya komposisi campuran sekam padi menurunkan densitas, ini dialami komposisi campuran kode B1 memiliki densitas paling rendah yaitu 20,11 kg/m³ atau mengalami penurunan 22,26%.

Gambar 6:
Hasil densitas batu bata press

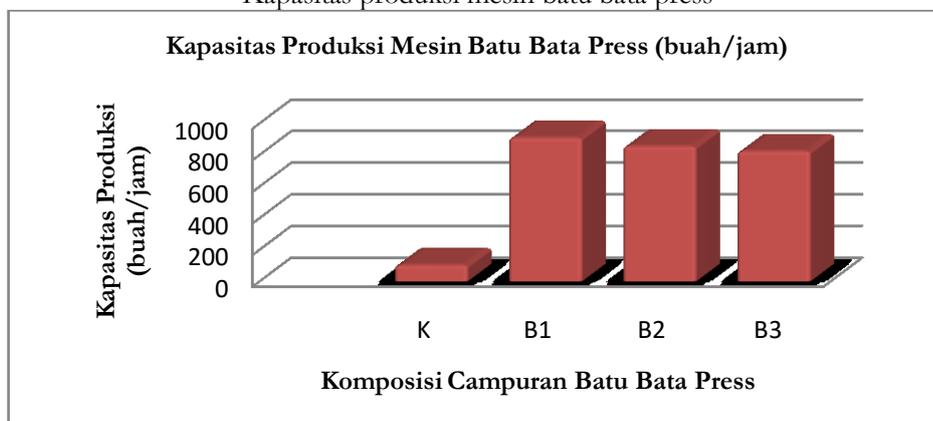


Kapasitas Produksi Mesin Batu Press

Kapasitas produksi mesin batu bata press mampu mencetak 1.000 buah/jam. Pada percobaan ini menggunakan komposisi campuran bahan batu bata dengan kode B1, B2, dan B3. Sedangkan manual dengan tenaga manusia kode K per jam mampu menghasilkan 103 buah. Untuk mengetahui kapasitas produksi mesin batu press dengan

waktu percobaan selama 5 menit untuk mempercepat pengambilan hasil uji. Waktu 5 menit dikalikan 12 kali menjadi 60 menit atau 1 jam untuk mendapatkan kapasitas produksi buah/jam. Hasil pengujian kapasitas produksi mesin batu bata press untuk semua komposisi campuran bahan batu bata press diperlihatkan pada Gambar 7.

Gambar 7:
Kapasitas produksi mesin batu bata press



Kapasitas produksi cetak batu bata press paling tinggi pada komposisi campuran B1 dengan komposisi tanah liat 85%, sekam padi 10%, dan air 5% sebesar 909 buah/jam. Komposisi campuran kode B2 mampu produksi 855 buah/jam atau mengalami penurunan 54 buah/jam (5,94%). Kapasitas produksi cetak paling rendah pada komposisi campuran kode B3 yaitu 824 buah/jam mengalami penurunan 85 buah/jam (9,35%). Apabila dibandingkan dengan manual atau konvensional mengalami peningkatan 880%. Bertambahnya komposisi campuran sekam padi mampu meningkatkan produksi cetak batu bata. Sekam padi memiliki permukaan yang halus dan densitas rendah sehingga gaya gesek rendah dan proses keluarnya tanah liat dari mulut cetakan lebih cepat. Permukaan sekam padi yang halus mengurangi gesakan antar muka dengan dinding cetakan dan kecepatan meluncurnya tanah liat lebih cepat dan berbanding lurus dengan kapasitas produksi yang besar (Rusmardi, 2012).

KESIMPULAN

1. Kekuatan mekanik batu bata press paling optimal dimiliki oleh komposisi campuran dengan kode B3 dengan kekuatan tekan 41.712 Kg/cm² dan densitas 25,87 kg/m³.
2. Penerapan mesin batu bata press mampu meningkat 880% dibandingkan dengan manual tenaga manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti) Republik Indonesia yang telah memberikan dana untuk pengabmas program PKM tahun anggaran 2017-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Desa Kalipucang Kulon. (2015). Desa Kalipucang Kulon Dalam Angka 2015.
- Fransiskus. (2010). Usaha Batu Bata. Diambil dari www.jambi-independent.co.id
- Rusmardi, R. (2012). Analisis Percobaan Gesekan (Friction) untuk Pengembangan Teknologi Pengereman pada Kendaraan Bermotor. *POLI REKAYASA*, 3(2), 81-89.
- Sukobar, S., Kuntjoro, K., Kusumastuti, K., & Sungkono, S. (2014). Kesetaraan Kuat Tekan Batu Bata (Press) Asal Bangsal Mojosari Kabupaten Mojokerto Terhadap Kuat Tekan Spesi Campuran Semen, Kapur, dan Pasir untuk Pasangan Bata. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil*, 12(2), 13-20.
- SNI 15-2094-2000., Syarat-syarat batu bata., hal 23-24. Jakarta.
- William D. Callister, Jr. (1990). *Materials Science And Engineering An Introduction*. Second Ed.. New York
- www.oscommerce.com, diakses pada tanggal 6 Agustus 2014.

Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Ikan Asin di Desa Korban Bencana Rob

Appropriate Technology for Salted Fish Business in Rob's Sacrificial Village

Purnomo, Nurhayati

Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang
purnomo@unimus.ac.id, nurhayati@unimus.ac.id

Riwayat Artikel: Dikirim: 16 Oktober 2018; Diterima 29 November 2018; Diterbitkan 30 November 2018

Abstrak

Usaha pengolahan ikan asin menjadi sangat penting bagi penduduk yang tinggal di daerah pinggir laut dan daerahnya menjadi kurban rob. Tambak yang sudah menyatu dengan laut akibat rob, menyebabkan pendapatan masyarakat menurun drastis. Hasil-hasil melaut dan tambak tidak dijual dalam keadaan mentah, namun ikan dan udang bisa diolah menjadi produk lain yang lebih menarik. Permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan pengeringan ikan jika hujan, tingginya kadar minyak goreng sehingga olahan makanan cepat tengik, dan makanan olahan cepat melempem. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan usaha pengolahan ikan asin di desa kurban rob sehingga menjadi mandiri secara ekonomi. Tujuan ini diraih melalui melalui peningkatan peralatan penunjang dan ketrampilan usaha. Alat pengering, peniris minyak, serta pengemas makanan diterapkan dalam kegiatan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan alat pengering, pengeringan tidak lagi tergantung panas matahari. Kapasitas pengeringan meningkat 700% dari keadaan awal 1 kg/jam. Daya tahan gimbak meningkat menjadi 15 hari dari keadaan awal 4 hari. Begitu pula dengan daya tahan gimbak yang meningkat dari semula 7 hari menjadi 30 hari.

Kata kunci: Ikan asin, pengeringan, penirisan, kemasan.

Abstract

Salted fish processing business is very important for residents who live in coastal areas and the area becomes a victim of rob. Ponds that have been fused with the sea due to rob cause people's income drop dramatically. The results of fishing and ponds are not sold in raw conditions, but fish and shrimp can be processed into other products that are more attractive. The problem faced was the difficulty of drying fish if it rained, high levels of fried oil so that processed foods quickly rancid, and processed foods quickly sluggish. This activity aims to increase the salted fish processing business in the village of sacrifice rob so that it becomes economically independent. This goal is achieved through increasing the supporting equipment and business skills. Dryer, oil slicer, and food packaging are applied in this activity. The results show that by using a dryer, drying is no longer dependent on the sun's heat. Drying capacity increases by 700% from the initial state of 1 kg/hour. Dred resistance increases to 15 days from the initial 4 days. Similarly, dreadlocks endurance increased from 7 days to 30 days

Keywords: salted fish, drying, draining, packaging.

PENDAHULUAN

Air pasang laut (rob) telah merendam $\frac{3}{4}$ desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Seluruh (100%) tambak yang ada menjadi tenggelam, dan menyatu, serta terhubung langsung dengan laut. Petani tambak tidak bisa lagi menghasilkan ikan bandeng dan udang yang sebelumnya merupakan hasil

utama yang mempunyai harga jual yang tinggi. Saat ini, ikan bandeng dan udang sudah sangat sulit dibudidayakan di tambak. Ikan yang ada ditambak saat ini tergolong ikan liar yang masuk ke tambak karena terbawa air rob atau air pasang. Ikan-ikan liar inilah yang sekarang menghuni tambak. Harga jual ikan liar ini sangat rendah bahkan tidak laku di pasaran.

Sehingga banyak petani tambak dan nelayan yang tidak mendapatkan penghasilan. Akibatnya penghasilan petani tambak pun tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Akibatnya tingkat kemiskinan di daerah ini meningkat.

Gambar 1:
Kondisi desa saat terjadi rob



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu-ibu di desa Surodadi bekerja sebagai pengupas kulit udang, warung kecil-kecilan dan usaha mengolah hasil tambak/laut menjadi ikan asin. Usaha pengolahan ikan asin yang masih bertahan yaitu usaha ikan asin "GURIH" dan "BAROKAH". Usaha ikan asin "GURIH" dikelola oleh Ibu Sofiani yang tinggal di RT. 03 RW 01, sedangkan "BAROKAH" dikelola oleh Ibu Sa'adah yang tinggal di RT. 02 RW 01 Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Di tengah makin menurunnya kondisi perekonomian, kedua usaha ikan asin ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya yang ikut bekerja dan menggantungkan perekonomiannya pada kedua usaha ikan asin tersebut.

Permasalahan yang dialami kedua mitra adalah (1) pengeringan ikan asin sangat tergantung dari cuaca dan ikan asin sering bercampur debu halus karena pengeringan dilakukan di udara terbuka dan di pinggir jalan umum, (2) penyimpanan ikan asin sebelum kering tidak rapat akibatnya ikan asin cepat rusak dan berjamur, (3) pengemasan produk dilakukan dengan melipat ujung plastic kemudian diklip dengan staples sehingga tidak menarik dan udara masih bisa masuk dan mengoksidasi produk yang berupa gimbal dan ikan asin, (4) perlunya pembinaan dalam berwirausaha khususnya dalam optimalisasi potensi agar lebih produktif, dan (5) mitra belum mempunyai teknik pemasaran yang baik, pemasaran dilakukan dengan menjual langsung produk ikan asin ke

konsumen/toko. Paper ini mengupas solusi hanya untuk permasalahan 1 sampai 3 saja, persoalan lainnya akan dibahas pada paper lainnya.

Tujuan kegiatan ini adalah (1) mengembangkan usaha ikan asin di dua usaha ikan asin di desa kurban rob sehingga keduanya dan orang yang bekerja padanya menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, (2) meningkatkan keterampilan berkreasi dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi tepat guna dalam pengeringan, penyimpanan, pegemasan ikan asin, serta keterampilan dalam pemasaran produk ikan asin.

METODE

Metode yang diterapkan adalah (1) memperbaiki metode pengeringan dengan memanfaatkan mesin pengering jenis rak sehingga pengeringan ikan asin tidak di udara terbuka, tidak tergantung terik matahari, dan ikan asin tidak terkontaminasi dengan berbagai kotoran di

udara, (2) mengembangkan fasilitas penyimpanan dan pengemasan produk ikan asin dengan menggunakan alat penyimpan dan mesin pengemas, (3) mitra diberikan bantuan alat pengemas produk ikan asin sehingga ikan asin awet tidak mudah terkena bakteri dan kotoran sehingga mudah rusak, dan (4) dibuatkan tempat plastik berlabel untuk mengemas ikan asin agar ikan asin menarik bagi konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat pengering ikan yang dihasilkan disajikan dalam Gambar 2. Alat ini mempunyai kapasitas pengeringan 8 kg/jam dan mampu mengeringkan ikan asin atau gimbal baik dalam suasana udara cerah maupun hujan. Keuntungan lain dari penggunaan pengering ini adalah terhindarnya ikan asin dari debu dan dari hinggapnya lalat yang merupakan penyebar bakteri/bibit penyakit.

Gambar 2:
Mesin pengering ikan asin yang dihasilkan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Alat peniris yang dihasilkan sudah diimplementasikan untuk menghilangkan minyak yang terkandung dalam makanan. Para mitra juga sudah diberikan pelatihan penggunaan dan perawatan alat. Saat melakukan sosialisasi penggunaan alat

dan saat unjuk kerja alat, terlihat genangan minyak pada dasar box spinner setelah dilakukan proses penirisan 3 menit (lihat Gambar 3b). Terlihat pula bahwa gimbal terlihat lebih kering akibat makin sedikit kandungan minyaknya setelah ditiris.

Gambar 3:

Praktek penirisan minyak menggunakan mesin peniris (a), dan minyak yang keluar dari gimbal dan tertampung di alat peniris



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pengemasan telah dilakukan dengan menggunakan mesin pengemas berupa hand sealer. Supaya lebih menarik, kemasan/bungkus dilengkapi dengan stiker (lihat Gambar 4). Terhadap pemilik usaha, telah dilakukan pula sosialisasi dan pelatihan penggunaan dan pemeliharaan

alat. Unjuk kerja alat diperagakan dan menghasilkan kemasan produk yang lebih menarik sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4(b). Disain stiker ada dua jenis, pertama dilekatkan pada sisi samping kemasan dan lainnya pada bagian atas kemasan.

Gambar 4:
Praktek penggunaan hand sealer dan pembuatan kemasan produk.

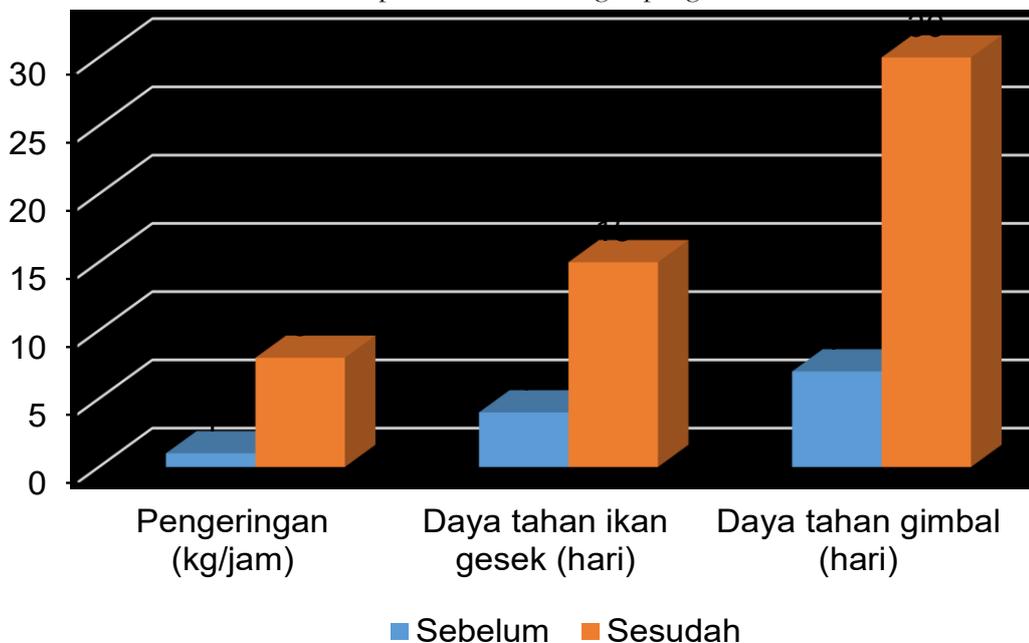


Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pelaksanaan kegiatan tidak berhenti saat pelatihan saja, tetapi implementasi setelah kegiatan juga dilakukan. Gambar 5 adalah hasil monitoring terhadap

implementasi alat pengeringan, penirisan minyak, dan pengemasan menggunakan hand sealer.

Gambar 5:
Efek implementasi teknologi tepat guna.



KESIMPULAN

Peralatan penunjang usaha dan ketrampilan pengusaha ikan asin telah berhasil ditingkatkan melalui kegiatan ini. Alat pengering, peniris minyak, serta pengemas makanan telah berhasil diterapkan dalam kegiatan ini. Penggunaan alat pengering memutus ketergantungan proses pengeringan terhadap panas matahari. Kapasitas pengeringan berhasil ditingkatkan 700%, daya tahan gimpal meningkat 275%, dan daya tahan gimpal yang meningkat 328% dari daya tahan awal yang hanya 7 hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat No.: 001/K6/KM/SP2H/PPM/2018, tanggal 19 Februari 2018 yang telah memfasilitasi pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Demak dan Biro Statistik Kabupaten Demak, 2017
- Biro Pusat Statistik. (2014). Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 28 Juta, diunduh 3 april 2016 dari <http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>.
- Walujodjati. A dan Darmanto. (2005). Rancang Bangun Mesin Pengering Ikan asin Untuk Industri Kecil Ikan asin, Momentum, Vol. 1, No. 1, April 2005 : 27- 32

Mesin Pengering cabinet dryer, diunduh 30
Mei 2017 dari
<https://elsafta.wordpress.com/2010/03/28/dryer/>

Mesin pengemas (sealer), Diakses 7 Juni
2017 dari
https://homeappliance.en.alibaba.com/product/60351541541-803380565/Fresh_world_vacuum_sealer_guangzhou_electronic.html.

Peningkatan Pengetahuan Tentang Jamu Pada Siswa-Siswi di Sekolah Dasar Negeri 1 Boyolali

Increasing Knowledge about Herbs for Students at Boyolali 1 Elementary School

Iwan Setiawan¹, Suharyanto², Ryan Dianto³

¹ Unit Farmasetika dan Teknologi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, ² Unit Kimia Analisis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional

³Unit Obat Tradisional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional,
Surakarta

iwan.setiawan02@gmail.com

Riwayat Artikel: Dikirim 28 September 2018; Diterima; Diterbitkan

Abstrak

Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, berupa bagian tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan, kulit dan batang serta buah. Sebagai suatu bentuk pengobatan tradisional, jamu memegang peranan penting dalam pengobatan penduduk negara berkembang. Litbang Depkes menginformasikan bahwa 50% penduduk Indonesia menggunakan jamu baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit. Jamu telah diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Usia 6-12 tahun anak sudah memiliki dunia sekolah yang lebih serius walaupun ia tetap seorang anak dengan dunia yang khas, masa ini ditandai dengan perubahan dalam kemampuan dan perilaku. Pertumbuhan dan perkembangan anak membuatnya lebih siap untuk belajar dibanding sebelumnya, anak juga mengembangkan keinginan untuk melakukan berbagai hal dengan baik. Tujuan dari program pengabdian ini adalah memperkenalkan profesi ahli farmasi, memberikan pengetahuan tentang resiko mengkonsumsi minuman kesehatan dan memberikan pengetahuan tentang khasiat jamu dan obat tradisional bagi siswN 1 Boyolali Metode pengabdian dibuat menarik dengan kegiatan minum jamu bersama, mengumpulkan dan menguji pengetahuan siswa terhadap beraneka ragam tanaman obat tradisional dan penyuluhan mengenai resiko mengkonsumsi minuman kesehatan, pengetahuan tentang khasiat jamu dan obat tradisional. Pengabdian masyarakat ini diterima baik oleh pihak sekolah sehingga ditambahkan pada jadwal mingguan ada kegiatan minum susu bersama dan minum jamu bersama serta bagi anak usia dini akan sangat bermanfaat dan mampu menanamkan kecintaan anak-anak pada tanaman obat tradisional indonesia.

Kata kunci: siswa, jamu, obat tradisional

Abstract

Herbs are made of natural ingredients, such as parts of plants such as rhizomes (roots), leaves, skin and stems and fruit. As a kind of traditional medicine, herbs play an important role in curing people in developing countries. Research and Development division of the Ministry of Health states that 50% of Indonesian people drink herbs either to keep them healthy or to recover from illness. Herbs have been accepted by Indonesian people as a part of traditional medicine. Children at the age of 6-12 years old has had more serious schooling world though their world is still distinctive. This period is signified by chances of abilities and behaviors. Growth and development of a child makes him or her more ready to learn the he or she has been in the previous stages. He or she also develop will to do things better. The program was aimed at promoting the profession of pharmacist, sharing knowledge the risk of consuming on healthy drink and informing the benefits of drinking herbs and traditional medicine for students of Public Elementary School 1 of Boyolali. The method of the service was made interesting with drinking herbs together, collecting various kinds of traditional medicinal plants, and testing their knowledge on them and socializing the risk of consuming healthy drinks, knowledge on the benefits of drinking herbs and traditional medicine. This community service was positively received by the school so that in the weekly schedule, drinking milk and herbs together for young children were added. And for the young children, it was really useful and able to instill the children's love to Indonesian traditional medicinal plants.

Keywords: students, herbs, traditional medicine

PENDAHULUAN

Kata jamu telah terbiasa didengar oleh masyarakat Indonesia. Minum jamu dianggap oleh masyarakat bangsa Indonesia sebagai obat tradisional. Jamu biasanya terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan juga dari bagian tubuh hewan. Sebagian masyarakat menyebutnya dengan pengobatan komplementer atau alternatif (*complementary and alternative medicine*). Di Asia, negara yang banyak menggunakan obat tradisional adalah Cina, Korea, India, dan termasuk Indonesia.

Data Riset Kesehatan Dasar (*Riskesdas*) 2013, suatu penelitian kesehatan berskala nasional yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa 30,4% rumah tangga di Indonesia memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional, diantaranya 77,8% rumah tangga memanfaatkan jenis pelayanan kesehatan tradisional keterampilan tanpa alat, dan 49,0% rumah tangga memanfaatkan ramuan. Sementara itu, *Riskesdas* 2010 menunjukkan 60 % penduduk Indonesia diatas usia 15 tahun menyatakan pernah minum jamu, dan 90 % diantaranya menyatakan adanya manfaat minum jamu (*Tjandra, 2014*).

Menurut *Soekidjo Notoatmojo (Darmawan, T. (2012))*. Usia 6-12 tahun anak sudah memiliki dunia sekolah yang lebih serius walaupun ia tetap seorang anak dengan dunia yang khas, masa ini ditandai dengan perubahan dalam kemampuan dan perilaku. Pertumbuhan dan perkembangan anak membuatnya lebih siap untuk belajar dibanding sebelumnya, anak juga mengembangkan keinginan untuk melakukan berbagai hal dengan baik bahkan bila mungkin dengan sempurna.

Anak-anak cukup jarang yang mengetahui dan menyukai jamu dan tanaman obat tradisional. Padahal disekitar kita banyak sekali tanaman obat tradisional yang berkhasiat. Untuk itulah perlu

mengenalkan jenis jamu dan tanaman obat tradisional dan khasiatnya bagi anak-anak siswa/i SD Negeri 1 Boyolali. Pengenalan sejak dini akan memberikan pengetahuan bahwa bukan hanya obat dari bahan kimia yang menyembuhkan. Namun, melalui tanaman herbal yang ada di kebun dan dijual di pasar dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. anak bisa diberikan pengetahuan jamu dan tanaman obat tradisional melalui observasi langsung. Dengan melihat, dikenalkan bau, warna dan kegunaannya. Biarkan dia melihat dan mengenali tanaman-tanamannya. Seperti tanaman salam, sambiloto, kunyit, temulawak, jati belanda, cabe jawa, mengkudu atau pace, jambu biji dan jahe merah. Selain sembilan tanaman herbal atau obat tradisional tersebut, masih banyak tanaman lain yang mempunyai khasiat pencegahan dan penyembuhan.

Sehingga Sasaran program pengabdian ini ditujukan kepada siswa/i SDN I Boyolali, yang mana dalam pertumbuhan dan perkembangan memiliki kesiapan untuk belajar hal-hal yang baik. Dalam hal ini menjadi tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memperkenalkan dan menanamkan pengetahuan serta manfaat mengonsumsi jamu sejak dini bagi siswa/i SD Negeri 1 Boyolali. Dengan program pengabdian ini anak dikenalkan dengan jamu dan tanaman obat tradisional dengan sehingga anak akan mau menyukai dan memanfaatkan dengan jamu dan tanaman obat tradisional.

METODE

Sasaran

Sasaran dari kegiatan program Pengabdian Masyarakat ini adalah seluruh siswa-siswi SD Negeri 1 Boyolali kelas 1 hingga kelas 6 SD Negeri 1 Boyolali.

Metode Pelaksanaan

1. Alat dan Bahan

Alat : Projektor, Screen Blender,
Ayakan, Gelas Plastik, Wadah Air

Minum.

Bahan : Jahe, Kencur, Gula, Air Mineral.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan di hari Selasa, 13 Maret 2018 di halaman dan kelas SD Negeri 1 Boyolali.

Metode Pelaksanaan

Penyuluhan secara langsung dengan metode ceramah dan tanya jawab tentang jamu dan tanaman obat tradisional, serta pelatihan dengan kegiatan pembuatan jamu, gerakan minum jamu bersama, memberikan tugas siswa/i untuk membawa tanaman obat keluarga yang telah ditentukan, mengumpulkan dan mengidentifikasi tanaman obat keluarga dan tanaman obat tradisional, mewarnai gambar obat tradisional dan pengenalan tanaman tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat dengan tema gerakan minum jamu bersama yang dilakukan di SD Negeri 1 Boyolali bertujuan untuk mengenalkan, menumbuhkan dan meningkatkan ilmu, pengetahuan dan minat anak-anak terhadap jamu. Kegiatan pengenalan jamu meliputi gerakan minum jamu bersama, pengenalan TOGA (Tanaman Obat Keluarga), pemberian materi tentang jamu, peracikan jamu dan workshop tentang resiko konsumsi minuman kesehatan dan khasiat obat tradisional jamu yang diikuti oleh peserta dari siswa kelas 4,5,6 SD Negeri I Boyolali. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru, kepala sekolah SD Negeri 1 Boyolali sebelum kegiatan diperoleh beberapa fakta sebagai berikut:

1. Belum pernah dilakukan program serupa di SD Negeri 1 Boyolali yakni pengenalan jamu dan obat tradisional.
2. Kegiatan minum susu menjadi kegiatan rutin disekolah yang dilaksanakan setiap minggu.
3. SD Negeri 1 boyolali tidak lama ini menempati bangunan baru, sehingga halaman sekolah masih belum banyak

terisi tanaman dan seperti pada umumnya ditanami dengan tanaman hias.

Gambar 1:

Kegiatan Minum Jamu Bersama di halaman sekolah SD Negeri 1 Boyolali



Gerakan minum jamu bersama dilakukan setelah mengikuti olahraga. Gerakan minum jamu bersama ini untuk memperkenalkan dan mengedukasi siswa-siswi SD Negeri I Boyolali akan pentingnya minum jamu sejak dini dan menanamkan kesukaan mengonsumsi jamu. pada saat mereka dewasa. Gerakan minum jamu bersama dapat menjalankan budaya bangsa Indonesia mengenai jamu sebagai warisan budaya.

Kegiatan kedua dalam program pengabdian masyarakat tentang pengenalan jamu setelah minum jamu bersama dilakukan dengan berbagai metode dengan berbagai macam jenis kegiatan yang disesuaikan dengan tingkatan kelas. Hal ini dilakukan karena setiap tingkatan kelas mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam penerimaan materi. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan adalah sebanyak 250 siswa, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 1 Boyolali. Metode pengenalan tanaman obat tradisional untuk siswa kelas 1-3 yaitu dengan mewarnai dengan konsep gambar tentang jamu. Hal ini bertujuan agar siswa kelas 1 sampai 3 dapat menerima materi yang disampaikan yaitu materi tentang jamu dengan mewarnai, selain mereka mampu menerima materi yang disampaikan juga menumbuhkan kreatifitas anak-anak terhadap seni mewarnai.

Siswa kelas 4 dan 5 diberikan materi pengenalan tentang jamu dengan tingkatan yang lebih sulit dibandingkan dengan siswa kelas 1 sampai 3 yaitu

pemberian materi tentang Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di mana sebelum dilakukan kegiatan siswa kelas 4 dan 5 sebelumnya diberikan materi tentang TOGA. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mencocokkan nama dengan tanaman obat, dari kelas 4 dan 5 dibagi menjadi 4 kelompok besar dengan tujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan kegiatan serta untuk menumbuhkan nilai diskusi bagi siswa untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh mahasiswa penanggung jawab. Setiap siswa diberikan tugas untuk membawa tanaman obat yang telah ditentukan oleh tim pengabdian, dari tanaman obat yang telah dibawa masing-masing siswa diberikan permainan yaitu mencocokkan nama tanaman obat dengan tanaman obat yang mereka bawa serta fungsi dari tanaman obat. Kegiatan pengenalan jamu dengan pemberian materi tentang tanaman obat keluarga ini bertujuan untuk memberikan materi kepada siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri I Boyolali, tanaman apa saja yang termasuk dalam kategori TOGA dengan harapan mereka dapat menyampaikan kepada minimal keluarga mereka tentang tanaman yang berkhasiat sebagai obat yang bisa ditanam di lingkungan keluarga.

Siswa kelas 6 diberikan materi pengenalan tentang jamu yaitu dengan pemberian materi dasar tentang jamu yang meliputi tebak nama simplisia basah dengan mata tertutup, peracikan jamu yaitu wedang uwuh dan dilakukan post test tentang materi yang telah disampaikan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pembagian kelompok menjadi 6 kelompok, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan kegiatan serta menumbuhkan nilai diskusi pada siswa kelas 6 tentang materi yang disampaikan. Sebelum pelaksanaan kegiatan siswa diberikan materi tentang jamu yaitu dengan mengenalkan kepada siswa kelas 6 tentang simplisia basah dan materi yang meliputi organoleptis dari simplisia basah. Selanjutnya materi tentang peracikan

wedang uwuh yang dilakukan tiap kelompok. Hasil yang dinilai meliputi ketepatan rasa yang pas untuk wedang uwuh. Kegiatan selanjutnya untuk siswa kelas 6 yaitu dilakukan post test untuk mengetahui tingkat pengetahuan setelah pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan.

Gambar 2:
Penyuluhan oleh Bp Iwan Setiawan, M.Sc., Apt



Program pengabdian masyarakat tentang pengenalan jamu yaitu dilakukan penyuluhan yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 4,5,6. tentang kegunaan dari jamu dan obat tradisional. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pembekalan materi tentang jamu kepada murid SD Negeri I Boyolali yang dilakukan dengan metode ceramah dan sesi tanya jawab, hal ini bertujuan untuk menunjukkan keaktifan dari peserta serta pemahaman para peserta terhadap materi yang telah diberikan. Pada sesi tanya jawab siswa/i sangat antusias bertanya kepada narasumber tentang materi jamu dan tanaman obat tradisional.

Setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat peningkatan pengetahuan tentang jamu, siswa/i SD Negeri 1 Boyolali terlihat antusias dan berminat terhadap jamu dan obat tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang bertanya pada saat pelatihan dan penyuluhan. Keberhasilan pelaksanaan ini dapat dikarenakan faktor-faktor pendukung antara lain seperti:

1. Metode pengabdian yang yang digunakan cukup efektif menarik minat siswa/i yaitu dengan metode permainan yang interaktif seperti mewarnai gambar dengan tema jamu dan obat tradisional, permainan menebak

tanaman obat tradisional dengan mata tertutup, menyebutkan nama dan khasiat, serta menebak dan menyebutkan bagian-bagian dari tanaman obat tradisional.

2. Pihak sekolah sangat kooperatif dan membantu mempersiapkan tempat pelaksanaan yang kondusif seperti halaman, kelas serta kelengkapan sarana lcd proyektor dan pengeras suara.
3. Siswa/i SD Negeri 1 yang sangat proaktif dan bersemangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan.
4. Dosen sebagai nara sumber sangat menguasai topik yang diberikan dalam pengabdian.

Namun selama pelaksanaan tetap ditemukan berbagai kendala-kendala seperti:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 15.00 dirasakan masih sangatlah kurang untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai jamu dan obat tradisional bagi siswa/i.
2. Anggaran kegiatan kurang mencukupi untuk menambah jumlah doorprize dan hadiah sebagai apresiasi bagi siswa/i agar meningkatkan motivasi dan semangat siswa/i.

KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan Siswa-siswi SD Negeri 1 Boyolali tentang informasi dan khasiat jamu dan tanaman obat tradisional yang ditunjukkan kenaikan nilai hasil post test setelah pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatnya minat Siswa-siswi SD Negeri 1 Boyolali tentang informasi dan khasiat jamu dan tanaman obat tradisional yang ditunjukkan tinggi minat dan banyaknya siswa yang bertanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional atas dukungan yang diberikan.
2. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Boyolali yang sudah menerima dan membantu terlaksananya pengabdian ini.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional yang telah memberikan bantuan dana untuk melaksanakan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM RI. (2010). Acuan Sediaan Herbal Volume Kelima Edisi Pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Dalimartha S. (2007). *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 4*. Jakarta: Puspa Swara.
- Depkes R.I. (1971). *Materia Medika Indonesia*. Jilid III. hal. 21-25.
- Depkes RI. (2008) *Farmakope Herbal Indonesia Ed 1*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Dermawan, Deden. (2012). *Buku Ajar Keperawatan Komunitas*. Yogyakarta: Goysen Publishing.
- Hariana, A. (2007). *Tumbuhan obat dan khasiatnya*. Seri 3. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Tjandra Y. A. (2014). *Jamu & Kesehatan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Deteksi Dini Faktor Risiko Hipertensi

Community Empowerment as an Early Detection of Risk Factors for Hypertension

Ratna Indriawati¹, Sherly Usman²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

¹r_indriawatiwibowo@yahoo.com, ²umiceli_1307@yahoo.com

Artikel: Dikirim 28 September 2018; Diterima 28 November 2018; Diterbitkan 30 November 2018

Abstrak

Hipertensi masih merupakan masalah kesehatan yang penting. Prevalensi hipertensi nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 35,8% dengan proporsi kasus hipertensi yang telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 24%. Hal ini berarti bahwa masih ada 76,0% kasus hipertensi di masyarakat yang belum terdiagnosis. Tingginya angka insidensi hipertensi di propinsi DIY tersebut turut mempengaruhi insidensi penyakit ini di kabupaten Bantul. Pola makan yang tidak sehat dan kurang terjaga, perilaku merokok, stress psikososial karena faktor ekonomi, dan minimnya sarana & prasarana kesehatan merupakan faktor pemicu tingginya insidensi penyakit hipertensi di wilayah ini. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan faktor risiko, menanggulangi penyakit hipertensi dan komplikasi hipertensi serta pelatihan kader kesehatan terkait penyakit hipertensi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi: melakukan pemeriksaan kesehatan dan faktor risiko hipertensi (berat badan, tinggi badan, dan body mass index/BMI) untuk skrining hipertensi, promosi kesehatan berupa penyuluhan hipertensi, pelatihan pengukuran tekanan darah yang baik dan benar, dan pembuatan dan pembagian leaflet hipertensi. Sebanyak 105 orang yang diperiksa tekanan darahnya, didapatkan 31 orang menderita hipertensi. Rentang umur kurang dari 40 tahun didapatkan 8 orang penderita hipertensi. Sedangkan kelompok umur 45-55 tahun juga didapatkan 8 orang dengan hipertensi. Terdapat 15 orang dengan hipertensi pada kelompok usia lebih dari 75 tahun.

Kata kunci: hipertensi, faktor risiko, tekanan darah, berat badan

Abstract

Hypertension is still the important health problem. The prevalence of national hypertension in the Special Region of Yogyakarta (DIY) was 35.8% with the proportion of cases of hypertension diagnosed by health personnel at 24%. This means that there are still 76.0% cases of hypertension in the community that have not been diagnosed. The high incidence of hypertension in the province of DIY also affects the incidence of this disease in the Bantul district. Unhealthy and poorly maintained eating patterns, smoking behavior, psychosocial stress due to economic factors, and the lack of health facilities & infrastructure are factors that trigger the high incidence of hypertension in this region. This community service aims to provide additional knowledge of risk factors, overcome hypertension and complications of hypertension and health cadres training related to hypertension. These community service activities included: conducting health checks and risk factors for hypertension (body weight, height, and body mass index/BMI) for hypertension screening, health promotion in the form of hypertension counseling, excellent and correct blood pressure measurement training, and making hypertension leaflets. A total of 105 people who were tested for blood pressure were 31 people suffering from hypertension. The age range of fewer than 40 years found eight people with hypertension. Whereas the age group of 45-55 years also found eight people with hypertension. There are 15 people with hypertension in the age group over 75 years

Keywords: hypertension, risk factors, blood pressure, body weight

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

1. Gambaran Umum Kelompok Sasaran

a. Letak dan Kondisi geografi

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima Kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas

wilayah seluruhnya mencapai 506,9 Km² dan merupakan 15,91% dari seluruh luas wilayah Propinsi DIY. Kabupaten Bantul terletak di bagian Selatan Wilayah Propinsi DIY, yaitu antara 07^o 44'04" – 08^o 00' 27" LS dan 110^o 12' 34" – 110^o 31' 08" BT. Kecamatan Sewon merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bantul. Puskesmas Sewon I merupakan salah satu dari 27 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul yang terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah kerja terdiri dari 2 desa yaitu desa Timbuharjo dan desa Pendowoharjo yang terbagi atas 32 Dusun dengan 43 Posyandu dan 216 RT. Luas wilayah kerja Puskesmas Sewon I adalah 14,8 km² yang terdiri dari desa Timbulharjo: 7,78 km² dan desa Pendowoharjo: 6,98 km² (Seksi Surveilans & Imunisasi, 2012).

Yogyakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan prevalensi hipertensi yang tinggi. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, prevalensi hipertensi nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 35,8% dengan proporsi kasus hipertensi yang telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 24%. Hal ini berarti bahwa masih ada 76,0% kasus hipertensi di masyarakat yang belum terdiagnosis. Tingginya angka insidensi hipertensi di propinsi DIY tersebut turut mempengaruhi insidensi penyakit ini di kabupaten Bantul (Seksi Surveilans & Imunisasi, 2012).

Pola makan yang tidak sehat dan kurang terjaga, perilaku merokok, stress psikososial karena faktor ekonomi, dan minimnya sarana & prasarana kesehatan merupakan faktor pemicu tingginya insidensi penyakit hipertensi di wilayah ini. Dari data distribusi 10 besar penyakit pada puskesmas kabupaten/kota di provinsi DIY Periode Januari-Desember 2011 menunjukkan bahwa penyakit hipertensi masih menjadi penyakit tidak menular dengan prevalensi yang tinggi setelah influenza dan diare. Penyakit hipertensi dan

strok menduduki peringkat pertama dan kedua pada pola kematian di Indonesia pada semua umur terutama pada kelompok umur 55- 64 tahun (Herke, 2006; Heriziana, 2017).

Hipertensi itu sendiri merupakan faktor resiko utama untuk penyakit serebrovaskular seperti stroke, transient ischemic attack, penyakit arteri koroner (infark miokard, angina), gagal ginjal, demencia, dan atrial fibrilasi. Bila penderita hipertensi disertai dengan komplikasi dengan penyakit penyerta tertentu maka akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas akibat gangguan kardiovaskularnya tersebut. Tingginya prevalensi hipertensi beserta komplikasi dengan penyakit penyertanya tersebut di Yogyakarta, diperlukan suatu program pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskuler melalui program skrining terhadap faktor risiko kardiovaskuler dan penyuluhan tentang pencegahan penyakit kardiovaskuler. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi memerlukan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu perlu usaha pemberdayaan masyarakat terhadap pengenalan faktor risiko, komplikasi dan deteksi dini hipertensi (Piepho, 2000; Rahajeng, 2009).

METODE

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mewujudkan tujuan dan realisasi program adalah kegiatan promosi kesehatan dan pelatihan. Serangkaian kegiatan mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan skrining faktor risiko hipertensi dilanjutkan dengan pelatihan terstruktur dan pendampingan.

Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian meliputi beberapa langkah. Kegiatan pengabdian yang merupakan langkah-langkah solusi atas persoalan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan. Pada tahap persiapan Tim FKIK UMY bersama dengan Mitra

menyusun rencana kegiatan, pendataan dan semua kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dibagi menjadi 4 aktifitas yaitu:
 - a. Pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan oleh tim mahasiswa FKIK UMY yang sudah terlatih.
 - b. Skrining factor risiko hipertensi. Skrining faktor risiko dilakukan oleh dosen dan mahasiswa senior yang sudah terlatih. Tim FKIK UMY telah membentuk Tim dan telah melatih untuk melakukan kegiatan skrining.
 - c. Penyuluhan dan Edukasi hipertensi.
 - d. Pelatihan pengukuran tekanan darah yang benar kepada kader kesehatan.
 - e. Pembagian leaflet kepada pasien.

Untuk memastikan agar pengetahuan pasien terkait hipertensi menjadi lebih baik, maka dibagikan leaflet kepada pasien untuk dapat dipelajari di rumah. Hal ini bertujuan agar mereka tidak lupa dan dapat mempelajari kembali terkait hipertensi di manapun dia berada.

3. Laporan, evaluasi, dokumentasi dan data hasil kegiatan disusun dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan laporan. Pada naskah laporan juga diuliskan hasil evaluasi kegiatan disertai rekomendasi sesuai temuan yang didapatkan sehingga pelaksanaan

berikutnya bisa berjalan lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan mulai bulan April 2018–September 2018. Tahapan kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat ijin pengabdian masyarakat
2. Ijin pengabdian dilakukan dengan cara menghubungi pihak perangkat desa dan menyampaikan maksud dari kegiatan pengabdian yang akan dilakukan.
3. Perkenalan program ke sasaran pengabdian Setelah mendapatkan ijin pengabdian selanjutnya tim melakukan pengenalan program pengabdian kepada sasaran pengabdian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran kegiatan dan menyamakan persepsi kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 20 April 2018.
4. Pelatihan Kader Kesehatan

Pelatihan kader kesehatan tentang pengukuran tekanan darah serta promosi hipertensi. Materi pelatihan kader ini meliputi pengenalan alat-alat untuk pemeriksaan tekanan darah, menyampaikan informasi tentang tekanan darah dan hipertensi, dan melatih kader kesehatan cara pengukuran tekanan darah yang benar.

Gambar 1:
Pelatihan Kader Kesehatan



5. Pemeriksaan tekanan darah

Pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui faktor risiko sasaran terkait penyakit hipertensi. Sebanyak 105 orang yang diperiksa tekanan darahnya, didapatkan 31 orang menderita hipertensi. Rentang umur kurang dari 40 tahun didapatkan 8 orang penderita hipertensi. Sedangkan kelompok umur 45-55 tahun juga didapatkan 8 orang dengan hipertensi. Terdapat 15 orang dengan hipertensi pada kelompok usia lebih dari 75 tahun.

6. Skrining faktor risiko hipertensi

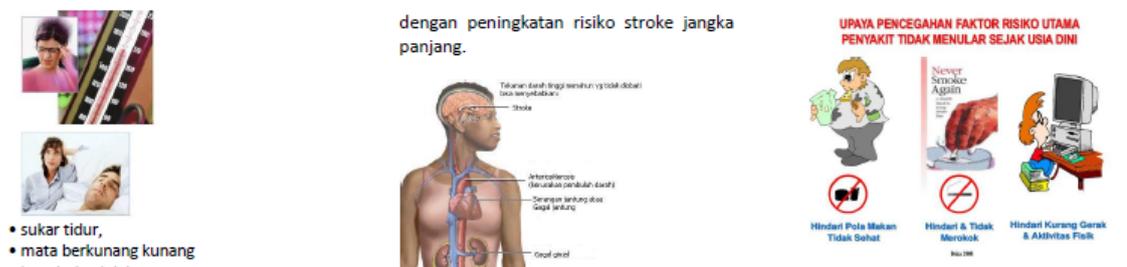
Skrining faktor risiko hipertensi telah dilakukan. Faktor risiko hipertensi yang diamati pada pengabdian ini

meliputi BMI, dan kadar gula darah. Terdapat 3 orang yang mempunyai BMI di atas normal.

7. Pembagian leaflet hipertensi

Untuk memastikan agar pengetahuan pasien terkait hipertensi menjadi lebih baik, maka dibagikan leaflet kepada pasien untuk dapat dipelajari di rumah. Hal ini bertujuan agar mereka tidak lupa dan dapat mempelajari kembali terkait hipertensi di manapun dia berada. Kegiatan ini sudah dilakukan pada tanggal 26 Juli 2018. Leaflet pengabdian yang kami lakukan seperti pada gambar di bawah ini (Gambar 2).

Gambar 2:
Leaflet hipertensi



dengan peningkatan risiko stroke jangka panjang.

Tekanan darah tinggi semakin yg tidak diobati bisa menyebabkan stroke

Atherosclerosis (Merusak pembuluh darah) — Sering berangin dan Gagal Jantung

Gagal ginjal

Hipertensi yang tidak terkendali akan meningkatkan risiko kematian dan sering digambarkan sebagai silent killer.

Tata Laksana dan Pencegahan Hipertensi adalah kelainan seumur hidup, diperlukan komitmen jangka panjang terhadap modifikasi gaya hidup dan terapi obat-obatan.

Strategi: 1. Pencegahan dan pengobatan obesitas: peningkatan indeks massa tubuh (BMI) dan lingkaran pinggang dikaitkan dengan peningkatan risiko kardiovaskular yang tinggi, seperti hipertensi, diabetes melitus, glukosa puasa terganggu, dan hipertrofi ventrikel kiri (LVH).

UPAYA PENCEGAHAN FAKTOR RISIKO UTAMA PENYAKIT TIDAK MENULAR SEJAK USIA DINI

Hindari Pola Makan Tidak Sehat

Hindari & Tidak Merokok

Hindari Kurang Gerak & Aktivitas Fisik

2. aktivitas fisik aerobik yang sesuai

3. Diet rendah garam, lemak total, dan kolesterol

4. Asupan makanan yang cukup; kaya potassium, kalsium, dan magnesium

5. hindari konsumsi alkohol, rokok, penggunaan obat-obatan terlarang, seperti kokain

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah mitra bertambah ketrampilan dan pengetahuannya tentang pengukuran tekanan darah, hipertensi dan faktor risikonya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, 2002, Laporan SKRT 2001: Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular, Studi Morbiditas dan Disabilitas.

- Depkes RI, 2006, Pedoman Teknis Penemuan Dan Tatalaksana Penyakit Hipertensi, Direktorat P2PL, Jakarta.
- Herke J.O. Sigarlaki, 2006, Karakteristik Dan Faktor Berhubungan Dengan Hipertensi Di Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Tahun 2006, Makara Kesehatan, Vol. 10, No. 2: 78-88.
- Heriziana, 2017, Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Di Puskesmas Basuki Rahmat Palembang, Jurnal Kesmas Jambi (JKMJ), Vol.1 No.1.
- Kementerian Kesehatan, 2013, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2012, Jakarta.
- Piepho, RW. 2000, Overview The Angiotensin-Converting-Enzyme-Inhibitor. *Am J ealth- Syst Pharm* 57(Suppl 1) : S3-7.
- Rahajeng E, 2009, Prevalensi Hipertensi dan Determinannya di Indonesia, *Majalah Kedokteran Indonesia* Vol. 59 No. 12
- Seksi Surveilans & Imunisasi, 2012, Dinkes Provinsi DIY. Laporan STP Puskesmas: Pengamatan pada Penyakit Tertentu.

Efektifitas Program Partisipatif Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat

Effectiveness of Women's Group Participative Program in Improve the Community's Self-help

¹Yeni M, ²Sartika Yuliana, ³Rini Parmila Yanti

Universitas Negeri Padang (UNP), Padang

³rini_sosiologunp@yahoo.com

Riwayat Artikel: Dikirim 8 Oktober 2018; Diterima 28 November; Diterbitkan 30 November

Abstrak

Di era otonomi daerah, yang diawali dengan UU RI No. 22 Tahun 1999, yang diamandemen dengan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah lokal, telah memberikan kesempatan bagi otonomi daerah dan kesempatan-kesempatan untuk mengoptimalkan sumber daya-sumber daya yang ada di daerah guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk merencanakan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Produk hukum tersebut sekali lagi mengubah *deadlock* paradigm pembangunan dari atas ke bawah ke pembangunan berbasis masyarakat dari bawah ke atas, yang mana merupakan model dari pola pembangunan partisipatoris yang diterapkan di Kabupaten Sijunjung, yang melibatkan masyarakat dalam semua proses pembangunan. The purposes of the research conducted by the author are: 1) untuk mengetahui bagaimana program tersebut diimplementasikan di Desa Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung selama periode 2 tahun. 2) untuk menentukan bagaimana level pemerintahan Desa Kunangan Parik Rantang pada setiap pembangunan yang dilakukan melalui program partisipatoris. 3) untuk mengetahui bagaimana efektivitas program partisipatoris di Desa Kunangan Parik Rantang dalam upaya untuk meningkatkan program-program swadaya yang diterapkan melalui partisipatoris. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana peneliti mencoba untuk menggambarkan seluruh gejala, kejadian, dan fenomena apa adanya dalam kaitannya dengan data dan informasi yang telah diperoleh dari responden (sumber data). Hal ini dilakukan secara konstan merujuk pada pembahasan isu-isu yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Moloeng “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang memproduksi data dalam bentuk kata-kata – tertulis atau kata-kata yang diucapkan oleh orang – orang dan perilaku yang dapat diamati”. Studi ini menunjukkan bahwa program pembangunan partisipatoris adalah program yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran organisasi-organisasi pemerintahan akan pembangunan, karena program tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring pembangunan tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, dengan pola pembiayaan 30% dibebankan kepada masyarakat dan 70% kepada pemerintah, dalam rangka meningkatkan rasa memiliki dari publik atas hasil-hasil pembangunan, yang pada akhirnya tanpa perintah, masyarakat akan berkontribusi pada hasil-hasil pembangunan tersebut. Program ini juga merupakan salah satu solusi bagi pemerintah daerah Sijunjung dalam mengatasi kurangnya dana yang tersedia untuk pembangunan di anggaran Kabupaten Sijunjung, oleh karena pola partisipatifnya bila dibandingkan dengan apa yang tender atau kontraktor lakukan akan mampu menyediakan dana sebesar 30,32% untuk pelaksanaan pembangunan. Sayangnya, program ini tampak kurang mendapat dukungan dari kelompok elit – elit dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sijunjung, dibuktikan dengan rendahnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah lokal, yang hanya berkisar antara 0,5% dan 0,7% setiap tahunnya dari keseluruhan Anggaran dan Pengeluaran Kabupaten Sijunjung. Pemerintah maupun dewan di Sijunjung harus memiliki komitmen dan hasrat yang kuat untuk meningkatkan alokasi dana partisipatoris setiap tahun sebesar 1,5-2,0%, dari total anggaran Kabupaten Sijunjung, yang sebesar 14-15 milyar rupiah per tahun. Komposisi pembiayaan pembangunan partisipatoris yang saat ini dibagi menjadi 70% pemerintah dan 30% kelompok masyarakat perlu dirubah menjadi 85% pemerintah lokal dan 15% kelompok masyarakat, sehingga komposisi pembiayaan partisipatif tidak terlalu membebani kelompok pengusul yang secara ekonomi lemah, dan mereka diharapkan untuk dapat langsung mengimplementasikan pengembangan ini melalui pola-pola partisipatoris.

Kata kunci: program partisipatif, kabupaten Sijunjung, masyarakat

Abstract

In the era of regional autonomy, which starts from the regulations of Law Number 22 of 1999 as amended by Act Number 32 of 2004 concerning local government, has provided an opportunity for local autonomy and opportunities to optimize existing resources in the region for the prosperity and welfare of the people, then to plan the development of regulated law No. 25 Year 2004 concerning the system of national development planning, regulatory legal product is once again paved the deadlock top-down development paradigm into a folk-based development of bottom-up, the main approach to bottom-up models which is the model of participatory development patterns in Sijunjung Regency involving the community in the whole process of development. The purpose of the research conducted by the author are: 1) To find out how the program is implemented in village of Kunangan Parik Rantang, District of Kamang Baru, Sijunjung within a period of 2 Years. 2) To determine how the level of Governmental village of Kunangan Parik Rantang in every development is carried out through a participatory program. 3) To know how Participatory Program Effectiveness in villages Kunangan Parik Rantang in an effort to improve the non-governmental development programs implemented through participatory. This study is a descriptive research method with qualitative approach, where researchers try to describe all the symptoms, events or phenomena as it is in accordance with the data and information that has been obtained from the respondents (data source), this is done by constantly referring to the discussion of issues that have been determined in advance, according Moleng "qualitative research is a research procedure that produces a data description form of words - written or spoken words of people - people and behaviors that can be observed". This study shows that participatory development program is a program that is very effective in raising the awareness and governmental organizations to development, because the program does not only involve the community in the planning, implementation and monitoring of development, but also involving communities in development financing, with the pattern of charging 30% community, and 70% of Government, so as to increase the sense of public ownership of the results of development, which in the end without command will always keep the public with the results of such development. The program also is one of the solutions for local government Sijunjung, in overcoming the lack of funds available for development in the district budget Sijunjung, because the participative pattern when compared with the pattern of the tender or contractors did Sijunjung local governments, will be able to save funds to the implementation of a development of 30.32%. Unfortunately, this program seems less a place in the hearts of the elite - the elite and stakeholders in Sijunjung Regency, evidenced by the lack of funds budgeted by the local government, which is only 0.5% to 0.7% annually of the total Budget and Expenditure of Sijunjung, to the District Government of Sijunjung together with parliament of Sijunjung must have a strong commitment and desire, to increase the allocation of funds participatory, every year to 1.5% up to 2.0%, of the total budget Sijunjung, which Range between 14 to 15 billion annually. Participatory development funding composition, currently borne by the local government 70%, and community groups proposer of 30%, should be changed to 85% of local government - and community groups proposing 15%, so that the composition of participative funding, not overly burden the proposer group, which the economically weak, and they are expected to eventually be able to implement this development through participatory patterns.

Keywords: *participative program, Sijunjung regency, community*

PENDAHULUAN

Penyediaan dana hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, dalam bentuk Program Partisipatif sebagai perangsang pelaksanaan pembangunan di kabupaten Sijunjung, diharapkan akan mampu memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan serta ikut merasa memiliki hasil-hasil pembangunan serta timbulnya keinginan untuk memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut.

Adapun dasar pelaksanaan dari program partisipatif ini oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan dipertegas dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Dana Program Partisipatif Kabupaten Sijunjung yang bertujuan:

1. Mendorong terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Nagari.
2. Meningkatkan nilai tambah dan volume hasil hasil pembangunan akibat muncul nya partisipasi masyarakat dari setiap dana pembangunan yang dialokasikan.

3. Mendorong terciptanya nilai-nilai kegotongroyongan pada masyarakat di Nagari.
4. Secara langsung meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan kegiatan pembangunan bagi kelompok-kelompok masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan administrasi dan teknis kegiatan pembangunan.
5. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat atas hasil-hasil pembangunan, sekaligus meningkatkan keinginan dan rasa tanggung jawab dalam pemeliharaan hasil pembangunan

Sementara itu sasaran dari program pembangunan partisipatif adalah untuk meningkatkan hasil dan nilai pembangunan yang dilandasi oleh kebutuhan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sijunjung, dana bantuan program partisipatif ini diberikan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan perekonomian masyarakat, seperti: Jalan dan jembatan, pendidikan, Kesehatan, olah raga, pengairan dan jalan usaha tani dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam implementasinya dilapangan, program ini juga mempunyai dampak positif dan negatif terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan di kabupaten sijunjung.

Prosedur dan mekanisme untuk memperoleh bantuan dana melalui program partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Kelompok masyarakat nagari yang berminat mendapatkan bantuan dana program partisipatif untuk membiayai kegiatan, mengajukan permohonan kepada Bupati Sijunjung Cq. Pokja Kabupaten yang diketahui oleh Wali Nagari dan disampaikan melalui Camat dengan melampirkan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan bagian kegiatan yang

- direncanakan dibiayai dari dana program partisipatif, Rencana kegiatan yang diusulkan diutamakan yang telah dibahas dalam Musrenbang Nagari pada tahun sebelumnya dan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) yang bersangkutan.
2. Bagi kelompok masyarakat yang mengajukan dana Program Partisipatif, membentuk panitia pembangunan yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dengan susunan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan personil lainnya sesuai dengan kebutuhan serta diharapkan panitia ada dari unsur LPM Nagari.
3. Permohonan/Proposal dari kelompok masyarakat/Panitia Pembangunan dilampiri dengan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana serta foto 0% pada 3 titik lokasi yang berbeda
 - b. Hasil Rapat / Musyawarah kelompok yang diketahui oleh Wali Nagari
 - c. Surat Pernyataan kesanggupan swadaya masyarakat
 - d. Susunan organisasi kelompok masyarakat sebagai pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
 - e. Daftar hadir peserta rapat/Musyawarah yang dilegalisasi oleh Wali Nagari
 - f. Foto Copy KTP Ketua Pelaksana Kegiatan
 - g. RAB Kegiatan yang diketahui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Daerah
 - h. Dan Surat Penyerahan Lahan / Bukti kepemilikan Lahan yang terkena dampak Kegiatan
4. Jika dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh panitia pembangunan sesuai dengan RAB dan gambar rencana, maka ketua pembangunan akan diberikan teguran tertulis dan harus

mengembalikan dana hibah ke kas daerah, senilai bobot pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, dan bagi nagari yang bersangkutan tidak akan diberikan bantuan dana program partisipatif selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

5. Evaluasi program bantuan dana partisipatif dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja terhadap kegiatan pembangunan yang meliputi : input, output, hasil, manfaat dan dampak dari hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama sesempurna apapun sistem yang telah disusun dalam perencanaan sebuah program, namun dalam implemenasinya pastilah akan banyak menimbulkan masalah-masalah, ini disebabkan para pelaku perencana pembangunan yang tidak teliti dan tidak menguasai sistem perencanaan pembangunan dengan baik, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, seperti sangat minimnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk Program Partisipatif yang hanya kurang 1 (Satu) % dari total APBD Kabupaten Sijunjung setiap tahunnya, juga sangat tingginya dana pendamping yang harus disediakan oleh kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan program ini, yakni sebesar 30 % dari total anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah kegiatan pembangunan, serta masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, karena masih adanya pola pikir masyarakat yang menganggap pembangunan adalah kewajiban pemerintah, sedangkan masyarakat hanyalah sebuah onjek dari pembangunan.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis termotivasi untuk mengetahui dan menganalisa secara lebih mendalam tentang program partisipatif ini di kabupaten sijunjung, dengan memilih judul penelitian “Efektivitas Program Partisipatif Kaum Perempuan dalam Meningkatkan Swadaya

Masyarakat Untuk Pembangunan di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mencoba menggambarkan semua, gejala ataupun peristiwa atau fenomena secara apa adanya sesuai dengan data dan informasi yang telah diperoleh dari responden (sumber data), hal ini dilakukan dengan senantiasa mengacu pada pembahasan masalah yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nana Sudjana dan Ibrahim (1989: 64) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah:

“Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dimana peneliti berusaha melihat peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya”

Moloeng (2007: 3) berpendapat bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati”

Sejalan dengan itu, Denzim dan Lincoln dalam Moloeng (2007: 5) mengatakan:

“Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”

Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah – masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan dan masalah – masalah yang bersifat aktual. Secara ringkas cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah non eksperimental dan analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif.

Pendeskripsian ini dilakukan dalam bentuk keterangan – keterangan ataupun informasi, diupayakan untuk diterjemahkan dalam bentuk keterangan, untuk data dalam

bentuk angka – angka dijadikan sebagai dasar analisis ataupun bahan untuk memperkuat pembahasan.

Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah siswa kelas XII SMA NEGERI 1 Ampel. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode partisipatif artinya mitra binaan secara aktif dilibatkan semua dalam semua tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Tahapan Pelaksanaan

Berangkat dari permasalahan yang muncul disusun berbagai alternatif untuk memecahkan masalah. Dari berbagai alternatif, dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai berikut:

No	Tahapan	Kegiatan
1	Tahap I	Persiapan : perizinan, persiapan bahan dan materi
2	Tahap II	Memberikan materi pelatihan
3	Tahap III	Praktek strategi pencarian informasi
4	Tahap IV	Evaluasi dan tindaklanjut
5	Tahap V	Pelaporan hasil dan publikasi

1. Langkah-langkah

Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan evaluasi. Siswa mendengarkan pelatihan mengenai karakter taat dan memberikan pertanyaan kepada siswa terkait ketaatan yang dilakukan. Evaluasi dari kegiatan ini menekankan pada proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan pada saat siswa mendengarkan ceramah. Melalui pertanyaan dan keseriusan siswa akan diperoleh bagaimana antusiasme dan kebermanfaatan kegiatan ini. Akan dievaluasi juga tentang pengetahuan siswa

tentang pengalaman yang dilakukan siswa saat aktivitas belajar.

Kegiatan ini menggunakan metode pelatihan yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan materi pelatihan berupa *pre-test*, pelatihan materi (ceramah), *post-test*, serta evaluasi yang disajikan secara bersamaan. Setelah kegiatan pelatihan, akan dilanjutkan kegiatan evaluasi sebagai bahan koreksi bagi penyelenggara kegiatan. Hasil evaluasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan serupa terkait dengan kegiatan pendidikan pemakai.

Adapun penjabaran langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Analisis situasi dengan menyebar survey karakter taat kepada siswa
2. Persiapan pengabdian masyarakat meliputi perizinan, persiapan bahan dan materi
3. Pelatihan melalui presentasi menggunakan *powerpoint* untuk memberikan materi
4. Praktek strategi karakter taat melalui aktivitas belajar siswa
5. Monitoring dan evaluasi
6. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan publikasi pengabdian masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi empat kegiatan yaitu :

- a. Memberikan *post-test* kepada siswa mengenai karakter taat melalui angket
- b. Pelatihan melalui presentasi menggunakan *powerpoint* untuk memberikan materi berupa karakter taat pada siswa untuk meningkatkan aktivitas belajar
- c. Memberikan *pre-test* kepada siswa setelah diberikan pelatihan berupa karakter taat untuk meningkatkan aktivitas belajar melalui angket
- d. Monitoring dan evaluasi yaitu kegiatan yang *mem-follow up* dari kegiatan yang pernah dilakukan sehingga pelaksana menemukan temuan-temuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/perbaikan ketika melaksanakan kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Partisipatif yang dilaksanakan di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir

Selain upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di nagari, pelaksanaan program partisipatif juga bertujuan menghidupkan kembali potensi budaya masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang, program partisipatif perlu dilanjutkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan, supaya pembangunan berbasis nagari yang didambakan Pemkab Sijunjung terwujud dan tercapai sesuai sasaran dan harapan.

Menurut Muchlis Anwar yang penulis wawancarai tanggal 21 Nopember 2014 mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung menyatakan:

pola pembangunan partisipatif yang merupakan program strategis Kabupaten Sijunjung, telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2001.

Dalam rentang waktu 14 tahun (2001-2014), cukup banyak pembangunan prasarana dasar dan infrastruktur yang dituntas. Pembangunan yang hasilnya telah dirasa dan dinikmati masyarakat, mencakup di seluruh sektor. Seperti sarana dan prasarana perhubungan, irigasi, pasar, pendidikan serta sarana ibadah dan olahraga.

Karena merupakan upaya percepatan dan pemerataan, pembangunan yang seluruhnya bermuara kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tidak saja terkonsentrasi di ibu kabupaten dan kecamatan, tapi merata di seluruh nagari.

Percepatan dan pemerataan pembangunan bisa tercapai, karena pelaksanaan program partisipatif diatur dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam bentuk keputusan bupati yang mengatur pelaksanaan dan

pengelolaan serta mekanisme yang jelas dan ringkas serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum tahapan pelaksanaan program partisipatif meliputi, sosialisasi kepada masyarakat, pengusulan proposal kegiatan lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh masyarakat, penilaian kelayakan proposal dan RAB oleh kelompok kerja di lapangan serta tahap penyerahan bantuan kepada panitia pelaksana kegiatan.

Penggunaan dana yang sudah diatur dalam PTO, dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama dana dicairkan 50 persen setelah proposal disetujui. Setelah dana yang diambil pada tahap pertama dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan setelah pekerjaan pembangunan mencapai 50 persen, dicairkan dana tahap kedua 45 persen.

Sedangkan dana yang tersisa lima persen, dicairkan pada tahap ketiga setelah panitia pembangunan menyerahkan dan melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana tahap pertama dan kedua yang juga dilengkapi dengan laporan pelaksanaan/berita acara serahterima pekerjaan.

Karena begitu ketat dan selektifnya penggunaan dana, berbagai sarana dan prasarana yang dituntaskan melalui program partisipatif, tidak saja mampu mempercepat dan pemerataan pembangunan, tapi hasilnya juga berlipat ganda, karena masyarakat nagari berperan aktif dalam mengerjakannya. Justru itu, tahun-tahun mendatang program ini perlu dilanjutkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pola pembangunan yang partisipatif yang langsung menyentuh masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun ini melouning secara resmi program baru yang diberi nama P2BN (Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari) yang diatur dalam Peraturan Bupati Sijunjung No.14 Tahun 2011 dan tahun

ini dialokasikan dana sebesar Rp.6 M. Dimana program ini sebagian besar mengadopsi pola PNPM yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat yang di inginkan dapat terwujud, karena program ini dari, oleh dan untuk masyarakat.

Tujuan dari program ini adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari
 2. Memberdayakan pemerintah nagari dalam pelaksanaan pembangunan Nagari
 3. Meningkatkan peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Nagari dalam upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakat serta penanggulangan kemiskinan
 4. P2BN dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat untuk mendanai kebutuhan fisik sarana prasarana dalam usaha peningkatan ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan
- Sarana/prasarana yang dapat dibantu:
- a. Sarana/prasarana Jalan
 - b. Sarana/prasarana Irigasi
 - c. Sarana/prasarana Pertanian
 - d. Sarana/prasarana Perkebunan Rakyat
 - e. Sarana/prasarana Perikanan
 - f. Sarana/prasarana Peternakan
 - g. Sarana/prasarana ekonomi masyarakat
 - h. Usaha industri rumah tangga
 - i. Pasar Tradisional

Dengan Program ini diharapkan akan mampu membantu Masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sijunjung.

1. Kendala dalam pelaksanaan

Di dalam pelaksanaan Pembangunan partisipatif banyak batu sandungannya. Artinya adalah dalam pembabgunan partisipatif seharusnya antara realita yang terjadi dengan yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian masyarakat merasa

memilki nagari sagat sederhana, meilihara dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Di dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif di nagari Kunaqngan Parik Rantang maka tidak bisa kita pungkirri perlu ada yng namanya tahapan tahapan pelaksanaan dalam pembagunan di nagari. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari.

Pertama; Partisipasi masyarakat dalam tahapan ini merupakan kelanjutan dari proses perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan ini sebetulnya dapat dilihat sebagai sebuah sumbangan masyarakat baik dalam bentuk tenaga, uang maupun material yang diarahkan kepada jalannya program pembangunan. Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat tersebut dapat dinilai sebagai sebuah indikator berpartisipasinya sebuah masyarakat.

Kedua; Partisipasi masyarakat pada bagian ini diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menganalisa serta mencermati hasil program yang telah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Dengan demikian masyarakat dapat menilai kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan nagari.

Ketiga; Sesuai dengan aspek yang diteliti, maka masyarakat juga dapat menilai apakah pembangunan benar-benar telah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian itu dapat berbentuk pemanfaatan oleh masyarakat terhadap hasil pembangunan. Bila tak dimanfaatkan dengan baik berarti tak sesuai dengan perencanaan dan penggalangan aspirasi yang dilakukan sebelumnya.

Hambatan dalam pembangunan partisipatif menurut wali nagari Kumanis Gogar Marajo; adalah kebijakan pemerintah terdahulu dalam pembangunan di nagari Kumanis tidak melibatkan masyarakat sehingga permasalahan gotong royong mulai pudar ini terjadi pada masa rezim Orde Baru.

Artinya selama Orde Baru keputusan dan perencanaan berasal dari pusat jadi masyarakat hanya menerima apa yang telah di putuskan oleh pusat, ini yang kemudian di sebut dengan pembangunan Top Down (dari atas kebawah).

Jadi masyarakat sudah terbiasa menerima tugas atau instruksi dari atas jadi, ketika tidak ada instruksi dari atas maka partisipasi belum muncul kepermukaan dan ini mengalir sampai hari ini. Pembangunan partisipatif mencoba mengobati penyakit orde baru dengan cara melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Jadi artinya masyarakat bawak di berdayakan dalam pembangunan partisipatif.

Namun kendala yang kita rasakan hari ini dalam pembangunan partisipatif adalah kurang kesadaran masyarakat artinya semangat individualisme semakin meroket sementara semangat kebersamaan turun dratis terbukti ketika diadakan gotong royong dalam pembangunan di nagari ternyata kurang kesadaran masyarakat untuk hadir.

Adapun Faktor penyebab terhambatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di nagari.

- Belum ada satu kesepahaman konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan
- Faktor budaya masyarakat yang telah terlanjur dibangun pada pembangunan masa orde baru masyarakat pasif
- Manipulasi partisipasi masyarakat
- Minimnya kapasitas organisasi
- Kemungkinan munculnya konflik akibat perbedaan tuntutan dari warga

2. Upaya mengatasi Kendala

Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya,

karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut:

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang ada di nagari ini, yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
2. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap masyarakat nagari mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua lembaga yang ada dinagari harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses

pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

6. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai seluruh unsur masyarakat yang ada di nagari Kunangan Parik Rantang ini tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Tingkat Swadaya Masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan melalui program partisipatif

Memperhatikan tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa swadaya masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang dalam pelaksanaan program partisipatif ini dapat dikatakan baik tapi belum seperti yang diharapkan yakni mencapai angka berimbang dengan biaya stimulan pemerintah.

Swadaya masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia, Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya swadaya masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan Biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut, Dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung swadaya

masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat, Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya swadaya masyarakat akan dirasakan sehingga akan menjadi suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yaitu : penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Nagari Kunangan Parik Rantang ikut berwadaya, dengan berbagai macam alasan.

Hal ini disadari karena adanya beberapa factor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang swadaya masyarakat dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berswadaya.

Ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan swadaya masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan maksimal, Sebagai sarana swadaya masyarakat di nagari telah di bentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Melalui lembaga ini masyarakat di harapkan dapat membantu mempercepat atau mengefektifkan pembangunan di Nagari dan Pembangunan Nasional pada Umumnya.

Peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan, di harapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang di butuhkan dan dirasakan oleh mereka.

Pada saat ini pemerintah daerah kabupaten sijunjung hanya menganggarkan dana hibah untuk program partisipatif ini sebesar 0,5 % sampai dengan 0,7 % setiap tahunnya dari total APBD Kabupaten Sijunjung, yang besarnya berkisar antara 4 milyar sampai dengan 5 milyar setiap tahunnya.

Melihat dari besaran APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 dan 2014 yang masing – masing berjumlah Rp 659 Milyar dan Rp 717 Milyar, maka rasanya tidak lah akan terlalu membebani daerah apabila dana hibah untuk program partisipatif ini ditingkatkan menjadi 1,5 % sampai dengan 2 % setiap tahunnya dari total APBD Kabupaten Sijunjung, apabila ini bisa diwujudkan maka kabupaten sijunjung bisa menganggarkan dana hibah guna program partisipatif sebesar lebih kurang Rp 14 milyar setiap tahunnya.

Namun keinginan ini sepertinya tidak terlalu mendapatkan respon yang positif dari elit-elit di kabupaten sijunjung terutama pihak eksekutif dan legeslatif, karena mereka berfikiran program ini nantinya akan dapat mengecilkan kepentingan mereka dalam proses pembangunan dikabupaten sijunjung, karena saat ini di kabupaten sijunjung ada 3 (tiga) pola perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menyusun kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten yaitu:

1. Perencanaan Teknoratis, yakni perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh Bupati beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.
2. Perencanaan Politis, Yakni perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh

anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten sijunjung yang lebih dikenal dengan nama dana sinergi yang besarnya saat ini mencapai 1 milyar per anggota.

3. Perencanaan Partisipatif, yakni perencanaan yang dilaksanakan secara reguler melalui Rembug Jorong, Musrembang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.

Apabila seluruh elit yang ada dikabupaten sijunjung mempunyai visi yang sama dalam memajukan daerah dan nagari yang ada dikabupaten sijunjung, maka sudah saatnya mereka mendukung penuh program pembangunan, seperti program pembangunan partisipatif ini, karena disamping program ini dapat menghemat anggaran yang hampir mencapai 30 %, program ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Bila sistem dan prosedur musyawarah nagari berlangsung dalam suasana kondusif; proses musyawarah difasilitasi secara efektif oleh fasilitator yang paham metodologi; keterlibatan aparat pemerintah tidak dominan; hasilnya merupakan formulasi yang dapat diterima oleh mayoritas anak nagari, maka diharapkan sudah ditemukan suatu format perencanaan/ skenario pembangunan ekonomi berbasis partisipasi seluruh komponen nagari. Sebuah modal yang kuat untuk menindaklanjuti pengembangan ekonomi seperti dimaksud diatas.

Bila kebijakan umum pembangunan ekonomi nagari secara prinsip sudah disepakati oleh seluruh komponen nagari, maka soal selanjutnya adalah bagaimana memulai dan darimana harus melangkah. Mengingat potensi nagari ada di rantau dan di nagari, maka idealnya adalah menghadirkan sebuah Tim Fasilitator Partisipasi (selanjutnya disebut Tim) untuk memandu nagari dalam fase inisiasi dan transisional. Katakanlah suatu tim yang terdiri dari 5 orang sarjana (dengan berbagai latar belakang) dengan kualifikasi

profesional LSM yang dilekatkan kedalam aktifitas pembangunan ekonomi nagari.

Tim yang memiliki kapasitas pengorganisasian; kemampuan metodologis menggerakkan partisipasi, mampu memandu penyusunan skenario pengembangan; memiliki akses ke berbagai pihak yang dapat mendukung pembangunan nagari (propinsi, nasional dan internasional) dan memiliki visi global serta khususnya berkemampuan teknis di bidang teknologi informasi. Tahapan kerja Tim dapat berupa:

Tim akan bekerja untuk mengkuantifikasi potensi yang dimiliki nagari (SDA, SDM, Teknologi) dan bekerja efektif mengembangkan skenario sinergi berbagai potensi itu bagi manfaat ekonomi maksimal anak nagari. Dapat dimulai dengan menghitung aset nagari berupa lahan ulayat, hutan nagari, sumber daya air, pasar nagari, sarang burung layang-layang, ulayat yang “dipinjamkan” kepada pemerintah/investor, dan berbagai aset lainnya. Selanjutnya tim bekerja menyusun rancangan usaha/business plan berdasarkan keunggulan potensi setempat yang akan dikonsultasikan dalam musyawarah nagari untuk disempurnakan serta segera dapat diterapkan.

Berdasarkan business plan Tim bekerja menginisiasi berbagai kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani dsb.) dengan berangkat dari kesadaran dan skenario pembangunan ekonomi nagari. Idealnya seluruh anak nagari yang dikampung terlibat penuh dalam berbagai kelompok usaha yang diminatinya.

Tim juga dapat bekerja menyusun usulan “ulayat nagari baru” berupa kepemilikan HGU yang diajukan kepada pemerintah atau merekomendasikan penetapan ulayat khusus bagi pengembangan ekonomi nagari (misalnya ulayat kelautan, dimana 500 mil persegi dikelola oleh anak nagari dengan kaidah pengelolaan laut berbasis komunitas nagari).

Berdasarkan basis potensi dan peluang bisnis nagari, Tim bekerja mengembangkan berbagai kelembagaan usaha nagari berbasis kelompok-kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Institusionalisasi ini kelak akan bermuara ke bentuk **Koperasi Nagari** sesuai hakikat basis ekonomi komunal partisipatif. Namun dapat pula berkembang dengan memiliki berbagai anak usaha mengurus bisnis spesifik yang sifatnya perseroan dimana koperasi nantinya berubah peran menjadi perusahaan induk/ holding company.

Upaya mengatasi kendala

Bila selama ini untuk memperoleh stabilitas bagi ketenangan dalam membangun adalah diberlakukannya kontrol terhadap massa mengambang hasil proses depolitisasi, maka antitesanya adalah diterapkan pendekatan konsientisasi/ penyadaran politik (politisasi yang positif), memberi peluang bagi terciptanya pengorganisasian masyarakat secara murni (tidak direayasa dari atas untuk alasan apapun) serta lebih dibukanya semangat independensi/otonomi sebagai jawaban.

Kesadaran rakyat (termasuk kesadaran politis) akan problema yang dihadapi dalam membangun, ditimpali oleh terbukanya peluang mengekspresikan kreatifitas/inovasi berkat otonomi yang tercipta niscaya akan menghadirkan prakarsa-prakarsa masyarakat untuk berpartisipasi. Bila prakarsa telah berkembang, pemahaman akan keterbatasan yang dihadapi dalam melanjutkan pembangunan akan menghadirkan pula secara sadar semangat swadaya ditengah masyarakat. Kadar swadaya inilah yang menjadi bagian kontribusi riil dari masyarakat, bahu membahu bersama pemerintah menundukkan tantangan pembangunan.

Pandangan seperti ini tampaknya antitesa dari pendekatan makro pertumbuhan terpusat yang dominan dalam etappe pembangunan versi orde baru, karena prakarsa dan semangat swadaya

tidak lagi sepenuhnya memerlukan mekanisme pasar dalam memperoleh sumberdaya pembangunan. Ia tidak lagi harus tunduk kepada ekspansi modal besar, cukup modal kecil untuk kebutuhan yang secara realistis juga kecil. *Small is beautiful* menurut *Schumacher*. Investasi lebih mendahulukan kepentingan orang banyak, memberi dampak ekonomi yang adil dan merata kepada segenap lapisan rakyat (bukan orang seorang!).

Pilihan usahanyapun tidak selalu berskala besar, sehingga tidak harus memerlukan modal patungan, serta menggantungkan diri pada ekonomi global. Produk yang diolahpun lebih diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan dasar yang menyangkut hajat orang banyak. Keunggulan komparatif tidak lagi perlu ditawarkan, apalagi buruh murah harusnya menjadi tabu dan jelas tidak manusiawi untuk diajakan kepada pemodal asing. Pasar internal menjadi tujuan utama dalam memutar ekonomi nasional. Itu artinya pasar dengan sekitar 250 juta konsumennya.

Industri yang menyangkut hajat nasional kepemilikannya haruslah mencerminkan pemerataan keuntungan kepada banyak pihak, dikuasai oleh rakyat sebagai pemilik dominan. Etika bisnis disini benar-benar cerminan dari konstitusi. Sementara itu industri yang berorientasi ekspor barulah boleh dikelola secara apa yang kita amati menjadi trend dalam dunia industri kita belakangan ini. Konglomerat sebaiknya beroperasi pada lahan industri non-kebutuhan nasional agar tidak menimbulkan eksese keresahan nasional. Usaha besar silahkan berinvestasi di sektor manufaktur dan selamat berkompetisi dalam persaingan global. Stop segala praktek pembangunan yang tidak pro harkat manusia. Hentikan ekspansi pemodal besar yang sekedar meraup keuntungan dan jelas-jelas kurang memiliki etika kerja pro rakyat, pro kemanusiaan.

Menyambut pola baru era otonomi seluas-luasnya ini, pemerintah harus serius

membangun image baru yang lebih membuka peluang maksimal bagi partisipasi masyarakat. Dampak luas dari pola ini diharapkan akan menumbuhkan semangat kemandirian, keswadayaan, melanjutkan pembangunan atas upaya dan kemampuan sendiri melalui aktifitas nyata. Makanya, segera saja memulai proses pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom-up development approach*) yang sejauh mungkin melibatkan partisipasi aktif dari semua unsur masyarakat yang berkepentingan (*people-centered development*) serta dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menumbuhkan swadaya masyarakat setempat untuk kelak mampu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dalam pendekatan pembangunan yang partisipatif, upaya pemerataan dan faktor partisipasi kelompok masyarakat untuk mengembangkan swadaya mereka merupakan syarat utama. Pengolahan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi "yang sesuai" dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat adalah bagian strategis yang harus dikembangkan/didayagunakan.

Persoalannya kini adalah bagaimana memulainya serta sejauh mana kesiapan diperlukan. Ditengah dinamika yang birokratik, instruktif dan sentralistis sekarang ini, agaknya kita memerlukan energi ekstra dalam melakukan "*enforcement*", membalikkan sikap dan perilaku seluruh komponen pembangunan (mental switch).

Efektifitas Program Partisipatif di Nagari Kunangan Parik Rantang dalam upaya meningkatkan swadaya masyarakat untuk pembangunan yang dilaksanakan melalui program partisipatif

Program pembangunan partisipatif adalah program yang sangat efektif dalam meningkatkan kepedulian dan swadaya masyarakat terhadap pembangunan, karena

program ini tidak hanya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, namun juga melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, dengan pola pembebanan biaya 30 % Masyarakat dan 70 % Pemerintah, sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan, yang pada akhirnya tanpa dikomando masyarakat dengan senantiasa akan menjaga hasil-hasil pembangunan tersebut, dan juga program Partisipatif adalah salah satu solusi bagi pemerintah daerah kabupaten sijunjung, dalam mengatasi minimnya dana untuk pembangunan yang tersedia di APBD Kabupaten Sijunjung, karena dengan pola partisipatif bila dibandingkan dengan pola tender (dikerjakan oleh kontraktor) maka pemerintah daerah kabupaten sijunjung, akan dapat menghemat dana guna pelaksanaan sebuah pembangunan sebesar 30,32 %.

Selain itu untuk mengembangkan dan melembagakan swadaya masyarakat dalam pembangunan harus diciptakan perubahan suatu persepsi pemerintah dalam pembangunan serta untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat karena kritik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat.

Terkait dengan strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan nagari maka pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat, ada dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan nagari yaitu:

1. Swadaya masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat

2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

Strategi pembangunan nagari adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, swadaya masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan nagari yang ideal.

Dalam proses pembangunan swadaya masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan pembangunan disini diharapkan dengan adanya swadaya masyarakat bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri sedangkan sebagai output atau keluaran partisipasi merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya.

Untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan maka dapat digunakan kerangka konsep sebagai berikut:

1. Swadaya masyarakat perlu dikembangkan dengan pola prosedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif pada berbagai tahap dalam proses aktifitas pembangunan ekonomi.

2. Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan golongan miskin untuk berswadaya. Hal ini dimaksudkan agar mereka berpartisipasi dan bias menolong perekonomian diri sendiri.

3. Program-program pembangunan sosial ekonomi yang hendak dikembangkan perlu diperhatikan.

4. Keterlibatan agen pembaharuan dari luar komunitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu memudahkan atau partisipasi warga masyarakat dan bukan berperan sebagai pelaku utama.
5. Swadaya masyarakat perlu dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal atau kelompok yang dibentuk dari prakarsa warga masyarakat.

Apabila kerangka konsep swadaya masyarakat dalam pembangunan nagari seperti diatas dapat diterapkan maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan nagari, dengan terwujudnya tujuan pembangunan nagari selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah dan kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah

daerah itu sendiri. salah satu program pemerintah daerah kabupaten sijunjung adalah program pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya dan dibantu dengan dana hibah oleh pemerintah daerah, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir, pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan masyarakat saja namun pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem serta aktivitas dalam hal ekonomi dan sosial dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dimana sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan nagari / desa memiliki peran penting dalam terwujudnya pembangunan nasional secara lebih merata.

Pembangunan nagari / desa memiliki arti penting karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal dinagari / desa dan menggantungkan hidupnya dinagari / desa, pembangunan

nagari ditujukan agar penduduk bukan hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi juga mampu menggali segala potensi sumber daya yang ada di nagari untuk kemudian dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berharga.

Dalam pembangunan nagari partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat nagari ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri.

Agar upaya pembangunan nagari memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada di dalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Permasalahan pembangunan nagari berhubungan dengan partisipasi ketenagakerjaan, akses dan kesempatan kerja terhadap faktor produksi serta informasi yang berkaitan dengan pasar.

Dari permasalahan seperti itulah kemudian berkembang menjadi beberapa pokok permasalahan dalam pembangunan nagari sebagai berikut:

1. Kemiskinan, pembangunan bertujuan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Upaya penghapusan kemiskinan di Indonesia mengalami kesulitan karena berbagai factor seperti krisis ekonomi.
2. Kesenjangan pada pendapatan masyarakat, para penduduk nagari yang mayoritas berprofesi sebagai petani memiliki kesenjangan dalam hal pendapatan dimana petani miskin atau

petani yang memiliki kebun/sawah tidak terlalu luas akan semakin menurun sedangkan petani yang memiliki modal kuat akan semakin kaya.

3. Kegagalan transformasi, akibat dari strategi industrialisasi yang tidak terencana dan terarah dengan baik dan mengabaikan sector pertanian maka keuntungan dari pertanian akan semakin menurun seiring dengan kenaikan harga produksi dan biaya hidup yang tidak cukup diimbangi dengan perolehan hasil panen.
4. Merosotnya kelembagaan lokal pada masyarakat nagari, terjadinya pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat nagari serta terjadinya pergeseran persepsi dari masyarakat dalam memandang alokasi sumber daya karena adanya pengaruh dari mekanisme pasar.

Dari begitu banyaknya permasalahan dalam pembangunan nagari maka diperlakukan suatu strategi untuk mengatasinya, strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin terjadinya kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Selain strategi dasar tersebut maka perlu adanya strategi pendukung dalam mengatasi masalah pembangunan nagari yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi pendidikan dan infrastruktur lainnya serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang

diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan nagari sangatlah penting perannya, seperti kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa - apa yang telah penulis coba uraikan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Program Partisipatif yang dilaksanakan di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung telah terlaksana beberapa tahun terakhir namun dana tersebut belum dirasakan oleh jorong-jorong dalam nagari Kunangan parik Rantang secara merata. Dalam kurun waktu 2 (Dua) Tahun Terakhir.
 - a. Terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yang mencakup segala bidang pembangunan yakni, Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana Serta Bidang Ekonomi.
 - b. Hanya dapat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berekonomi baik
 - c. Dana pembangunan yang dilaksanakan melalui program partisipatif masih sangat rendah, bila dibandingkan dengan dana yang berasal dari APBN dan APBD
2. Tingkat Swadaya Masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan melalui program partisipatif.
 - a. Swadaya masyarakat untuk setiap kegiatan pembangunan melalui pola partisipatif cukup tinggi sesuai yang syaratkan dalam program
 - b. Swadaya Masyarakat ini dapat mengurangi beban APBD Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan pembangunan di setiap Nagari karena dengan pola

partisipatif bila dibandingkan dengan pola tender (dikerjakan oleh kontraktor) maka pemerintah daerah kabupaten sijunjung, akan dapat menghemat dana guna pelaksanaan sebuah pembangunan sebesar 30,32 %.

3. Efektifitas Program Partisipatif di Nagari Kunangan Parik Rantang dalam upaya meningkatkan swadaya masyarakat untuk pembangunan yang dilaksanakan di nagari Kunangan belum mencapai angka perimbangan antara dana stimulan pemerintah dengan nilai partisipasi masyarakat
 - a. Program pembangunan partisipatif adalah program yang sangat efektif dalam meningkatkan kepedulian dan swadaya masyarakat terhadap pembangunan, tapi belum menyentuh seluruh daerah dalam nagari Kunangan Parik Rantangs
 - b. Komposisi pembiayaan dalam program partisipatif yang mengharuskan Masyarakat menyediakan dana swadaya sebesar 30 % dari total dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah pembangunan, terkadang dirasakan berat oleh masyarakat, sehingga program ini hanya bisa didapatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mampu menyediakan dana swadaya sebesar 30 %, bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu menyediakan dana swadaya sebagaimana dimaksud maka mereka tidak akan pernah mendapatkan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, (2005) Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia.
- Gie, The Liang. (1993). Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara. Yogyakarta, Gadjah Mada University, Press.

- Koeswara, E. (2001). Otonomi Daerah : Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta, PT. Sembrani Aksara Nusantara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2001). Inventarisasi Kajian tentang Kelembagaan Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Ndraha, Hadari. (1993). Pengembangan Teori Pengembangan Sumberdaya Manusia. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurmadi, Achmad. (1999). Manajemen Kota. Yogyakarta, Penerbit Sinergi Publishing.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional (SPPN).
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2001 Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 10 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis operasional (PTO) Bantuan Dana Program Partisipatif Kabupaten Sijunjung.

